



**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN INKLUSIF
DI SDN 3 KARANGREJO KECAMATAN BANYUWANGI
KABUPATEN BANYUWANGI**

TESIS

Oleh :

**Maysusi Indri Hapsari
NIM 130920101002**

**KONSENTRASI ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN PUBLIK
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2019**



**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN INKLUSIF
DI SDN 3 KARANGREJO KECAMATAN BANYUWANGI
KABUPATEN BANYUWANGI**

TESIS

Oleh :

**Maysusi Indri Hapsari
NIM 130920101002**

**KONSENTRASI ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN PUBLIK
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2019**



**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN INKLUSIF
DI SDN 3 KARANGREJO KECAMATAN BANYUWANGI
KABUPATEN BANYUWANGI**

TESIS

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Magister Ilmu Administrasi (S2)
dan Mencapai Gelar Magister Sains

Oleh :

**Maysusi Indri Hapsari
NIM 130920101002**

**KONSENTRASI ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN PUBLIK
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2019**

PERSEMBAHAN

Tesis ini dipersembahkan untuk :

1. Bapak Soeparlan, AR. dan Ibu Titik Sugiyarti yang tidak pernah putus mendo'akan;
2. Kekasih dan Ayah anak-anakku, Ayah Musa Hadi yang selalu sabar dan terus mendukung Bunda;
3. Sumber semangat Bunda, kakak ganteng Baginda Muhammad Kanamaisha, *Princess* Malika Danadyaksa Kanamaisha dan jagoan keren Bagasdewa Adirajasa Kanamaisha. Do'a Bunda, semoga kalian selalu sehat, bahagia serta dianugerahi kemuliaan dunia dan akhirat;
4. Para Dosen Pembimbing yang luar biasa sabar dan baik hati, Bapak Dr. Djoko Poernomo, M.Si., dan Bapak Dr. Sasongko, M.Si. Semoga dibalas oleh Allah SWT dengan kesehatan, panjang umur dan keberkahan yang melimpah;
5. Mas Hari, Pak Jamal dan segenap Civitas Akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember yang banyak membantu sejak awal hingga akhir masa studi kami;
6. Para Narasumber yang baik hati, Pak Kadispendik Sulihtiyono, Pak Kabid Hamami, Ibu Hafi, para GPK, para guru reguler, Umam dan ibu serta semua yang telah memberi banyak ilmu;
7. Rekan-rekan seperjuangan Angkatan Tahun 2013. Terima kasih suntikan motivasi dari Anton, mas Andik, mas Fatah dan mas Mahfud yang telah sukses mendahului kami. Semoga mas Yoyok, mbak Ning, mbak Nur, Mufida, mbak Lina, mas Teddy, Prima, mas Nardi dan lainnya diberikan kelancaran untuk segera menyelesaikan tanggung jawab ini. Sesungguhnya, lulus pasca sarjana dalam 5 tahun adalah kesuksesan yang tertunda. Namun, lebih baik terlambat daripada tidak lulus sama sekali.

MOTO

“Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia maka wajib baginya memiliki ilmu, dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, maka wajib baginya memiliki ilmu, dan barang siapa menghendaki keduanya maka wajib baginya memiliki ilmu”

(H.R. Turmudzi)

“Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan dalam rangka untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Dan tidaklah berkumpul suatu kaum disalah satu dari rumah-rumah Allah, mereka membaca Kitabullah dan saling mengajarkannya diantara mereka, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan, diliputi dengan rahmat, dikelilingi oleh para malaikat, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka siapa saja yang ada disisi-Nya.”

(H.R Muslim dalam Shahih-nya)

*“That some achieve great success,
is proof to all that others can achieve it as well.”*

(Abraham Lincoln)

“Try not to become a man of success, but rather try to become a man of value.”

(Albert Einstein)

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Maysusi Indri Hapsari

NIM : 130920101002

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif di SDN 3 Karangrejo Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi” adalah benar-benar karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebut sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Banyuwangi, 21 Juli 2018

Yang menyatakan

Maysusi Indri Hapsari
NIM 13092010 201010

TESIS

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN INKLUSIF
DI SDN 3 KARANGREJO KECAMATAN BANYUWANGI
KABUPATEN BANYUWANGI**

Oleh :

Maysusi Indri Hapsari
NIM 130920101002

Pembimbing :

1. Dosen Pembimbing Utama : Dr. Djoko Poernomo, M.Si.
2. Dosen Pembimbing Anggota : Dr. Sasongko, M.Si.

PENGESAHAN

Tesis berjudul “Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif di SDN 3 Karangrejo Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi” telah diuji dan disahkan pada :

Hari, tanggal : Selasa, 31 Juli 2018

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji :

Ketua,

Rachmat Hidayat, S.Sos., M.Si., M.PA., Ph.D.
NIP. 19810322 200501 1 001

Anggota I,

Anggota II,

Dr. Hadi Prayitno, M.Kes.
NIP. 19610608 198802 1 001

Dr. Selfi Budi Helpiastuti, S.Sos., M.Si.
NIP. 19700322 199512 2 001

Anggota III,

Anggota IV,

Dr. Djoko Poernomo, M.Si.
NIP. 19600219 198702 1 001

Dr. Sasongko, M.Si
NIP. 19570407 198609 1 001

Mengesahkan,
Dekan,

Dr. Ardiyanto, M.Si.
NIP.19580810 198702 1 002

RINGKASAN

Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif di SDN 3 Karangrejo Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi; Maysusi Indri Hapsari, 130920101002; 2018; 173 halaman; Program Studi Magister Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Pendidikan inklusif di Kabupaten Banyuwangi, telah dilaksanakan melalui beberapa langkah, yaitu: menunjuk sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif, pemberdayaan Guru Pembimbing Khusus (GPK) di setiap sekolah, penunjukan Pusat Sumber, *Pilot Project* Sekolah Inklusif, pemberian insentif untuk GPK, pemberian bantuan operasional dan beasiswa untuk ABK serta menyiapkan sarana prasarana yang aksesibel dan ramah dengan ABK. Sekolah yang ditunjuk salah satunya adalah SDN 3 Karangrejo yang dijadikan salah satu sekolah model (*piloting*) penyelenggara pendidikan inklusif di Kabupaten Banyuwangi, yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi Nomor : 188/2563/429.101/2014 tentang Penetapan Sekolah Model (*Piloting*) Penyelenggara Pendidikan Inklusif Kabupaten Banyuwangi. Rumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimana implementasi kebijakan pendidikan inklusif di SDN 3 Karangrejo sebagai salah satu sekolah model (*pilot school*) penyelenggara pendidikan inklusif yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi? Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan implementasi kebijakan pendidikan inklusif di SDN 3 Karangrejo.

Metodologi penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian dilaksanakan di SD Negeri 3 Karangrejo Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi. SD Negeri 3 Karangrejo. Metode penentuan informan yang digunakan adalah metode *purposive*. Standar kredibilitas dalam penelitian ini dilakukan menggunakan standar kredibilitas dengan cara triangulasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif di SDN 3 Karangrejo menggunakan unsur-unsur dalam Prosedur Operasional Standar (POS) sebagai acuan dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif. SDN 3 Karangrejo dinilai layak oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi, dan memenuhi kriteria sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. SDN 3 Karangrejo merupakan sekolah dengan jumlah ABK terbanyak di Kabupaten Banyuwangi. Peserta didik berkebutuhan khusus pada tahun ajaran 2015/2016 di SDN 3 Karangrejo berjumlah 35 orang, yang terdiri dari 1 (satu) orang ABK Tuna Rungu dan Tuna Wicara, 2 (dua) orang ABK Tuna Laras, 5 (lima) orang ABK Autis dan Sindroma Asperger, 1 (satu) orang ABK Tuna Ganda dan 26 (dua puluh enam) orang ABK Lambat Belajar (*Slow Learner*). (2). Faktor - faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif di SDN 3 Karangrejo bahwa komunikasi sudah terjalin dengan sangat baik. **Komunikasi** antara Dinas Pendidikan dengan segenap jajaran dari SDN 3 Karangrejo juga sangat baik. **Sumberdaya**, di SDN 3 Karangrejo, terdapat kekurangan tenaga pengajar, khususnya Guru Pembimbing Khusus (GPK) bagi para ABK. Dengan 3 (tiga) orang GPK dan ABK sebanyak 35

orang di Tahun Ajaran 2016/2017, maka berarti setiap GPK harus menangani lebih dari 11 (sebelas) orang. **Disposisi atau Sikap Pelaksana**, di SDN 3 Karangrejo, berupa aktif mencari anak-anak dalam masyarakat yang tidak bersekolah, menempatkan anak-anak usia sekolah yang tidak sekolah dalam pendaftaran sekolah, mengidentifikasi hambatan belajar dan merespon keragaman para calon peserta didik yang memiliki latar belakang dan kemampuan beragam. SDN 3 Karangrejo terus berupaya menciptakan lingkungan inklusif, yang ramah terhadap pembelajaran sehingga harus dilakukan adaptasi atau penyesuaian lingkungan. **Struktur birokrasi**, di SDN 3 juga menggunakan POS sebagaimana yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional (2007). (3) **Kendala-kendala dalam Implementasi Pendidikan Inklusif** di SDN 3 Karangrejo diantaranya adalah : a. Pembiayaan Pendidikan, bahwa sarana dan prasarana di SDN 3 Karangrejo masih belum lengkap. b. Tenaga Guru Pembimbing Khusus, Tenaga Guru Pembimbing Khusus (GPK) di SDN 3 Karangrejo hanya berjumlah 3 orang, sementara jumlah Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) ada 35 orang. c. Sarana dan Prasarana pendidikan inklusif masih kurang. (4) **Upaya Mengatasi Kendala dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif** di SDN 3 Karangrejo diantaranya adalah : a. Menggunakan kemampuan manajerial kepala sekolah. b. Meskipun di SDN 3 Karangrejo hanya memiliki 3 orang GPK, namun ketiga orang GPK tersebut selalu berbagi ilmu dan pengalaman kepada guru reguler lain agar juga memiliki pemahaman tentang pendidikan khusus. c. Mengundang partisipasi aktif para wali murid agar lebih peduli dalam proses belajar mengajar melalui sosialisasi saat rapat / pertemuan wali murid sehingga diharapkan mereka bisa turut memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di SDN 3 Karangrejo. d. Terkait sarana dan prasarana, para guru dan GPK berusaha untuk memanfaatkan potensi dan sumberdaya yang ada agar proses belajar mengajar bisa berjalan dengan baik dan lancar.

SUMMARY

The Implementation of Inclusive Education Policy at Karangrejo 3 Elementary School of Banyuwangi Subdistrict of Banyuwangi Regency; Maysusi Indri Hapsari, 130920101002; 2018; 173 pages; Master of Administrative Sciences Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, University of Jember.

Inclusive education in Banyuwangi Regency has been implemented through the number of steps, such as designating the school which held an inclusive education, empower the specific teacher in each school, the appointed of a central source , a pilot project of an inclusive school, the distribution of an incentive to the specific teacher, the provision of operational assistance and scholarships for the disabilities and prepares the accessible facilities and friendly infrastructures for disabilities. The school that appointed as one of these is Karangrejo 3 Elementary School. It become one of inclusive school models (piloting) in Banyuwangi Regency which set by a decree of the Head of Education Departement of Banyuwangi Regency number 188/2563/429.101/2014 about the school which become the model (piloting) of inclusive educational institution in Banyuwangi Regency. The formulation problems of this research is how is the implementation of the policy of inclusive education in Karangrejo 3 Elementary School as one of school model (pilot school) that appointed by the Education Departement of Banyuwangi? The goal is to explain the implementation of the policy of inclusive education in Banyuwangi Regency, especially in Karangrejo 3 Elementary School.

The research methodology that used is descriptive qualitative research. The research was conducted in SD Karangrejo 3, Banyuwangi District, Banyuwangi Regency. Karangrejo 3 Elementary School. The method of determining the informant that used is purposive sampling method. The credibility standard in this study was conducted using credibility standards by triangulation.

The result of the research indicates that (1) the implementation of the policy of inclusive education in Karangrejo 3 Elementary School use some elements in a Standard Operational Procedure as a reference in the implementation of the policy of inclusive education. Karangrejo 3 Elementary School assessed as eligible by the Education Departement of Banyuwangi, and fulfilled the criteria of inclusive school. Karangrejo 3 Elementary School has the highest number of disabilities students in Banyuwangi Regency. The disabilities students in the academic year of 2015/2016 were 35 students in total. It is consisting of 1 (one) person of disabilities with hearing defect and speech impaired, 2 (two) persons of the disabilities students with emotional uncontrolled, 5 (five) persons of autis and asperger syndrome , 1 (one) person with double handicap and 26 (twenty six) persons of slow learners. (2) The factors that affected the successful of the implementation of the policy of inclusive education in Karangrejo 3 Elementary School is the good communication from one to another. The communication between Departement of Education with the teachers

from Karangrejo 3 Elementary School is also running well. About Human Resources, in Karangrejo 3 Elementary School, there is still a shortage of teaching staff, especially the teachers for disabilities students. With 3 (three) teachers who handled more than 35 disabilities students in the academic year 2016 / 2017, so it means that every teachers have to cope more than 11 (eleven) students. Disposition or the attitude of the implementor, Karangrejo 3 Elementary School, actively find the children in the society who can't get their chance to study in the school, put the children in the school age who do not go to school in registration school, identify the obstacles of learning and respond to the diversity of the candidates students who have a diverse background and ability. Karangrejo 3 Elementary School keeps trying to create an inclusive environment, which friendly against the learning so they have to make the adaptation or environmental adjustment. Bureaucratic structure, in Karangrejo 3 Elementary School also use Standard Operational Procedure as published by the Ministry of National Education (2007). (3) The constraints for the implementation of an inclusive education in Karangrejo 3 Elementary School are: (a) in the funding of education, that the facilities and infrastructures in Karangrejo 3 Elementary School was incomplete . (b) the specific teachers. The amount of the specific teachers is lack. There are only 3 teachers, while the number of disabilities are 35 students. (c) the inclusive education facilities and infrastructure is lack. (4) The efforts to solve the problems of the implementation policy of inclusive education in Karangrejo 3 Elementary School including: (a) using the managerial ability of the principal. (b) although Karangrejo 3 Elementary School only have 3 specific teachers, but the three teachers always share knowledge and experience to the other regular teachers so they have an understanding of special education. (C) always actively invite the participation of the student's parents through socialization / meeting so they can be more care to the learning process, and can also contribute to the inclusive education system in Karangrejo 3 Elementary School. (d) associated of facilities and infrastructures, teachers and specific teachers try to use all of potential and resources so that the teaching and learning process can run smoothly.

PRAKATA

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Tesis ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Tesis berjudul Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif di SDN 3 Karangrejo Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi ini disusun untuk melengkapi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Magister Sains pada program studi Magister Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Dalam penyusunan Tesis ini, banyak pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan dan dorongan semangat kepada penulis sehingga Tesis ini bisa terselesaikan. Tidak sedikit yang telah menanamkan jasa dan kebaikan budi kepada penulis, sehingga Tesis ini dapat selesai. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Dr. Ardiyanto, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Rahmat Hidayat, S.Sos., M.Si., M.PA., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, sekaligus sebagai Penguji Utama/Ketua Tim Penguji;
3. Dr. Djoko Poernomo, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Utama dan Dr.Sasongko, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Anggota;
4. Dr. Hadi Prayitno, M.Kes. dan Dr. Selfi Budi Helpiastuti, S.Sos. M.Si. selaku Penguji Anggota;
5. Seluruh Dosen Program Studi Magister Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
6. Seluruh Staf Program Studi Magister Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
7. Para narasumber dalam penelitian;
8. Semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan tugas ini.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih sangat jauh dari kesempurnaan karena segala keterbatasan, untuk itu penulis mengharapkan masukan dan saran yang membangun demi perbaikan Tesis ini. Semoga Tesis ini bermanfaat dalam membangun perspektif teoritis terkait pelaksanaan pendidikan inklusif yang lebih baik dan efektif.

Banyuwangi, 31 Juli 2018

Penulis



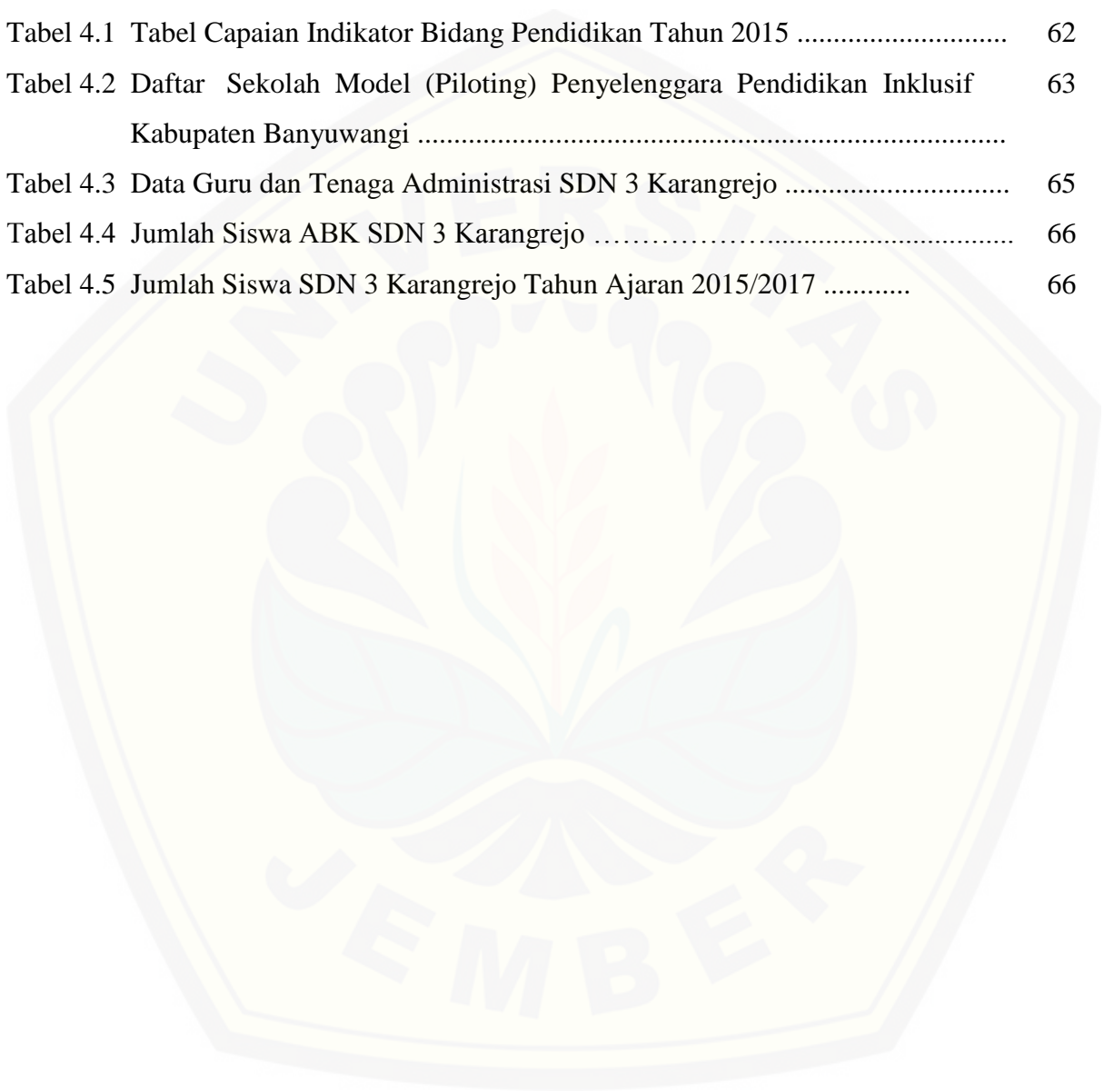
DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PEMBIMBINGAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
RINGKASAN	viii
SUMMARY	ix
PRAKATA	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR GRAFIK	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Landasan Teori	10
2.1.1 Kebijakan Publik	10
2.1.2 Implementasi Kebijakan Publik	16
2.1.3 Konsep Kebijakan Pendidikan Inklusif	26
2.1.4 Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)	31
2.1.5 Implementasi Pendidikan Inklusif	33
2.1.6 Trend Dunia Pendidikan Inklusif	44
2.2 Penelitian Terdahulu	45

BAB III. METODE PENELITIAN	51
3.1 Pendekatan Penelitian	51
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	53
3.3 Metode Penentuan Informan	54
3.4 Metode Pengumpulan Data	55
3.4.1 Dokumentasi.....	55
3.4.2 Rekaman Arsip.....	56
3.4.3 Wawancara	56
3.4.4 Observasi Langsung	57
3.4.5 Observasi Partisipan	58
3.4.6 Perangkat Fisik	58
3.5 Teknik Analisa Data	58
3.6 Teknik Keabsahan Data	59
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	59
4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian	59
4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Banyuwangi	59
4.1.2 Gambaran Umum SDN 3 Karangrejo	63
4.2 Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif di SDN 3 Karangrejo....	66
4.3 Kendala-kendala dalam Implementasi Pendidikan Inklusif	91
4.4 Upaya Mengatasi Kendala dalam Implementasi Pendidikan Inklusif...	92
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	94
5.1 Kesimpulan	94
5.2 Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN	99

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Jumlah Sekolah dan Siswa Pendidikan Khusus di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015	10
Tabel 4.1 Tabel Capaian Indikator Bidang Pendidikan Tahun 2015	62
Tabel 4.2 Daftar Sekolah Model (Piloting) Penyelenggara Pendidikan Inklusif Kabupaten Banyuwangi	63
Tabel 4.3 Data Guru dan Tenaga Administrasi SDN 3 Karangrejo	65
Tabel 4.4 Jumlah Siswa ABK SDN 3 Karangrejo	66
Tabel 4.5 Jumlah Siswa SDN 3 Karangrejo Tahun Ajaran 2015/2017	66



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Pendekatan Masalah Implementasi	18
Gambar 2.2 Implementasi sebagai Sebuah Proses Administrasi dan Politik	25
Gambar 2.3 Alternatif Struktur Organisasi Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif untuk Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah	35
Gambar 2.4 Alternatif Struktur Organisasi Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif untuk Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah	35
Gambar 2.5 Alternatif Struktur Organisasi Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif untuk Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan	36
Gambar 2.6 Mekanisme Penetapan Sekolah Inklusif	42

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 4.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Banyuwangi Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2015	60
Grafik 4.2 Persentase Jumlah Penduduk Kabupaten Banyuwangi Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2015	61



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Data Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif Kabupaten Banyuwangi Tahun Pelajaran 2015/2016	100
Lampiran 2. Pedoman Wawancara Penelitian : Pedoman Wawancara untuk Informan Kepala SDN 3 Karangrejo	103
Lampiran 3. Pedoman Wawancara Penelitian : Pedoman Wawancara untuk Informan GPK SDN 3 Karangrejo	106
Lampiran 4. Pedoman Wawancara Penelitian : Pedoman Wawancara untuk Informan Anak Berkebutuhan Khusus SDN 3 Karangrejo	110
Lampiran 5. Pedoman Wawancara Penelitian : Pedoman Wawancara untuk Informan Orang Tua Anak Berkebutuhan Khusus SDN 3 Karangrejo.....	112
Lampiran 6. Pedoman Wawancara Penelitian : Pedoman Wawancara untuk Informan Ketua Pokja Inklusif	114
Lampiran 7. Pedoman Wawancara Penelitian : Pedoman Wawancara untuk Informan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi	119
Lampiran 8. Pedoman Wawancara Triangulasi	124
Lampiran 9. Transkrip Wawancara Penelitian dengan Informan Kepala SDN 3 Karangrejo	126
Lampiran 10. Transkrip Wawancara Penelitian dengan Informan GPK SDN 3 Karangrejo	139
Lampiran 11. Transkrip Wawancara Penelitian dengan Informan Anak Berkebutuhan Khusus SDN 3 Karangrejo	144
Lampiran 12. Transkrip Wawancara Penelitian dengan Informan Orang Tua Anak Berkebutuhan Khusus SDN 3 Karangrejo	146
Lampiran 13. Transkrip Wawancara Penelitian dengan Informan Ketua Pokja Inklusif	150
Lampiran 14. Transkrip Wawancara Penelitian dengan Informan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi	163

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) memang berbeda jika dibandingkan dengan anak normal pada umumnya. Baik dari segi fisik, mental, intelektual maupun sosialnya. Sebagai warga negara, ABK juga memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Pendidikan menjadi modal yang penting bagi ABK sebagai bekal hidup mandiri di masyarakat. Meskipun memiliki keterbatasan, para ABK tidak membutuhkan belas kasihan namun mereka membutuhkan dukungan dan pengertian dari semua pihak agar eksistensi mereka diakui dan diberi tempat yang layak di tengah masyarakat.

Sayangnya, keberadaan mereka tidak selalu disambut baik oleh orang tua, keluarga serta masyarakat. Pada beberapa kasus bahkan ditemui adanya orang tua yang justru menyembunyikan anaknya yang memiliki kebutuhan khusus. Suharto (2009:124) menyatakan bahwa sampai saat ini keberadaan ABK di lingkungan masyarakat masih dinilai tidak layak masuk dalam ruang publik. Sebagian besar masyarakat dan orang tua juga masih kurang berperan aktif dalam perkembangan pendidikan anaknya yang berlabel ABK. Akibatnya, hal ini berdampak terhadap rendahnya mutu pendidikan bagi ABK.

Mudjito *et.al* (2013:15) menyebutkan bahwa berdasarkan data Kementerian Sosial RI tahun 2008, jumlah total Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di Indonesia adalah sebanyak 1.544.184 anak, dan pada Sensus Nasional tahun 2010, angka anak-anak berkebutuhan khusus yang berusia 5-18 tahun adalah sebesar 21,42% dari jumlah ABK dengan berbagai kekurangan/kecacatan, yaitu sebanyak 330.764 anak. Mudjito *et.al* (2013:15) selanjutnya menambahkan bahwa dengan jumlah ABK yang sangat besar tersebut, pemerintah terus berupaya untuk memfasilitasi layanan pendidikan yang sebaik-baiknya bagi para ABK tersebut dalam rangka mewujudkan pemerataan pendidikan. Angka ABK yang sudah mendapatkan layanan pendidikan di sekolah khusus (Sekolah Luar Biasa) dan/atau di sekolah inklusif, dari jenjang Taman Kanak-kanak sampai Sekolah Menengah Pertama baru 85.737 anak (25,92%). Artinya, masih ada sebanyak 245.027 anak (74,08%) ABK yang belum mendapatkan layanan pendidikan di seluruh Indonesia dengan berbagai jenis kelainan.

Berdasarkan data pada tahun 2012 melalui situs resmi Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus diketahui bahwa populasi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di Indonesia diperkirakan mencapai 350 ribu orang. Namun, jumlah anak yang sudah masuk di jenjang pendidikan baru sekitar 85 ribu orang. Mereka ditampung di sekitar 1.600 sekolah

luar biasa se-Indonesia. Artinya, pemerintah baru mengakomodir sekitar 24 persen anak berkebutuhan khusus. Kenyataan ini semakin menegaskan bahwa akses ABK dalam dunia pendidikan memang masih terbatas. (Sumber : <http://health.detik.com/read/2013/07/17/184234/2306161/1301/jumlah-anak-berkebutuhan-khusus-di-indonesia-diperkirakan-42-juta> (diakses 10 Juni 2015, 10.59)).

Hal ini tentunya sangat memprihatinkan kita semua, karena kita sangat menyadari arti penting pendidikan bagi setiap orang. Tidak hanya bagi mereka dengan kondisi normal, pendidikan menjadi lebih penting lagi bagi mereka yang terlahir dengan kondisi berkebutuhan khusus. Gargiulo dalam Mudjito *et.al* (2013:15-16), menegaskan bahwa pendidikan inklusif sangat berperan dalam memberikan intervensi bagi anak berkebutuhan khusus sedini mungkin agar :

- a. Meminimalkan keterbatasan kondisi pertumbuhan dan perkembangan anak dan untuk memaksimalkan kesempatan anak terlibat dalam aktivitas yang normal;
- b. Jika memungkinkan untuk mencegah terjadinya kondisi yang lebih parah dalam ketidak teraturan perkembangan sehingga menjadi anak yang tidak berkemampuan;
- c. Mencegah berkembangnya keterbatasan kemampuan lainnya sebagai hasil yang diakibatkan oleh ketidakmampuan utamanya.

Sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mengimplementasikan pendidikan inklusif bagi penyandang cacat, Mudjito *et.al* (2013: 16) menerangkan bahwa pada tahun 2002 pemerintah sudah resmi mulai melakukan proyek ujicoba di berbagai provinsi yang memiliki pusat sumber dan sejak saat itu lebih dari 1500 siswa berkelainan telah bersekolah di sekolah reguler. Pada tahun 2005 jumlah ini meningkat menjadi 6000 siswa atau 5,11% dari seluruh jumlah anak berkebutuhan khusus. Angka ini terus bertambah hingga 7,5% atau 15.181 siswa pada tahun 2007, yang tersebar pada 796 sekolah inklusif yang terdiri dari 17 TK, 648 SD, 75 SLTP dan 56 SLTA.

Guna terus mengembangkan pendidikan inklusif pemerintah juga telah mengambil berbagai strategi, baik melalui diseminasi ideologi pendidikan inklusif, mengubah peranan Sekolah Luar Biasa (SLB) yang ada agar menjadi pusat sumber, penataran/pelatihan bagi guru-guru SLB maupun guru-guru sekolah reguler, reorientasi pendidikan guru LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Keguruan), desentralisasi dalam implementasi pendidikan inklusif, pembentukan kelompok kerja pendidikan inklusif, sampai pada pembukaan program magister dalam bidang inklusif dan pendidikan kebutuhan khusus.

Data terakhir Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur tahun 2011 menunjukkan bahwa jumlah ABK di Jawa Timur sebesar 47.286 anak yang tersebar di 38 Kabupaten dan Kota,

atau sekitar 49% dari total penyandang difabilitas di Jawa Timur pada tahun yang sama sebesar 95.560 jiwa (Sumber : www.kominfo.jatimprov.go.id (diakses pada : 9 September 2015, 09.20)). Berdasarkan rekapitulasi data Dinas Pendidikan Jawa Timur, jumlah sekolah inklusif yang ada di Jawa Timur hingga Desember tahun 2013 sebanyak 450 lembaga yang tersebar di 25 kabupaten/kota (Sulistiyadi, 2014 : 3).

Jumlah ABK yang berhak mendapatkan pendidikan berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2014, sebanyak 1528 ABK. Sementara, pada tahun yang sama, data dari Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi menunjukkan bahwa jumlah sekolah pendidikan khusus TKLB (Taman Kanak-kanak Luar Biasa), SDLB (Sekolah Dasar Luar Biasa), SMPLB (Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa), SMALB (Sekolah Menengah Atas Luar Biasa) sebanyak 48 lembaga, dan mereka telah mampu memberikan pelayanan pendidikan kepada 1186 orang ABK, masing-masing dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.1 Jumlah Sekolah dan Siswa Pendidikan Khusus di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015

Tingkat Pendidikan	Jumlah Sekolah (buah)	Jumlah Siswa (orang)
TKLB	9	80
SDLB	24	840
SMPLB	11	167
SMALB	4	99
Jumlah	48	1186

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi (2016)

Ini berarti masih ada 342 anak, atau bisa saja lebih, di luar sana yang masih membutuhkan media untuk belajar dan mengembangkan diri mereka. Oleh karena itu sejak Tahun Pelajaran 2014/2015 Dinas Pendidikan bersama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi telah menetapkan 93 sekolah yang terdiri dari : 2 PAUD/TK, 47 SD/MI, 26 SMP/MTs dan 18 SMA/MA/SMK yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Banyuwangi sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Untuk tahun pelajaran 2015/2016 semua sekolah reguler di Kabupaten Banyuwangi juga telah diwajibkan melaksanakan pendidikan inklusif, dengan *quota* per rombongan belajar minimal 1 anak dan maksimal 5 anak, dengan tidak melebihi 2 jenis ketunaan.

Hal ini sekaligus menjadi solusi kendala jarak yang biasa dikeluhkan oleh para orang tua ABK di daerah jauh dari kota kabupaten atau kecamatan. Lokasi sekolah pendidikan khusus yang kebanyakan berada di kota kabupaten serta beberapa kota kecamatan, sangat

menyulitkan mereka ketika mereka ingin mengakses pendidikan bagi putra/putrinya yang berkebutuhan khusus. Jarak yang jauh tentunya juga membutuhkan biaya yang besar serta pengorbanan yang lebih banyak. Hal inilah yang akhirnya sering mengakibatkan banyak ABK yang kemudian tidak bisa memperoleh haknya dengan semestinya. Kehadiran sekolah inklusif menjadi solusi yang paling tepat sehingga ABK tidak perlu jauh-jauh untuk ke sekolah pendidikan khusus. Hal ini juga sangat efektif untuk menaikkan APM (Angka Partisipasi Murni). Dengan adanya kebijakan pendidikan inklusif mereka sudah bisa bersekolah di sekolah inklusif yang telah ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi dan Kantor Kementerian Agama, mulai dari tingkat PAUD, SD/MI, SMP/MTs, hingga SMA/SMK/MA. Pendidikan inklusif merupakan antitesis dari pendidikan luar biasa yang segregatif dan eksklusif, serta membawa angin segar dalam dunia pendidikan. Peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) pendidikan bagi ABK menunjukkan bahwa konsep pendidikan inklusif membuka lebar peluang ABK untuk menikmati bangku sekolah.

Kabupaten Banyuwangi sangat mendukung pelaksanaan pendidikan inklusif sebagai upaya pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan. Untuk meneguhkan komitmennya, selanjutnya Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengeluarkan kebijakan mengenai pendidikan inklusif yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 68 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Kabupaten Banyuwangi dan Surat Keputusan Bupati Nomor 188.261/KEP/429.011/2014 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pendidikan Inklusif Kabupaten Banyuwangi. Hal ini selaras dengan amanah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 70 Tahun 2009 dan Peraturan Gubernur Nomor 06 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif. Tujuan kebijakan ini adalah untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, sosial dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Selain itu, kebijakan ini juga menjadi upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik yang berkebutuhan khusus.

Kabupaten Banyuwangi juga telah mendeklarasikan diri sebagai Kabupaten Inklusif pada tanggal 27 Agustus 2014, yang ditandai dengan penyerahan Piagam Inklusif dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Deklarasi ini bukan sekedar gambaran kepedulian dan komitmen Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terhadap nasib anak-anak disabilitas, tetapi juga sekaligus menjadi upaya untuk memenuhi apa yang menjadi hak semua anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak secara demokratis.

Untuk mendukung pendidikan inklusif di Kabupaten Banyuwangi, Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi telah melakukan beberapa langkah, yaitu : menunjuk sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif, pemberdayaan Guru Pembimbing Khusus (GPK) di setiap sekolah, penunjukan Pusat Sumber, *Pilot Project* Sekolah Inklusif, pemberian insentif untuk GPK, pemberian bantuan operasional dan beasiswa untuk ABK serta menyiapkan sarana prasarana yang aksesibel dan ramah dengan ABK.

SDN 3 Karangrejo dipilih menjadi obyek penelitian ini berdasarkan beberapa pertimbangan, yaitu :

1. SDN 3 Karangrejo merupakan salah satu sekolah model (piloting) penyelenggara pendidikan inklusif di Kabupaten Banyuwangi, yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi Nomor : 188/2563/429.101/2014 tentang Penetapan Sekolah Model (Piloting) Penyelenggara Pendidikan Inklusif Kabupaten Banyuwangi.
2. SDN 3 Karangrejo merupakan salah satu sekolah perintis pendidikan inklusif di Banyuwangi karena mereka telah membuka diri untuk menerima siswa berkebutuhan khusus sejak tahun 2008, jauh sebelum adanya SK penunjukan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi.
3. SDN 3 Karangrejo merupakan sekolah dengan jumlah ABK terbanyak di Kabupaten Banyuwangi. Untuk Tahun Pelajaran 2015/2016 jumlah ABK di SDN 3 Karangrejo sebanyak 35 orang, yang terdiri dari 1 orang tunarungu dan tuna wicara, 2 orang tunalaras, 5 orang autis dan sindroma Asperger, 1 orang tunaganda dan 26 orang kesulitan lambat belajar. Data Anak Berkebutuhan Khusus di sekolah-sekolah penyelenggara pendidikan inklusif di Kabupaten Banyuwangi pada Tahun Pelajaran 2015/2016 disajikan dalam Lampiran 1.
4. Kepala SDN 3 Karangrejo beserta segenap jajarannya, terbukti memiliki komitmen yang kuat untuk tetap memberikan layanan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus meskipun masih banyak sekali keterbatasan dan kekurangan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. Di awal perjalanan, para tenaga pendidik belum memiliki pemahaman yang kuat tentang bagaimana cara penanganan anak-anak yang berkebutuhan khusus. Namun, dengan keteguhan hati dan kebulatan niat yang tulus untuk menebarkan ilmu yang bermanfaat, mereka konsisten setiap tahunnya, selalu menerima siswa yang merupakan anak berkebutuhan khusus.

Penelitian tentang implementasi kebijakan pendidikan inklusif ini dirasa penting karena jika pelaksanaannya tidak dipedulikan maka akan mengakibatkan banyak anak berkebutuhan khusus yang terabaikan haknya untuk bisa bersekolah. Hal ini akan merenggut hak azasi mereka serta membuat mereka tidak bisa berkembang dan mengaktualisasikan diri. Semakin banyak pihak yang peduli dengan keberadaan anak-anak ini maka akan membuka semakin luas peluang mereka untuk mendapatkan pendidikan yang layak, karena banyak juga anak-anak yang memiliki keterbatasan namun ternyata menyimpan potensi untuk berprestasi. Sebagai contoh adalah siswa SMPLB Banyuwangi yang bernama Wahyono berhasil menjadi Juara I MTQ Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 dan Dedi Miswar, siswa SDLB yang menjadi Juara I Lomba Cipta dan Baca Puisi Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2015.

Melalui penelitian ini, penulis akan mengidentifikasi lebih mendalam tentang implementasi kebijakan pendidikan inklusif di SDN 3 Karangrejo. Jika memang sudah berhasil maka bisa menjadi contoh bagi sekolah-sekolah lain. Namun jika belum berhasil, maka harus dicari akar masalahnya sehingga bisa diupayakan langkah penyelesaiannya. Temuan yang dijumpai dalam penelitian ini nantinya diharapkan akan menjadi masukan positif bagi seluruh pihak yang terkait, sehingga akan mengarah pada perbaikan implementasi kebijakan pendidikan inklusif, khususnya di SDN 3 Karangrejo dan Kabupaten Banyuwangi dalam skala yang lebih luas. Jika implementasi pendidikan inklusif ini baik maka masa depan anak-anak berkebutuhan khusus pun diharapkan akan menjadi lebih baik.

1.2 Perumusan Masalah

Pendidikan merupakan salah satu sektor publik yang menjadi perhatian pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah. Adanya pendidikan inklusif diharapkan dapat memecahkan persoalan dalam penanganan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Namun, meskipun perkembangan pendidikan inklusif di Indonesia cukup menggembirakan dan mendapat apresiasi serta antusiasme dari berbagai kalangan, terutama para praktisi pendidikan, ternyata sejauh ini dalam tataran implementasinya di lapangan masih dihadapkan pada berbagai permasalahan. Terkait dengan beragam fenomena tersebut maka rumusan masalah penelitian ini adalah : Bagaimana implementasi kebijakan pendidikan inklusif di SDN 3 Karangrejo sebagai salah satu sekolah model (*pilot school*) penyelenggara pendidikan inklusif yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan pelaksanaan penelitian ini adalah untuk menjelaskan implementasi kebijakan pendidikan inklusif di SDN 3 Karangrejo, Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian yang dilakukan diharapkan memberikan nilai positif yang dapat dimanfaatkan di bidang akademik, di bidang praktis maupun untuk pengembangan ilmu pengetahuan sebagai berikut :

1. Manfaat Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian teoritik implementasi kebijakan publik di bidang pendidikan inklusif dengan contoh di SDN 3 Karangrejo, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, sebagai salah satu *pilot school* yang telah ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi. Keluaran atau *output* penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang komprehensif tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif. Selain itu, penelitian ini nantinya juga dapat bermanfaat dan berguna bagi pengembangan pendidikan inklusif, baik pada tataran konseptual maupun pada tataran implementasi di lapangan.

2. Manfaat Praktis

Temuan-temuan yang dapat diungkapkan dalam penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan langkah-langkah untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan kebijakan pemerintah khususnya yang terkait dengan pendidikan inklusif. Rekomendasi temuan riset diharapkan dapat ditindaklanjuti guna memperbaiki implementasi kebijakan pendidikan inklusif di SDN 3 Karangrejo, dan kebijakan-kebijakan yang berkaitan erat dengan pendidikan inklusif, baik di level dinas maupun di level atasnya. Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi Pemerintah dalam menentukan kebijakan pengembangan pendidikan inklusif di masa yang akan datang. Keterlaksanaan pendidikan inklusif secara efektif dan efisien akan sangat bermanfaat terhadap percepatan penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun menuju wajib belajar dua belas tahun.

3. Manfaat Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Sudah banyak penelitian yang dilakukan di bidang implementasi kebijakan pendidikan inklusif. Sebagai media untuk pengembangan ilmu pengetahuan, melalui penelitian yang dijalankan ini diharapkan dapat ditemukan sesuatu yang baru ataupun penyempurnaan pengetahuan yang telah ada sebelumnya.



BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Kebijakan Publik

Kebijakan publik tidak terpisahkan dari kehidupan manusia dalam bentuk tataran mikro individual maupun konteks tataran makro dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Wahab, 2008:7). Titmuss dalam Suharto (2008:7) mendefinisikan kebijakan sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan yang diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu. Lebih lanjut Titmuss menjelaskan bahwa kebijakan senantiasa berorientasi kepada masalah (*problem-oriented*) dan berorientasi kepada tindakan (*action-oriented*) sehingga kebijakan juga bisa diartikan sebagai suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu.

Kebijakan publik merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, finansial dan manusia demi kepentingan publik, yakni rakyat banyak, penduduk, masyarakat atau warga negara. Ditinjau dari proses, kebijakan publik diartikan sebagai hasil dari adanya sinergi, kompromi atau bahkan kompetisi antara berbagai gagasan, teori, ideologi dan kepentingan-kepentingan yang mewakili sistem politik suatu negara. Oleh karena itu, kebijakan merupakan instrumen pemerintah untuk melakukan suatu tindakan dalam bidang tertentu seperti fasilitas umum, transportasi, pendidikan, kesehatan, perumahan, kesejahteraan dan lain-lain yang dianggap akan membawa dampak positif bagi kehidupan warganya (Wahab, 2008:8).

Menurut Anderson yang disitir Islamy (1997:19) kebijakan publik adalah kebijakan yang dikembangkan oleh badan atau pejabat pemerintah. Dalam implikasinya suatu kebijakan :

1. Mempunyai tujuan tertentu atau tindakan yang berorientasi kepada tujuan.
2. Merupakan tindakan-tindakan atau pola tindakan pejabat pemerintah.
3. Merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah.
4. Bersifat positif dalam arti merupakan beberapa bentuk tindakan mengenai suatu masalah tertentu atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu.
5. Setidak-tidaknya dalam arti praktis didasarkan atau selalu dilandaskan pada peraturan-peraturan perundang-undangan yang bersifat otoritatif.

Sementara Keban (2004:55) melihat kebijakan publik sebagai konsep filosofi, sebagai suatu produk, sebagai suatu proses, dan sebagai suatu kerangka kerja. Kebijakan sebagai suatu konsep filosofis merupakan serangkaian prinsip atau kondisi yang diinginkan. Sebagai suatu produk, kebijakan dipandang sebagai serangkaian kesimpulan atau rekomendasi. Sebagai suatu proses, kebijakan dipandang sebagai suatu cara dimana melalui cara tersebut suatu organisasi dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya yaitu program dan mekanisme dalam mencapai produknya, dan sebagai suatu kerangka kerja, kebijakan merupakan suatu proses tawar menawar dan negosiasi untuk merumuskan isu-isu dan metode implementasinya.

Kebijakan publik adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk tujuan mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan (Mustopadidjaja, 2002:33). Berdasarkan stratifikasinya, kebijakan publik dapat dilihat dari tiga tingkatan, yaitu kebijakan umum (strategi), kebijakan manajerial dan kebijakan teknis operasional. Selain itu, dari sudut manajemen, proses kerja dari kebijakan publik dapat dipandang sebagai serangkaian kegiatan yang meliputi : (a) pembuatan kebijakan, (b) pelaksanaan dan pengendalian, serta (c) evaluasi kebijakan (Mustopadidjaja, 2002:44).

Pengelompokan jenis-jenis kebijakan publik menurut Anderson (2003:5-7) adalah sebagai berikut:

a. *Substantive and Procedural Policies.*

Substantive Policy melihat suatu kebijakan dari substansi masalah yang dihadapi oleh pemerintah, misalnya: kebijakan pendidikan, kebijakan ekonomi, dan lain-lain.

Sedangkan *Procedural Policy* melihat suatu kebijakan dari pihak-pihak yang terlibat dalam perumusannya (*Policy Stakeholders*). Sebagai contoh : dalam pembuatan suatu kebijakan publik, meskipun ada Instansi/Organisasi Pemerintah yang secara fungsional berwenang membuatnya, misalnya Undang-Undang tentang Pendidikan, yang berwenang membuat adalah Departemen Pendidikan Nasional, tetapi dalam pelaksanaan pembuatannya, banyak instansi/organisasi lain yang terlibat, baik instansi/organisasi pemerintah maupun organisasi bukan pemerintah, yaitu antara lain DPR, Departemen Kehakiman, Departemen Tenaga Kerja, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), dan Presiden yang mengesahkan Undang-undang tersebut. Instansi-instansi/organisasi-organisasi yang terlibat tersebut disebut *policy stakeholders*.

b. *Distributive, Regulatory, Self-Regulatory, and Redistributive Policies.*

Distributive Policy adalah suatu kebijakan yang mengatur tentang pemberian pelayanan/keuntungan kepada individu-individu, kelompok-kelompok, atau perusahaan-perusahaan, contoh: kebijakan tentang "*Tax Holiday*".

Regulatory Policy merupakan suatu kebijakan yang mengatur tentang pembatasan/pelarangan terhadap perbuatan/tindakan. Contoh : kebijakan tentang larangan memiliki dan menggunakan senjata api.

Self-Regulatory Policy mirip dengan kebijakan peraturan kompetitif dalam hal keterlibatan dalam pembatasan atau kontrol beberapa materi atau kelompok. Namun bedanya, kebijakan ini biasanya lebih dikendalikan oleh kelompok yang diatur sebagai sarana untuk melindungi atau mempromosikan kepentingan anggotanya. Contohnya kebijakan yang terkait dengan beberapa kelompok profesi tertentu, seperti dokter, pengacara, psikolog, apoteker, sanitarian dan pekerja sosial (*social workers*).

Redistributive Policy merupakan suatu kebijakan yang mengatur tentang pemindahan alokasi kekayaan, kepemilikan, atau hak-hak. Contohnya : kebijakan tentang pembebasan tanah untuk kepentingan umum.

c. *Material and Symbolic Policy.*

Ini merupakan suatu kebijakan yang mengatur tentang pengalokasian/penyediaan sumber-sumber material yang nyata bagi penerimanya. Contoh: kebijakan pembuatan rumah sederhana.

d. *Public Goods and Private Goods Policies.*

Public Goods Policy adalah suatu kebijakan yang mengatur tentang penyediaan barang-barang/pelayanan-pelayanan oleh pemerintah, untuk kepentingan orang banyak. Contohnya kebijakan tentang perlindungan keamanan, penyediaan jalan umum.

Private Goods Policy merupakan suatu kebijakan yang mengatur tentang penyediaan barang-barang/pelayanan oleh pihak swasta, untuk kepentingan individu-individu (perorangan) di pasar bebas, dengan imbalan biaya tertentu. Contoh: kebijakan pengadaan barang-barang/pelayanan untuk keperluan perorangan, misalnya tempat hiburan, hotel, dan lain-lain.

Sebagai sebuah sistem, kebijakan publik merupakan suatu rangkaian dari beberapa komponen yang saling terkait, bukanlah satuan-satuan komponen yang berdiri sendiri. Sistem kebijakan, sebagaimana dikemukakan oleh Dunn (2000:109-111), mencakup hubungan timbal balik diantara tiga unsur, yaitu :kebijakan publik (*public policies*), pelaku kebijakan (*policy stakeholders*), dan lingkungan kebijakan (*policy environment*).

Komponen pertama, kebijakan publik (*public policies*) merupakan isi kebijakan itu sendiri (*policy content*) yang terdiri dari sejumlah daftar pilihan keputusan tentang urusan publik (termasuk keputusan untuk tidak melakukan apa-apa) yang dibuat oleh lembaga dan pejabat pemerintah. Isi sebuah kebijakan merespon berbagai masalah publik (*public issues*) yang mencakup berbagai bidang kehidupan mulai dari pertahanan, keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan dan sebagainya. Tingkat ketepatan keputusan sebuah kebijakan tergantung pada ketepatan dalam merumuskan masalah publik yang ingin dipecahkan.

Komponen kedua, stakeholder kebijakan (*policy stakeholder*), yaitu individu atau kelompok yang berkaitan langsung dengan sebuah kebijakan yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh keputusan atau kebijakan tersebut. Stakeholder kebijakan tersebut bisa terdiri dari sekelompok warga, organisasi buruh, pedagang kaki lima, komunitas wartawan, partai politik, lembaga pemerintahan, dan sebagainya. Stakeholder kebijakan memberikan respon yang berbeda-beda terhadap suatu kebijakan publik, tergantung pada lingkungan kebijakan dan karakteristik dampak yang diterima masing-masing.

Komponen ketiga, lingkungan kebijakan (*policy environment*), yaitu konteks khusus dimana sebuah kebijakan terjadi, yang berpengaruh dan dipengaruhi oleh stakeholder kebijakan dan kebijakan publik itu sendiri. Lingkungan kebijakan ini bisa bermacam-macam bentuknya, seperti tingkat keamanan, kemampuan daya beli masyarakat, tingkat pengangguran, tingkat demokratisasi pemerintahan dan sebagainya. Lingkungan kebijakan ini akan menentukan apakah sebuah kebijakan publik bisa dilaksanakan dengan dukungan atau penolakan dari para pelaksana atau sasaran kebijakan tersebut.

Selanjutnya Wahab (2005:6) menyebutkan empat ciri dari kebijakan publik sebagai berikut : Pertama, kebijakan publik adalah tindakan yang mengarah pada tujuan daripada perilaku atau tindakan yang serba kebetulan, artinya bahwa kebijakan publik adalah tindakan yang direncanakan. Kedua, kebijakan publik pada hakekatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkait dan berpola, yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan-keputusan yang berdiri sendiri. Misalnya saja kebijakan publik tidak hanya mencakup keputusan untuk membuat Undang-Undang di dalam bidang-bidang tertentu melainkan diikuti dengan keputusan-keputusan yang bersangkutan paut dengan implementasi dan atau pemaksaan pemberlakuannya. Ketiga, kebijakan publik bersangkutan paut dengan apa yang senyatanya dilakukan oleh Pemerintah di dalam bidang-bidang tertentu, misalnya di dalam mengatur pola hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di dalam kerangka Otonomi Daerah, industri dan perdagangan, mengendalikan

inflasi, dan lain sebagainya. Keempat, kebijakan publik mungkin berbentuk positif dan mungkin pula berbentuk negatif. Dalam bentuknya yang positif, kebijakan publik mungkin akan mencakup beberapa bentuk tindakan pemerintah yang dimaksudkan untuk memberikan pengaruh tertentu. Sementara di dalam bentuknya yang negatif, kebijakan publik meliputi keputusan-keputusan pejabat pemerintah untuk tidak bertindak atau tidak melakukan tindakan apapun dalam masalah-masalah dimana campur tangan pemerintah justru sebenarnya sangat diperlukan.

Berdasarkan berbagai pendapat tersebut diatas maka yang disebut kebijakan publik dalam penelitian ini adalah suatu keputusan baik berupa tindakan atau pernyataan yang diambil oleh pejabat publik untuk menyelesaikan dan memecahkan masalah publik. Pada umumnya siklus kebijakan terdiri dari beberapa fase, dan fase-fase tersebut adalah Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan (Putra,2003:24). Sementara menurut Dunn (2000:24-25) tahap-tahap kebijakan publik dijelaskan sebagai berikut :

1. Penyusunan agenda

Penyusunan agenda (*agenda setting*) adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Dalam proses ini memiliki ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik dipertarungkan. Jika sebuah isu berhasil mendapatkan status sebagai masalah publik, dan mendapatkan prioritas dalam agenda publik, dan mendapatkan alokasi sumber daya publik yang lebih daripada isu lain.

Dalam *agenda setting* juga sangat penting untuk menentukan suatu isu publik yang akan diangkat dalam suatu agenda pemerintah. Issue kebijakan (*policy issues*) sering disebut juga sebagai masalah kebijakan (*policy problem*). *Policy issues* biasanya muncul karena telah terjadi silang pendapat di antara para aktor mengenai arah tindakan yang telah atau akan ditempuh, atau pertentangan pandangan mengenai karakter permasalahan tersebut.

Dunn (2000:38-39) lebih lanjut menjelaskan bahwa isu kebijakan merupakan produk atau fungsi dari adanya perdebatan baik tentang rumusan, rincian, penjelasan maupun penilaian atas suatu masalah tertentu. Namun tidak semua isu kebijakan bisa masuk menjadi suatu agenda kebijakan. Beberapa kriteria isu yang bisa dijadikan agenda kebijakan publik diantaranya adalah :

- (1) Telah mencapai titik kritis tertentu dan jika diabaikan akan menjadi ancaman yang serius;

- (2) Telah mencapai tingkat partikularitas tertentu yang berdampak dramatis;
- (3) Menyangkut emosi tertentu dari sudut kepentingan orang banyak dan mendapat dukungan media massa;
- (4) Menjangkau dampak yang amat luas;
- (5) Mempermasalahkan kekuasaan dan keabsahan dalam masyarakat;
- (6) Menyangkut suatu persoalan yang fasionable (sulit dijelaskan, tetapi mudah dirasakan kehadirannya).

Penyusunan agenda kebijakan seyogyanya dilakukan berdasarkan tingkat urgensi dan esensi kebijakan, juga keterlibatan stakeholder. Sebuah kebijakan tidak boleh mengabaikan tingkat urgensi, esensi dan keterlibatan stakeholder.

2. Formulasi kebijakan (*Policy Formulating*)

Formulasi kebijakan merupakan tahap untuk memilih masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan, untuk kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tersebut didefinisikan secara jelas untuk kemudian dicari alternatif pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan langkah dan tahapan kebijakan yang ada. Dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif dipertimbangkan secara matang dan dari berbagai sudut untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.

3. Adopsi/Legitimasi kebijakan (*Policy Adoption*)

Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, maka warga Negara akan mengikuti arahan pemerintah sebagai pelaksana kedaulatan rakyat tersebut. Warga Negara harus percaya mendukung terhadap tindakan pemerintah yang sah. Dukungan terhadap pemerintah dapat dilihat dari adanya toleransi terhadap berbagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Legitimasi dapat dikelola melalui manipulasi simbol-simbol tertentu. Dalam proses ini orang-orang belajar untuk mendukung pemerintah.

4. Implementasi Kebijakan (*Policy Implementation*)

Pada tahap inilah alternatif pemecahan yang telah disepakati tersebut kemudian dilaksanakan. Pada tahap ini, suatu kebijakan seringkali menemukan berbagai kendala. Rumusan-rumusan yang telah ditetapkan secara terencana dapat saja berbeda di lapangan. Hal ini disebabkan berbagai faktor yang sering mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Kebijakan yang telah melewati tahap-tahap pemilihan masalah tidak serta merta berhasil dalam implementasi. Dalam rangka mengupayakan keberhasilan dalam

implementasi kebijakan, maka kendala-kendala yang dapat menjadi penghambat harus dapat diatasi sedini mungkin.

5. Penilaian / Evaluasi kebijakan (*Policy Evaluation*)

Secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan dapat dilakukan bersamaan dengan tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi maupun tahap dampak kebijakan.

2.1.2 Implementasi Kebijakan Publik

Islamy (2003:102) berpendapat bahwa implementasi kebijakan merupakan usaha mewujudkan secara aktual alternatif yang telah dipilih untuk memecahkan masalah. Sejalan dengan pendapat ini dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn dalam Wahab (2005:21), bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu, pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Sementara Dunn (2000:132) berpendapat bahwa pengertian implementasi kebijakan (*policy implementation*) adalah pelaksanaan pengendalian aksi-aksi kebijakan di dalam kurun waktu tertentu. Menurut Mazmanian dan Sabatier (dalam Wahab 2008:23) implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yaitu kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disyahnannya pedoman-pedoman kebijakan Negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian. Sehingga implementasi kebijakan menyangkut (minimal) tiga hal, yaitu: 1. Adanya tujuan atau sasaran kebijakan; 2. Adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan; dan 3. Adanya hasil kegiatan. Dengan demikian implementasi kebijakan publik adalah pelaksanaan kegiatan kebijakan yang dilakukan oleh pembuat dan pelaksana kebijakan dengan tujuan mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan kebijakan itu dibuat.

Semua kebijakan, apapun bentuk dan jenisnya, dimaksudkan untuk mempengaruhi dan mengontrol perbuatan manusia sesuai dengan aturan-aturan dan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau negara. Suatu kebijakan akan menjadi efektif bila

dilaksanakan dan mempunyai dampak positif bagi anggota-anggota masyarakat. Dengan kata lain, tindakan atau perbuatan manusia yang menjadi anggota masyarakat itu bersesuaian dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah atau negara. Dengan demikian kalau mereka tidak bertindak/berbuat sesuai dengan keinginan pemerintah/negara, maka kebijakan menjadi tidak efektif (Islamy, 2003:107).

Selanjutnya Islamy (2003:107) kembali menambahkan bahwa tugas dan kewajiban pejabat dan badan-badan pemerintah bukan hanya dalam perumusan kebijakan, tetapi juga dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Kedua-duanya tidak ada satupun yang lebih penting dari yang lain. Dalam kenyataannya, banyak pejabat dan badan-badan pemerintah lebih dominan peranannya dalam perumusan kebijakan, dan kurang dalam implementasi kebijakan tersebut. Ini tentunya akan berakibat kurang efektifnya pelaksanaan kebijakan.

Di sisi lain, Wahab (2005:27) menegaskan bahwa implementasi kebijakan sebagai sebuah proses interaksi antara penentuan tujuan dan tindakan untuk mencapai tujuan tersebut. Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu aktivitas dalam proses kebijakan publik yang menentukan apakah sebuah kebijakan itu bersentuhan dengan kepentingan publik serta dapat diterima oleh publik. Dalam hal ini, dapat ditekankan bahwa bisa saja dalam tahapan perencanaan dan formulasi kebijakan dilakukan dengan sebaik-baiknya, tetapi jika pada tahapan implementasinya tidak diperhatikan optimalisasinya, maka tentu tidak jelas apa yang diharapkan dari sebuah produk kebijakan. Pada proses implementasi ini dapat dijadikan sebagai salah satu tolok ukur berhasil atau tidaknya suatu kebijakan diterapkan. Wahab (2005:28) menambahkan bahwa implementasi kebijakan dapat dilihat dari empat aspek, yaitu *who is involved in policy implementation, the nature of administrative process, compliances with policy and effect of implementation on policy content and impact* (siapa yang mengimplementasikan kebijakan, sifat dasar proses administrasi, kepatuhan terhadap kebijakan dan pengaruh implementasi terhadap isi kebijakan dan dampaknya).

Implementasi kebijakan menurut Agustino (2008:21) merupakan aspek terpenting dari keseluruhan proses kebijakan. Implementasi kebijakan merupakan wujud nyata dari suatu kebijakan, karena pada tahap ini suatu kebijakan tidak hanya terbatas pada perwujudan secara riil dari kebijakan, tapi juga mempunyai kaitan dengan konsekuensi atau dampak yang akan mengarah pada pelaksanaan kebijakan tersebut. Dengan demikian pembuatan kebijakan tidak hanya ingin melihat kebijakan yang telah dilaksanakan oleh masyarakat, namun juga ingin melihat seberapa jauh kebijakan tersebut dapat memberikan konsekuensi mulai dari hal yang positif maupun negatif kepada masyarakat. Karena implementasi merupakan perwujudan nyata dari (isi/tujuan) kebijakan publik, maka aktifitas-aktifitas implementasi

haruslah dilakukan secara cermat. Bahwa memang ada kebijakan yang bersifat *self executed*, yakni yang dapat langsung dilaksanakan, tidaklah mengurangi makna penting dari kecermatan dalam menyusun proses implementasi, sebab dari hasil implementasi tersebut kinerja pemerintah dapat dinilai. Selain itu sebagai bagian dari proses kebijakan, maka dari hasil implementasilah kebijakan memperoleh umpan balik, apakah perlu kebijakan direvisi atau tidak.

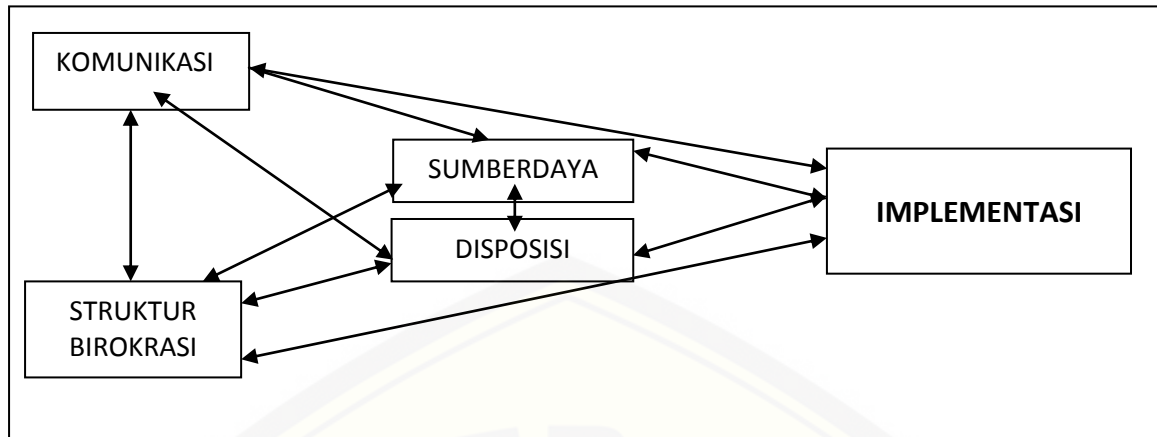
Mazmanian dan Sabatier (1983:22) selanjutnya menyebutkan beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam implementasi, yakni: 1. Mengidentifikasi masalah yang harus diintervensi; 2. Menegaskan tujuan yang hendak dicapai; dan 3. Merancang struktur proses implementasi. Selanjutnya untuk menyusun struktur implementasi, ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu :

- (1) Pembentukan unit organisasi atau staf pelaksana;
- (2) Penjabaran tujuan dalam berbagai aturan pelaksana (*Standard Operating Procedures/SOP*);
- (3) Mengkoordinasikan berbagai sumberdaya dan pengeluaran pada kelompok sasaran serta pembagian tugas diantara badan pelaksana;
- (4) Pengalokasian sumberdaya untuk mencapai tujuan.

Implementasi menurut Edwards III (1980 : 1), diartikan sebagai tahapan dalam proses kebijaksanaan yang berada diantara tahapan penyusunan kebijaksanaan dan hasil atau konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan oleh kebijaksanaan itu (*output, outcome*). Yang termasuk aktivitas implementasi menurutnya adalah perencanaan, pendanaan, pengorganisasian, pengangkatan dan pemecatan karyawan, negosiasi dan lain-lain.

Dalam model yang dikembangkannya, Edwards III (1980: 17-21) mengemukakan ada 4 (empat) faktor kritis yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi. Pendekatan yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan :”Prakondisi apa yang harus ada agar implementasi berhasil?” dan “Apa yang menjadi kendala pokok bagi suksesnya suatu implementasi?”. Empat variabel tersebut adalah : 1. Komunikasi; 2. Sumberdaya; 3. Disposisi atau Sikap Pelaksana; dan 4. Struktur Birokrasi, yang keseluruhannya saling berhubungan serta saling mempengaruhi satu sama lain dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan implementasi. Dalam gambar geometris, pendekatan tersebut tampak pada Gambar 2.1 berikut :

Gambar 2.1 Pendekatan Masalah Implementasi



Sumber : Edwards III (1980:21)

Kesaling-terkaitan antara keempat variabel tersebut pada hasil implementasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Komunikasi

Ada tiga hal dalam komunikasi ini yang perlu mendapatkan perhatian :

(a) Transmisi

Sebuah kebijakan yang akan diimplementasikan harus disalurkan pada pejabat yang akan melaksanakannya. Seringkali masalah transmisi terjadi manakala pelaksana tidak menyetujui kebijakan (disposisi) tersebut dengan mendistorsikan perintah kebijakan atau bahkan menutup komunikasi yang diperlukan. Masalah transmisi juga terjadi manakala kebijakan yang akan diimplementasikan harus melalui struktur birokrasi yang berlapis atau karena tidak tersedianya saluran komunikasi yang memadai (sumberdaya).

(b) Kejelasan (*Clarity*)

Kejelasan tujuan dan cara yang akan digunakan dalam sebuah kebijakan merupakan hal yang mutlak agar dapat diimplementasikan sebagaimana yang telah diputuskan. Namun hal tersebut tidak selalu terjadi. Ada berbagai alasan yang menyebabkan sebuah kebijakan tidak dirumuskan secara jelas, diantaranya adalah: i). Kerumitan dalam pembuatan kebijakan yang terjadi antara eksekutif dan legislatif, sehingga mereka cenderung menyerahkan detil pelaksanaannya pada bawahan; ii) Adanya oposisi dari masyarakat atas kebijakan tersebut; iii). Kebutuhan mencapai konsensus antara tujuan yang saling bersaing saat merumuskan kebijakan tersebut; iv). Kebijakan baru yang para perumusya belum terlalu menguasai masalah

(tentang ini sering dikatakan sebagai upaya untuk menghindar dari tanggung jawab);

v). Biasanya terjadi pada kebijakan yang menyangkut aturan hukum.

(c) **Konsistensi**

Implementasi yang efektif selain membutuhkan komunikasi yang jelas, juga yang konsisten. Proses transmisi yang baik namun dengan perintah yang tidak konsisten akan menyebabkan kebingungan pelaksana. Banyak hal yang bisa menyebabkan arah kebijakan menjadi tidak konsisten, diantaranya karena : i). Kompleksitas kebijakan yang harus dilaksanakan; ii). Kesulitan yang biasa muncul saat memulai implementasi sebuah kebijakan baru; iii). Kebijakan memiliki beragam tujuan dan sasaran, atau kadang karena bertentangan dengan kebijakan yang lain; iv). Banyaknya pengaruh berbagai kelompok kepentingan atas isu yang dibawa oleh kebijakan tersebut.

2. **Sumberdaya**

Yang dimaksud dengan sumberdaya yang diperlukan dalam implementasi adalah :

a. *Staff*, yang jumlah dan *skills* (kemampuannya) sesuai dengan yang dibutuhkan.

b. Informasi.

Informasi berbeda dengan komunikasi. Yang diperlukan di sini adalah : i). Informasi yang terkait dengan bagaimana melaksanakan kebijakan tersebut (Juklak-Juknis) serta, ii). Data yang terkait dengan kebijakan yang akan dilaksanakan.

c. Kewenangan

Kewenangan yang dibutuhkan dan harus tersedia bagi implementor sangat bervariasi tergantung pada kebijakan apa yang harus dilaksanakan. Kewenangan tersebut dapat berwujud : membawa kasus ke meja hijau; menyediakan barang dan jasa; kewenangan untuk memperoleh dan menggunakan dana, staf, kewenangan untuk meminta kerjasama dengan badan pemerintah yang lain.

d. Fasilitas

Kendati implementor telah memiliki jumlah staf yang memadai, telah memahami apa yang diharapkan darinya dan apa yang harus dilaksanakan, juga telah memperoleh kewenangan yang diperlukan untuk mengimplementasikan kebijakan, namun tanpa fasilitas fisik yang memadai, implementasi juga tidak akan efektif. Fasilitas fisik ini beragam tergantung pada kebutuhan kebijakan : ruang kantor, komputer dan lain-lain.

3. Disposisi

Yang dimaksud dengan disposisi adalah sikap dan komitmen dari pelaksana terhadap kebijakan atau program yang harus mereka laksanakan karena setiap kebijakan membutuhkan pelaksana-pelaksana yang memiliki hasrat kuat dan komitmen yang tinggi agar mampu mencapai tujuan kebijakan yang diharapkan. Terdapat tiga unsur utama yang mempengaruhi kemampuan dan kemauan aparat pelaksana untuk melaksanakan kebijakan yaitu:

- a. Kognisi yaitu seberapa jauh pemahaman pelaksana terhadap kebijakan. Pemahaman terhadap tujuan kebijakan sangatlah penting bagi aparat pelaksana lebih-lebih apabila sistem nilai yang mempengaruhi sikapnya berbeda dengan sistem nilai pembuat kebijakan, maka implementasi kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif. Ketidakmampuan administratif dari pelaksana kebijakan yaitu ketidakmampuan dalam menanggapi kebutuhan-kebutuhan dan harapan-harapan yang disampaikan oleh masyarakat dapat menyebabkan pelaksanaan suatu program tidak efektif.
- b. Arah dan tanggapan pelaksana, hal ini meliputi bagaimana penerimaan, ketidakberpihakan maupun penolakan pelaksana dalam menyikapi kebijaksanaan.
- c. Intensitas respon atau tanggapan pelaksana.

Karakter dari pelaksana akan mempengaruhi tindakan-tindakan pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan karena pelaksana adalah individu yang tidak mungkin bebas dari kepercayaan, aspirasi dan kepentingan pribadi yang ingin mereka capai. Dalam mengimplementasikan suatu kebijakan terdapat suatu kemungkinan dari pelaksana untuk membelokkan apa yang sudah ditentukan demi kepentingan pribadinya, sehingga dengan sikap pelaksana tersebut dapat menjauhkan tujuan dari kebijakan sebenarnya.

4. Struktur birokrasi

Yang dimaksud dengan Struktur Birokrasi adalah mekanisme kerja yang dibentuk untuk mengelola pelaksanaan sebuah kebijakan. Perlu adanya *Standart Operating Procedure* (SOP) yang mengatur tata aliran pekerjaan diantara para pelaksana, terlebih jika pelaksanaan program melibatkan lebih dari satu institusi. Ia juga mengingatkan bahwa adakalanya fragmentasi diperlukan manakala implementasi kebijakan memerlukan banyak program dan melibatkan banyak institusi untuk mencapainya.

Sementara di sisi lain, Van Meter dan Van Horn (1975:12) mencoba memberikan kerangka teoritis untuk menganalisis proses implementasi, sehingga dapat mengenali simpul-simpul yang bisa menjadi penghambat keberhasilan implementasi. Menurut mereka, ada 6 (enam) variabel yang harus diperhatikan karena dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi. Variabel-variabel tersebut adalah :

- (1) Tujuan Kebijakan dan Standar yang jelas, yakni rincian mengenai sasaran yang ingin dicapai melalui kebijakan beserta standar untuk mengukur pencapaiannya.
- (2) Sumberdaya (dana atau berbagai insentif yang dapat memfasilitasi keefektifan implementasi)
- (3) Kualitas Hubungan Inter-Organisasional. Keberhasilan implementasi seringkali menuntut prosedur dan mekanisme kelembagaan yang memungkinkan struktur yang lebih tinggi mengontrol agar implementasi berjalan sesuai dengan tujuan dan standar yang telah ditetapkan.
- (4) Karakteristik Lembaga/organisasi pelaksana (termasuk di dalamnya: kompetensi dan ukuran agen pelaksana, tingkat kontrol hirarkis pada unit pelaksana terbawah pada saat implementasi, dukungan politik dari eksekutif dan legislatif, dan keterkaitan formal dan informal dengan lembaga pembuat kebijakan, dan sebagainya).
- (5) Lingkungan politik, sosial dan ekonomi (apakah sumberdaya ekonomi mencukupi; seberapa besar dan bagaimana kebijakan dapat mempengaruhi kondisi sosial ekonomi yang ada; bagaimana tanggapan publik tentang kebijakan tersebut; apakah elit mendukung implementasi; dan lain sebagainya). Disposisi/tanggapan atau sikap para pelaksana (termasuk di dalamnya : pengetahuan dan pemahaman akan isi dan tujuan kebijakan; sikap mereka atas kebijakan tersebut; serta intensitas sikap tersebut).
- (6) Sikap/kecenderungan (*disposition*) para pelaksana. Dalam implementasi kebijakan sikap atau disposisi implementor ini dibedakan menjadi tiga hal, yaitu :
 - (a) Respons implementor terhadap kebijakan yang terkait dengan kemampuan implementor untuk melaksanakan kebijakan publik;
 - (b) Kondisi, yakni pemahaman terhadap kebijakan yang telah ditetapkan; dan
 - (c) Intens disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki tersebut.

Grindle (1980:9), mengatakan bahwa dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan tergantung pada *content* (isi) dan *context*-nya, dan tingkat keberhasilannya tergantung pada kondisi 3 komponen variabel sumberdaya implementasi yang diperlukan. Ketiga komponen

ini menyebabkan program nasional menghasilkan variasi *outputs* dan *outcomes* yang berbeda di daerah. Ketiga komponen itu adalah:

1. *Contents of policy messages*
 - a. ketersediaan dana dan sumber lain untuk melaksanakan kebijakan;
 - b. adanya sanksi;
 - c. tingkat kesukaran masalah kebijakan.
2. Kredibilitas pesan kebijakan
 - a. kejelasan pesan kebijakan;
 - b. konsistensi kebijakan;
 - c. frekuensi pengulangan kebijakan;
 - d. penerimaan pesan
3. Bentuk kebijakan
 - a. *efficacy of the policy*;
 - b. partisipasi masyarakat;
 - c. tipe kebijakan.

Selain itu Grindle (1980:9-11) juga mengatakan bahwa implementasi program ditentukan oleh konten (isi) program/*policy* dan konteks implementasinya, sebagai berikut :

(1). Content of Policy (Isi Kebijakan)

Isi kebijakan atau program akan berpengaruh pada tingkat keberhasilan implementasi. Kebijakan kontroversial, kebijakan-kebijakan yang dipandang tidak populis, kebijakan menghendaki perubahan besar, biasanya akan mendapatkan perlawanan baik dari kelompok sasaran bahkan mungkin dari implementornya sendiri yang mungkin merasa kesulitan melaksanakan kebijakan tersebut atau merasa dirugikan. Isi kebijakan yang dapat mempengaruhi implementasi menurut Grindle adalah :

(a) Kepentingan yang dipengaruhi oleh adanya program.

Apabila kebijakan tersebut tidak menimbulkan kerugian di salah satu pihak (misalnya jenis kebijakan *Redistribution* menurut katagori Ripley dan Lowie), maka implementasinya akan lebih mudah karena tidak akan menimbulkan perlawanan bagi yang kepentingannya dirugikan.

(b) Jenis manfaat yang akan dihasilkan.

Kebijakan yang memberikan manfaat kolektif atau pada banyak orang akan lebih mudah diimplementasikan karena lebih mudah mendapatkan dukungan dari kelompok sasaran atau masyarakat.

(c) **Jangkauan perubahan yang diinginkan.**

Semakin luas dan besar perubahan yang diinginkan melalui kebijakan tersebut, biasanya akan semakin sulit pula dilaksanakan. Misalnya kebijakan anti Korupsi dan KKN yang telah berkali-kali dibuat oleh beberapa Presiden RI dengan berbagai badan pemeriksa, tetap menjadikan Indonesia sebagai negara dengan tingkat korupsi tertinggi di dunia karena kebijakan tersebut menuntut banyak perubahan perilaku yang tidak dilaksanakan dengan konsekuen. Kredibilitas pesan kebijakan tidak terpenuhi karena isi kebijakan yang mengatur tentang adanya sanksi tidak dijalankan dengan konsisten.

(d) **Kedudukan pengambil keputusan.**

Semakin tersebar kedudukan pengambil keputusan dalam kebijakan (baik secara geografis ataupun organisatoris), akan semakin sulit pula implementasinya. Kasus demikian banyak terjadi pada kebijakan-kebijakan yang implementasinya melibatkan banyak instansi.

(e) **Pelaksana program.**

Manakala pelaksana program memiliki kemampuan dan dukungan yang dibutuhkan oleh kebijakan, maka tingkat keberhasilannya juga akan tinggi.

(f) **Sumber daya yang disediakan.**

Tersedianya sumberdaya yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan kebijakan, dengan sendirinya akan mempermudah pelaksanaannya. Sumberdaya ini berupa tenaga kerja, keahlian, dana, sarana, dan lain-lain.

(2). Context of Implementation (Konteks Implementasi)

Konteks dimana dan oleh siapa kebijakan tersebut diimplementasikan juga akan berpengaruh pada tingkat keberhasilannya, karena sebarang baik dan mudahnya kebijakan dan sebarang dukungan kelompok sasaran, hasil implementasi tetap bergantung pada implementornya. Karakter dari pelaksana akan mempengaruhi tindakan-tindakan pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan karena pelaksana adalah individu yang tidak mungkin bebas dari kepercayaan, aspirasi dan kepentingan pribadi yang ingin mereka capai. Dalam mengimplementasikan suatu kebijakan terdapat suatu kemungkinan dari pelaksana untuk membelokkan apa yang sudah ditentukan demi kepentingan pribadinya, sehingga dapat menjauhkan tujuan dari kebijakan sebenarnya. Konteks implementasi yang berpengaruh pada keberhasilan implementasi menurut Grindle adalah sebagai berikut:

1. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat.

Strategi, sumber dan posisi kekuasaan implementor akan menentukan tingkat keberhasilan kebijakan yang diimplementasikannya. Apabila suatu kekuatan politik merasa berkepentingan atas suatu program, maka mereka akan menyusun strategi guna memenangkan persaingan yang terjadi dalam implementasi sehingga mereka dapat menikmati outputnya.

2. Karakteristik lembaga dan penguasa.

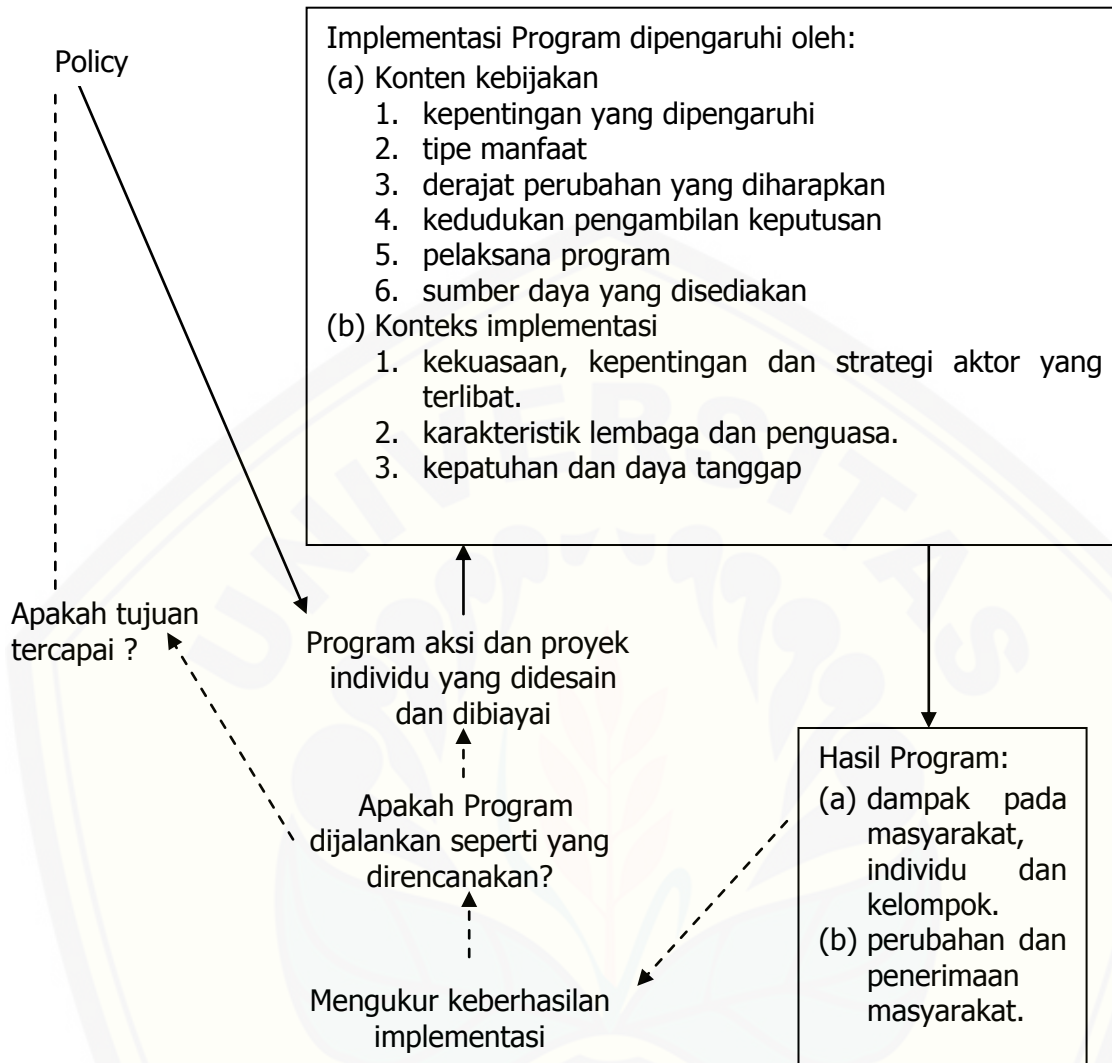
Implementasi suatu program dapat menimbulkan konflik bagi yang kepentingannya dipengaruhi. Strategi penyelesaian konflik mengenai "siapa mendapatkan apa" (misalnya penggusuran pasar tradisional menjadi supermarket) dapat menjadi petunjuk tak langsung mengenai ciri-ciri penguasa atau lembaga yang menjadi implementor program tersebut, baik mengenai keberpihakan penguasa/lembaga pelaksana maupun mengenai gaya kepemimpinannya (otoriter/demokratis dan lain sebagainya).

3. Kepatuhan serta daya tanggap pelaksana.

Implementor harus memiliki kepekaan terhadap kebutuhan-kebutuhan kelompok sasarannya agar program yang diimplementasikan berhasil dan mendapatkan dukungan dari kelompok sasaran.

Model yang dikembangkan oleh Grindle ini tampak lebih komprehensif dari model-model sebelumnya, karena bukan hanya memperhitungkan faktor-faktor yang ada di dalam kebijakan (*content of policy*) yang dapat mempengaruhi implementasi dan dinamika hubungan (konflik, dukungan, dan lain-lain) dengan penerima implementasi; tapi juga mempertimbangkan konteks lingkungan dimana dan oleh siapa kebijakan tersebut dilaksanakan; serta kondisi-kondisi sumberdaya implementasi yang diperlukan. Model yang dikembangkan oleh Grindle tersebut tampak pada gambar berikut ini :

Gambar 2.2 Implementasi sebagai Sebuah Proses Administrasi dan Politik



Sumber : Grindle (1980:11)

2.1.3 Konsep Kebijakan Pendidikan Inklusif

Hakikat dari pendidikan adalah memanusiakan manusia, mengembangkan potensi dasar setiap peserta didik agar berani dan mampu menghadapi problema yang dihadapi tanpa rasa tertekan, mampu, dan senang meningkatkan fitrahnya sebagai khalifah di muka bumi. Setiap orang tua mengharapkan anaknya terlahir dalam kondisi yang normal, secara fisik maupun mental. Namun dalam kenyataan tidak selalu demikian, karena kondisi fisik dan mental yang beragam sehingga mempengaruhi kemampuan mereka untuk mengikuti pendidikan secara normal (Harizal dalam Mudjito *et.al.*, 2013:14).

Inklusif diambil dari kata dalam bahasa Inggris yakni "to include" atau "inclusion" atau "inclusive" yang berarti mengajak masuk atau mengikutsertakan. Dalam pengertian

inklusif yang diajak masuk atau yang diikutsertakan adalah menghargai merangkul setiap individu dengan perbedaan latar belakang, jenis kelamin, etnik, usia, agama, bahasa, budaya, karakteristik, status, cara/pola hidup, kondisi fisik, kemampuan dan kondisi beda lainnya. Inklusif merupakan perubahan praktis dan sederhana yang memberi peluang kepada setiap individu dengan setiap perbedaannya untuk bisa berhasil dalam belajar. Perubahan ini tidak hanya menguntungkan individu yang sering tersisihkan seperti peserta didik berkebutuhan khusus, tetapi semua anak dan orangtuanya, semua guru dan administrator sekolah, dan setiap anggota masyarakat dan lingkungannya juga mendapatkan keuntungan dari setiap perubahan yang dilakukan (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2013:29).

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa, pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Pendidikan inklusif merupakan pendidikan yang terbuka dan ramah terhadap pembelajaran dengan mengedepankan tindakan menghargai dan merangkul perbedaan. Untuk itu pendidikan inklusif dipahami sebagai sebuah pendekatan yang berusaha mentransformasi sistem pendidikan dengan meniadakan hambatan yang dapat menghalangi setiap individu peserta didik untuk berpartisipasi penuh dalam pendidikan yang dilengkapi dengan layanan pendukung.

Setiap peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, sosial, atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa berhak mengikuti pendidikan secara inklusif pada satuan pendidikan tertentu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Kelainan yang dimaksud diantaranya menurut Permendiknas RI Nomor 70 Tahun 2009 adalah :

- (a) Tunanetra;
- (b) Tunarungu;
- (c) Tunawicara;
- (d) Tunagrahita;
- (e) Tunadaksa;
- (f) Tunalaras;
- (g) Berkesulitan belajar;
- (h) Lamban belajar;

- (i) Autis;
- (j) Memiliki gangguan motorik;
- (k) Menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang dan zat adiktif lainnya;
- (l) Memiliki kelainan lainnya;
- (m) Tunaganda.

Pendidikan inklusif tidaklah sekedar menempatkan siswa berkelainan secara fisik dalam kelas/sekolah reguler, dan bukan pula sekedar memasukkan anak berkebutuhan khusus sebanyak mungkin dalam lingkungan belajar siswa normal. Lebih dari itu, pendidikan inklusi juga berkaitan dengan cara guru dan teman sekelas yang normal menyambut semua siswa dalam kelas dan secara langsung mampu mengenali nilai-nilai keanekaragaman siswa. Artinya, keberadaan anak di sekolah inklusif akan membentuk nilai-nilai saling menghargai dan menyayangi yang pada akhirnya membentuk pribadi dan watak yang berakhlak mulia. Dan melalui pendidikan inklusif ini, secara tidak langsung akan membentuk pendidikan karakter bangsa (Mudjito *et.al*, 2013:18).

Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan inklusif, sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 2 Permendiknas RI Nomor 70 Tahun 2009, yaitu :

- (a) Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental dan sosial, atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya;
- (b) Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik.

Nilai-nilai yang harus diyakini dan dikembangkan dalam sekolah inklusif menurut Mudjito *et.al*, (2013:18), yaitu :

- (1) Setiap orang berhak memperoleh pendidikan;
- (2) Semua anak dapat belajar;
- (3) Setiap orang membutuhkan dukungan untuk belajar;
- (4) Setiap orang dapat mengalami kesulitan belajar pada bidang tertentu atau pada waktu tertentu;
- (5) Setiap orang harus menghargai perbedaan; dan
- (6) Sekolah, guru, keluarga dan masyarakat mempunyai tanggungjawab bersama memfasilitasi belajar, bukan hanya anak.

Hambatan utama anak berkelainan untuk maju, termasuk dalam mengakses pendidikan setinggi mungkin bukan pada kecacatannya, tetapi pada penerimaan sosial masyarakat. Selama ada alat dan mendapat penanganan khusus, maka mereka dapat mengatasi hambatan kelainan itu. Justru yang sulit dihadapi adalah hambatan sosial. Bahkan, hambatan dari dalam diri anak yang berkelainan itupun umumnya juga disebabkan pandangan sosial yang negatif terhadap dirinya. Untuk itulah, pendidikan yang terselenggara hendaknya memberikan jaminan bahwa setiap anak akan mendapatkan pelayanan untuk mengembangkan potensinya secara individual (Permendiknas RI Nomor 70 Tahun 2009).

Selanjutnya Mudjito *et.al*, (2013:65-78) juga menjelaskan tentang bagaimana konsepsi dan ruang lingkup kegiatan pendidikan yang harus tersedia untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus dan layanan khusus.

(a) Pengembangan konsep dan akademik sasaran pembelajaran dalam pendidikan inklusif.

Beberapa konsep akademik minimum dapat dijadikan sebagai dasar, mulai dari keterampilan tubuh atau bahasa tubuh, *body image*, sanggup menentukan arah, *directionality* dan *laterality*. Sebelum menguasai hal yang lebih luas, maka awal pendidikan harus mengajak anak didik untuk mampu mendengar (*listening*) dan berketerampilan belajar. Ketertarikan anak didik akan membuat mereka mulai fokus pada apa yang disampaikan oleh guru dan teman di dalam kelas, dan akhirnya tertarik untuk mengikutinya. Sangat penting untuk membuat anak merasa menikmati dan senang serta *enjoy* dalam proses belajar mengajar.

(b) Kemampuan akademik

Tujuan untuk mendorong kemampuan akademik adalah untuk meningkatkan dan mengembangkan logika berfikir anak-anak. Sehingga pada usianya mereka akan dengan mudah menentukan sikap dan mengambil keputusan dari serangkaian alternatif yang mereka hadapi. Dalam perjalanan waktu, menguasai konsep sains dasar yang bersumber dari matematika dan ilmu alam akan mendorong anak-anak untuk menggunakan logika berfikir lebih sistematis.

(c) Emosi sosial

Tujuan emosi sosial diberikan adalah untuk menjadikan anak-anak eksis dalam kelompok masyarakat dan tidak merasa tertinggal, rendah diri dari kawannya yang lain. Membangun kepercayaan diri adalah bagian yang terpenting dalam tahap ini. Suatu saat Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) tidak akan hidup sendiri, namun akan berinteraksi dengan sesamanya. Oleh karena itu, kehidupan sosial akan menentukan dan mempermudah ABK untuk eksis setelah dia menjadi dewasa. Beberapa tahapan yang

dapat dilakukan adalah sebagai berikut : sosialisasi diri, pendidikan sikap *affective education* (termasuk di dalamnya pembentukan sikap mandiri, tanggap dengan keperluan dan penampilan, kedisiplinan, serta memiliki kepekaan terhadap lingkungan sekitar), implikasi psikologi, melakukan rekreasi dan memberikan pendidikan seks sesuai dengan proses pembelajaran dan norma yang berlaku pada daerah setempat, termasuk bagaimana mengetahui proses pendewasaan seseorang, norma keluarga dan sebagainya.

(d) *Sensory motor needs*

ABK akan dapat mandiri melalui keterampilan yang mereka kuasai. Sebagai contoh adalah Stevie Wonder yang tetap mampu berkarya dan berprestasi sebagai seorang musisi hebat dunia meskipun tunanetra. Dalam mengembangkan sensor motorik, maka dikenal dengan istilah *Gross and fine motor abilities*. *Gross sensor* motorik mencoba mengasah sensor utama dengan memberikan refleksi terhadap apa saja gejala yang ada di sekeliling yang mereka rasakan. Sementara *fine motor abilities* adalah mengembangkan dan meningkatkan sensorik lebih lincah. Sinkronisasi ini akan melahirkan daya tanggap dan refleksi yang tinggi. Selain itu, *sensory integration and sensory discrimination* juga sangat penting untuk dikembangkan sebagai dasar pengembangan keterampilan, termasuk pengembangan keseimbangan, postur dan pergerakan.

(e) Orientasi dan keperluan bergerak

Diantara jenis-jenis pengembangan yang perlu mereka dapatkan adalah : konsep lingkungan, *traffic and traffic control concept*, pemanfaatan alat bantu serta mempelajari dasar berjalan dan *travelling*.

(f) *Daily living skills*

Hal yang jauh lebih fundamental, dan diperkenalkan kepada anak didik yang mengalami persoalan fisik dan mental, adalah bagaimana mereka juga terbiasa untuk memperoleh pemahaman minimum tentang kebiasaan dan keterampilan hidup sehari-hari, dimulai dengan menjaga kebersihan diri "*personal higyene*", berpakaian "*dressing*", perawatan pakaian "*clothing care*", perawatan rumah "*housekeeping*", keterampilan makan "*eating skills*", mengatur uang "*money management*", komunikasi sosial "*social communication*", menggunakan telepon "*using the telephone*", dan persiapan makanan "*food preparation*".

(g) *Vocational education*

Sangat penting untuk mengetahui dan menyeleksi apa bakat yang dimiliki oleh anak-anak. Sekiranya bisa diarahkan kepada menggali bakat vokasi yang dimiliki oleh masing-masing anak didik. Mereka yang suka menggambar dapat dikembangkan bakat

menggambarinya. Siapa yang memiliki bakat tentang seni, dikembangkan pula dengan penguasaan alat seni tertentu. Dengan demikian, setiap anak akan memiliki kesempatan yang sama untuk mengukir prestasi melalui kemampuan dan bakat yang mereka miliki.

2.1.4 Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)

Anak Berkebutuhan Khusus menurut Mudjito *et.al*, (2013:27) adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya, tanpa selalu menunjukkan ketidakmampuan mental, emosi atau fisik. Yang termasuk dalam ABK antara lain adalah : tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, kesulitan belajar, gangguan perilaku, anak berbakat dan anak-anak dengan gangguan kesehatan. Istilah lain bagi anak berkebutuhan khusus adalah anak luar biasa dan anak cacat.

Karena karakteristik dan hambatan yang mereka miliki, ABK memerlukan bentuk pelayanan pendidikan khusus yang disesuaikan dengan kemampuan dan potensi mereka. Contohnya, bagi tunanetra mereka memerlukan modifikasi teks bacaan menjadi tulisan *Braille* dan tunarungu berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat. ABK biasanya bersekolah di Sekolah Luar Biasa (SLB) sesuai dengan kekhususannya masing-masing. SLB bagian A untuk tunanetra, SLB bagian B untuk tunarungu, SLB bagian C untuk tunagrahita, SLB bagian D untuk tunadaksa, SLB bagian E untuk tunalaras dan SLB bagian G untuk cacat ganda (Mudjito *et.al*, 2013:27).

Lebih lanjut Mudjito *et.al*, (2013:28-31) menjelaskan beberapa pengertian sebagai berikut :

- (1) Tunanetra adalah individu yang memiliki hambatan dalam hal penglihatan. Tunanetra dapat diklasifikasikan ke dalam dua golongan yaitu : buta total (*blind*) dan *low vision*. Karena tunanetra memiliki keterbatasan dalam indra penglihatan maka proses pembelajaran hendaknya menekankan pada alat indra yang lain yaitu indra peraba dan indra pendengaran. Oleh karena itu prinsip yang harus diperhatikan dalam memberikan pengajaran kepada individu tunanetra adalah media yang digunakan harus bersifat *tactual* dan bersuara, contohnya adalah penggunaan tulisan *Braille*, gambar timbul, benda model dan benda nyata. Sedangkan media yang bersuara adalah *tape recorder* dan piranti lunak yang memiliki fasilitas audio. Untuk membantu tunanetra beraktivitas di sekolah luar biasa mereka belajar mengenai Orientasi dan Mobilitas. Orientasi dan mobilitas diantaranya mempelajari bagaimana tunanetra mengetahui tempat dan arah serta

bagaimana menggunakan tongkat putih (tongkat khusus tunanetra yang terbuat dari aluminium).

- (2) Tunarungu adalah individu yang memiliki hambatan dalam pendengaran baik permanen maupun tidak permanen. Klasifikasi tunarungu berdasarkan tingkat gangguan pendengaran adalah :
- (a) Gangguan pendengaran sangat ringan (27-40 desibel);
 - (b) Gangguan pendengaran ringan (41-55 desibel);
 - (c) Gangguan pendengaran sedang (56-70 desibel);
 - (d) Gangguan pendengaran berat (71-90 desibel);
 - (e) Gangguan pendengaran ekstrem/tuli (di atas 91 desibel).

Karena memiliki hambatan dalam pendengaran, individu tunarungu memiliki hambatan dalam berbicara sehingga mereka juga biasa disebut sebagai tunawicara. Cara berkomunikasi dengan individu tunarungu dan tunawicara adalah dengan menggunakan bahasa isyarat. Untuk abjad jari telah dipatenkan secara internasional sedangkan untuk isyarat bahasa berbeda-beda di setiap negara. Saat ini di beberapa sekolah sedang dikembangkan komunikasi total yaitu cara berkomunikasi dengan melibatkan bahasa verbal, bahasa isyarat dan bahasa tubuh. Individu tunarungu cenderung kesulitan dalam memahami konsep dari sesuatu yang abstrak.

- (3) Tunagrahita adalah individu yang memiliki intelegensi yang signifikan berada di bawah rata-rata dan disertai dengan ketidakmampuan dalam adaptasi perilaku yang muncul dalam masa perkembangan. Klasifikasi tunagrahita berdasarkan pada tingkatan IQ diantaranya adalah :
- (a) Tunagrahita ringan (IQ : 51-70);
 - (b) Tunagrahita sedang (IQ : 36-50);
 - (c) Tunagrahita berat (IQ : 20-35);
 - (d) Tunagrahita sangat berat (IQ dibawah 20).

Pembelajaran bagi individu tunagrahita lebih dititikberatkan pada kemampuan bina diri dan sosialisasi.

- (4) Tunadaksa adalah individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuro-muskular dan struktur tulang. Gangguan gerak ini bisa jadi disebabkan oleh berbagai hal seperti yang bersifat bawaan, sakit atau akibat kecelakaan, termasuk *cerebral palsy*, amputasi, polio dan lumpuh. Tingkat gangguan pada tunadaksa termasuk ringan jika memiliki keterbatasan dalam melakukan aktivitas fisik tetapi masih dapat ditingkatkan melalui terapi. Sedangkan yang memiliki keterbatasan motorik dan

mengalami gangguan koordinasi sensorik berat, yaitu individu yang memiliki keterbatasan total dalam gerakan fisik dan tidak mampu mengontrol gerakan fisik.

- (5) Tunalaras adalah individu yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial. Individu tunalaras biasanya menunjukkan perilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku di sekitarnya. Tunalaras dapat disebabkan karena faktor internal dan faktor eksternal yaitu pengaruh dari lingkungan sekitar.
- (6) Individu kesulitan belajar adalah individu yang memiliki gangguan pada satu atau lebih kemampuan dasar psikologis yang mencakup pemahaman dan penggunaan bahasa, berbicara dan menulis yang dapat mempengaruhi kemampuan berfikir, membaca, berhitung dan berbicara. Gangguan ini dapat disebabkan karena gangguan persepsi, *brain injury*, disfungsi minimal otak, *dyslexia* dan *afasia* perkembangan. Individu kesulitan belajar memiliki IQ rata-rata atau di atas rata-rata, mengalami gangguan *motoric perception*-motorik, gangguan koordinasi gerak, gangguan orientasi arah dan ruang serta keterlambatan perkembangan konsep.

2.1.5 Implementasi Pendidikan Inklusif

Agar tercapai keberhasilan dalam implementasi pendidikan inklusif bagi ABK, maka lembaga yang akan menyelenggarakan pendidikan inklusif harus memperhatikan Prosedur Operasi Standar (POS) Pendidikan Inklusif yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional (2007) sebagai berikut :

1. Kriteria Sekolah

Setiap satuan pendidikan formal, baik TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK/MAK, pada dasarnya dapat menyelenggarakan pendidikan inklusif sesuai dengan sumber daya yang tersedia. Namun demikian untuk menghindari kemungkinan terjadinya implementasi penyelenggaraan pendidikan inklusif yang kurang sesuai, maka setiap satuan pendidikan yang akan menyelenggarakan pendidikan inklusif perlu memenuhi beberapa kriteria, diantaranya sebagai berikut :

(a.) Terdapat Peserta Didik Berkebutuhan Khusus

Melalui proses identifikasi dan *assessment* terhadap semua peserta didik di sekolah yang bersangkutan, yang dilakukan oleh sekolah atau tenaga profesional lain, kita dapat menemukan ada atau tidak ada peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah tersebut. Anak berkebutuhan khusus mungkin juga dapat diperoleh dari proses

penjaringan terhadap anak usia sekolah yang belum bersekolah di lingkungan terdekat. Anak berkebutuhan khusus juga dapat diperoleh berdasarkan hasil rujukan dari Sekolah Luar Biasa/Institusi lain terdekat, baik karena proses mutasi sekolah ataupun melanjutkan sekolah.

Jika sekolah umum tersebut terdapat peserta didik berkebutuhan khusus, baik karena melalui proses identifikasi dan *assessment*, penjaringan di lingkungan terdekat, maupun rujukan SLB/Institusi lain, maka secara otomatis sekolah tersebut dapat menyelenggarakan pendidikan inklusif.

(b.) Kesiapan Sekolah

Untuk mendukung kelancaran dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif, setiap satuan pendidikan harus memiliki kesiapan dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif. Kesiapan dimaksud meliputi :

- (1) Adanya persepsi dan sikap yang positif dari semua komponen sekolah, termasuk orang tua anak pada umumnya, tentang pendidikan inklusif.
- (2) Adanya kemauan yang kuat dari sekolah untuk meningkatkan pemerataan dan mutu pendidikan tanpa diskriminatif.
- (3) Adanya peluang untuk meningkatkan aksesibilitas anak berkebutuhan khusus dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif.

2. Layanan dalam Pendidikan Inklusif

Layanan dalam pendidikan inklusif harus memperhatikan hasil identifikasi dan *assessment* anak berkebutuhan khusus. Berdasarkan hasil identifikasi dan *assessment* tersebut selanjutnya dikembangkan berbagai kemungkinan alternatif program pelayanan sesuai dengan kebutuhannya. Beberapa alternatif program pelayanan yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan peserta didik diantaranya adalah :

(a.) Layanan pendidikan penuh

Semua anak termasuk anak berkebutuhan khusus belajar bersama di dalam komunitas kelas yang beragam di bawah bimbingan guru kelas, guru bidang studi atau guru lainnya. Sedangkan peran Guru Pendidikan Khusus (GPK) bertanggungjawab dalam pembuatan program, memonitor pelaksanaan program dan mengevaluasi hasil pelaksanaan program.

(b.) Layanan pendidikan yang dimodifikasi

Anak berkebutuhan khusus mengikuti proses belajar bersama-sama anak pada umumnya dalam komunitas kelas yang beragam di bawah bimbingan guru kelas, guru bidang studi atau guru lainnya untuk mata pelajaran dan aktivitas yang dapat diikuti

oleh anak berkebutuhan khusus dengan baik. Sedangkan untuk GPK berperan dalam membimbing beberapa aktivitas tertentu yang tidak dapat diikuti anak berkebutuhan khusus dengan menggunakan Program Pembelajaran Individual (PPI).

(c.) Layanan pendidikan individualisasi

Anak berkebutuhan khusus mengikuti proses belajar bersama-sama anak pada umumnya dalam komunitas kelas yang beragam di bawah bimbingan penuh GPK dalam melaksanakan PPI.

Untuk memperlancar pelaksanaan ketiga alternatif program layanan tersebut perlu didukung oleh unit khusus yang berfungsi sebagai *supporting program* pendidikan inklusif. *Supporting program* dimaksud dapat berbentuk : layanan remedial, layanan bimbingan, layanan latihan dan pengembangan, layanan *assessment*, dan layanan observasi.

3. Manajemen Sekolah

Manajemen sekolah penyelenggara pendidikan inklusif memberikan kewenangan penuh kepada pihak sekolah untuk merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengevaluasi komponen-komponen pendidikan inklusif yang bersangkutan. Komponen-komponen tersebut meliputi :

(a.) Manajemen kesiswaan/peserta didik

(b.) Manajemen kurikulum

(c.) Manajemen pembelajaran

(d.) Manajemen penilaian

(e.) Manajemen ketenagaan

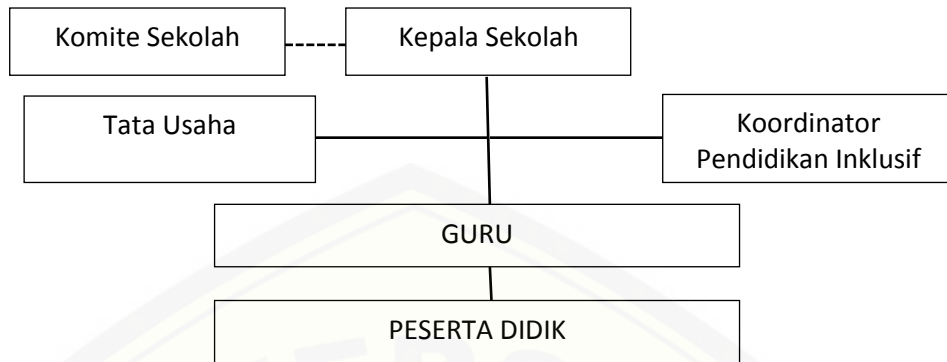
(f.) Manajemen sarana-prasarana

(g.) Manajemen pembiayaan

(h.) Manajemen sumber daya lingkungan

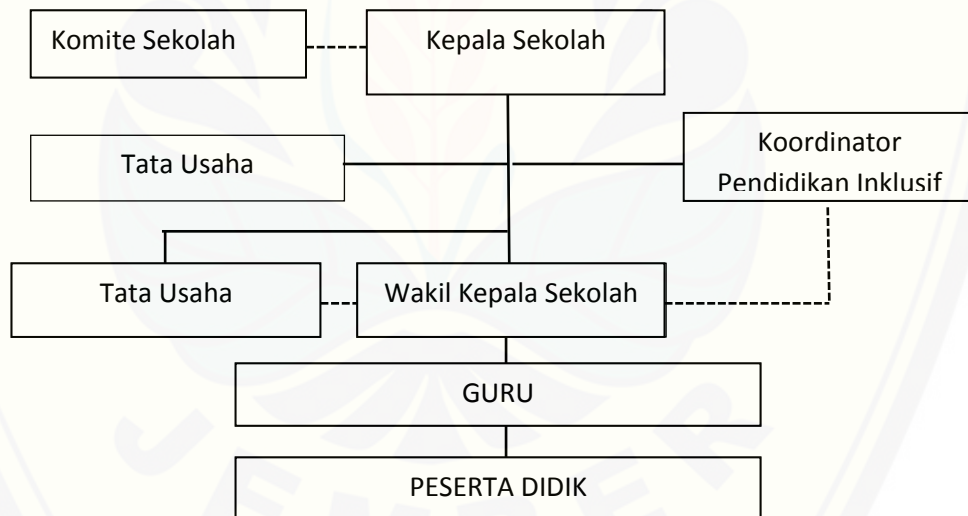
Upaya peningkatan mutu pendidikan di sekolah inklusif perlu didukung kemampuan manajerial kepala sekolah. Kepala sekolah hendaknya berupaya untuk mendayagunakan sumber-sumber daya, baik personal maupun sarana prasarana secara optimal guna menunjang tercapainya tujuan pendidikan di sekolah. Tidak kalah pentingnya sekolah harus mampu mengembangkan kurikulum sesuai dengan tingkat, perkembangan dan karakteristik peserta didik agar lulusan memiliki kompetensi untuk bekal hidup (*lifeskill*). Implikasi dari perubahan fungsi sekolah umum menjadi sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, maka dimungkinkan adanya perubahan struktur organisasi sekolah.

Gambar 2.3 Alternatif struktur organisasi sekolah penyelenggara pendidikan inklusif untuk satuan pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah :



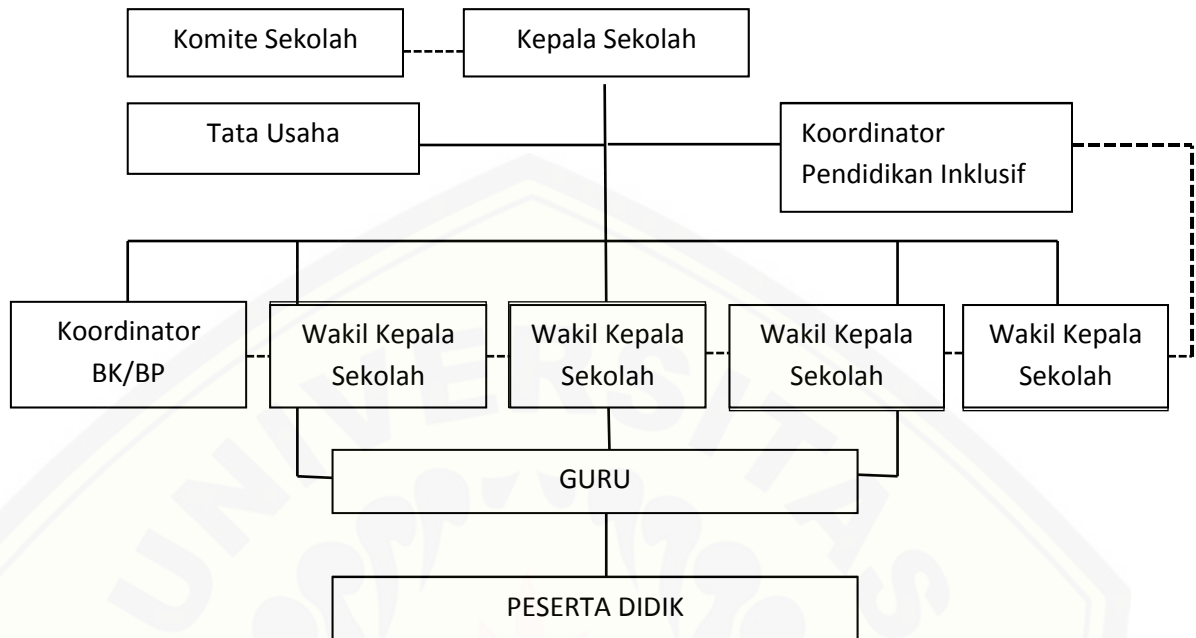
Sumber : Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009

Gambar 2.4 Alternatif struktur organisasi sekolah penyelenggara pendidikan inklusif satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah.



Sumber : Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009

Gambar 2.5 Alternatif Struktur Organisasi Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan



Keterangan :

- _____ : Garis Komando
 - - - - - : Garis Koordinasi

Sumber : Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009

4. Identifikasi dan *Assessment*

Pada dasarnya setiap guru harus mengetahui latar belakang dan kebutuhan masing-masing peserta didik agar dapat memberikan pelayanan dan bantuannya dengan tepat. Setiap peserta didik memiliki kebutuhan yang berbeda baik karena faktor yang bersifat permanen seperti hambatan penglihatan, hambatan pendengaran, hambatan fisik, ataupun yang tidak permanen seperti, masalah sosial, bencana alam dan lain-lain. Oleh karena itu penting bagi guru memiliki kemampuan mengidentifikasi peserta didik atau calon peserta didik untuk mengetahui ada tidaknya anak berkebutuhan khusus yang perlu mendapatkan layanan pendidikan sesuai dengan kebutuhannya.

Untuk mencermati lebih jauh tentang latar belakang, potensi dan kondisi khusus pada siswa, sekolah perlu mengadakan *assessment*. *Assessment* merupakan proses pengumpulan informasi sebelum disusun program pembelajaran bagi siswa berkelainan. Ada dua jenis *assessment* yang biasa dilakukan, yaitu :

(a.) *Assessment* Fungsional

Assessment dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan dan hambatan yang dialami peserta didik dalam melakukan aktivitas tertentu. *Assessment* ini dapat dilakukan oleh guru di sekolah.

(b.) *Assessment* Klinis

Assessment klinis dilakukan oleh tenaga profesional sesuai dengan kebutuhannya. Contohnya, *assessment* untuk mengetahui seberapa besar kemampuan melihat seorang anak yang memiliki hambatan visual, sehingga dapat menentukan alat bantu visual apa yang sesuai dengan anak tersebut agar dapat dimanfaatkan dalam melakukan tugas sehari-hari, baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat.

5. Kurikulum yang digunakan

Kurikulum yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif pada dasarnya menggunakan kurikulum standar nasional yang berlaku di sekolah umum. Namun, karena ragam hambatan yang dialami peserta didik berkelainan sangat bervariasi, mulai dari yang sifatnya ringan, sedang sampai yang berat, maka dalam implementasinya, kurikulum tingkat satuan pendidikan yang sesuai dengan standar nasional perlu dilakukan modifikasi (penyelarasan) sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Modifikasi (penyelarasan) kurikulum dilakukan oleh tim pengembang kurikulum di sekolah yang terdiri dari : kepala sekolah, guru kelas, guru mata pelajaran, guru pendidikan khusus, konselor, psikolog, orang tua dan ahli lain sesuai kebutuhan.

Penyesuaian kurikulum ini diimplementasikan dalam bentuk Program Pembelajaran Individual (PPI). PPI merupakan program pembelajaran yang disusun sesuai kebutuhan individu dengan bobot materi berbeda dari kelompok dalam kelas dan dilaksanakan dalam setting klasikal.

Tujuan pengembangan kurikulum dalam pendidikan inklusif antara lain : membantu peserta didik dalam mengembangkan potensi dan mengatasi hambatan belajar yang dialami siswa semaksimal mungkin dalam setting inklusif, membantu guru dan orang tua dalam mengembangkan program pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus baik yang diselenggarakan di sekolah, di luar sekolah maupun di rumah, serta menjadi pedoman bagi sekolah dan masyarakat dalam mengembangkan, menilai dan menyempurnakan program pendidikan inklusif.

Implikasi dari penyesuaian kurikulum bagi anak berkebutuhan khusus pada sekolah inklusif ini, maka secara operasional model kurikulum yang digunakan ada 3 (tiga) jenis, yaitu : (a) Kurikulum Umum (Reguler), untuk siswa biasa dan anak berkebutuhan khusus

yang dapat mengikuti kurikulum umum; (b) Kurikulum Modifikasi, yaitu perpaduan antara kurikulum umum dengan kurikulum PPI, untuk anak berkebutuhan khusus yang tidak dapat mengikuti kurikulum umum secara penuh; dan (c) Kurikulum yang diindividualisasikan, untuk anak berkebutuhan khusus yang sama sekali tidak dapat mengikuti kurikulum umum.

6. Sistem Penilaian

(a.) Sistem penilaian yang digunakan

- (1) Apabila anak berkebutuhan khusus mengikuti kurikulum umum yang berlaku untuk peserta didik pada umumnya di sekolah, maka penilaiannya menggunakan sistem penilaian yang berlaku pada sekolah tersebut.
- (2) Apabila anak berkebutuhan khusus mengikuti kurikulum modifikasi, maka menggunakan sistem penilaian yang dimodifikasi sesuai dengan kurikulum yang dipergunakan.
- (3) Apabila anak berkebutuhan khusus mengikuti kurikulum program pembelajaran individual (PPI), maka penilaiannya bersifat individual yang didasarkan pada kemampuan dasar awal (*baseline*).

(b.) Sistem kenaikan kelas

- (1) Peserta didik yang menggunakan model kurikulum umum, maka sistem kenaikan kelas menggunakan acuan yang berlaku pada sekolah umum.
- (2) Peserta didik yang menggunakan model kurikulum modifikasi, maka sistem kenaikan kelas menggunakan model kenaikan kelas yang didasarkan pada usia kronologis dan atau model kenaikan kelas umum.
- (3) Peserta didik yang menggunakan model PPI, sistem kenaikan kelas didasarkan pada usia kronologis (kenaikan kelas otomatis).

(c.) Sistem Laporan Hasil Belajar

- (1) Peserta didik yang menggunakan kurikulum umum, maka model laporan hasil belajar (raport) menggunakan model raport umum yang berlaku.
- (2) Peserta didik yang menggunakan kurikulum modifikasi, maka model raport yang digunakan adalah raport umum yang dilengkapi dengan deskripsi (narasi) dan portofolio yang menggambarkan kualitas kemajuan belajar.
- (3) Peserta didik yang menggunakan PPI, maka model raport yang digunakan adalah raport khusus yang dilengkapi dengan deskripsi (narasi) dan portofolio. Penentuan nilai kuantitatif didasarkan pada kemampuan dasar awal (*baseline*).

7. Bimbingan dan Konseling

Bimbingan konseling dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif diperlukan sesuai dengan kemampuan sekolah. Untuk satuan pendidikan SD/MI, pelaksanaan fungsi bimbingan dan konseling dapat dilakukan oleh guru kelas, guru bidang studi dan guru pendidikan khusus. Sedangkan untuk satuan pendidikan SMP/MTs, SMA/MA dan SMK/MAK, tugas dan fungsi bimbingan konseling di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dilakukan oleh petugas khusus yaitu tenaga pembimbing/konselor dan Guru Pembimbing Khusus (GPK).

8. Pendidik dan Tenaga Kependidikan

(a.) Pengertian dan ruang lingkup

Pendidik adalah tenaga profesional di bidang pendidikan yang mempunyai tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada satuan pendidikan tertentu yang melaksanakan program pendidikan inklusif. Pendidik meliputi : guru kelas (untuk SD/MI), guru mata pelajaran, guru pembimbing/konselor (untuk sekolah menengah) dan Guru Pembimbing Khusus (GPK).

Di samping pendidik, sekolah penyelenggara pendidikan inklusif juga memerlukan dukungan tenaga kependidikan yang relevan, seperti terapis, tenaga medis, dokter, psikolog, laboran dan lain-lain.

Pengadaan GPK pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dapat dilakukan dengan cara :

- (1) Sekolah yang memungkinkan mengangkat GPK sesuai kebutuhan.
- (2) Sekolah meminta bantuan GPK melalui kerjasama dengan SLB (Sekolah Luar Biasa) terdekat atau Institusi lainnya (LSM, Klinik, Rumah Sakit).
- (3) Pemerintah mengangkat GPK yang ditempatkan pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusif.
- (4) Pemerintah mengangkat GPK yang ditempatkan pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusif inti/basis dan melaksanakan tugas di sekolah imbas.
- (5) Pemerintah mengangkat GPK yang ditempatkan pada SLB/SDLB (Sekolah Dasar Luar Biasa) dan melaksanakan tugas di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif.
- (6) Pemerintah dan atau sekolah baik secara sendiri maupun bersama-sama, menyelenggarakan *inservice training* bagi guru-guru umum tentang pendidikan inklusif.

(b.) Tugas pendidik

(1) Tugas Guru Kelas antara lain :

- Menciptakan iklim belajar yang kondusif sehingga anak-anak merasa nyaman belajar di kelas/sekolah.
- Menyusun dan melaksanakan *assessment* pada semua anak untuk mengetahui kemampuan dan kebutuhannya.
- Menyusun program pembelajaran individualisasi (PPI) bersama-sama dengan GPK.
- Melaksanakan kegiatan belajar-mengajar dan penilaian.
- Memberikan program pengajaran remedy, repetisi, pengayaan dan atau percepatan bagi peserta didik yang membutuhkan.
- Melaksanakan administrasi kelas sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Tugas Guru Mata Pelajaran antara lain :

- Menciptakan iklim belajar yang kondusif sehingga anak-anak merasa nyaman belajar di kelas/sekolah.
- Menyusun dan melaksanakan *assessment* pada semua anak untuk mengetahui kemampuan dan kebutuhannya.
- Menyusun program pembelajaran individualisasi (PPI) bersama-sama dengan GPK.
- Melaksanakan kegiatan pembelajaran dan penilaian yang menjadi tanggung jawabnya.
- Memberikan program pengajaran remedy, repetisi, pengayaan dan atau percepatan bagi peserta didik yang membutuhkan.

(3) Tugas Guru Pendidikan Khusus antara lain :

- Menyusun instrumen dan melaksanakan *assessment* pendidikan bersama-sama dengan guru kelas dan guru mata pelajaran serta tenaga profesional lain.
- Menjalin kerjasama antara guru, sekolah dan orang tua peserta didik dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian kemajuan belajar.
- Melaksanakan pendampingan anak berkebutuhan khusus pada kegiatan pembelajaran bersama-sama dengan guru kelas maupun guru mata pelajaran.

- Memberikan bantuan layanan khusus bagi anak-anak yang mengalami hambatan.
- Memberikan bimbingan secara berkesinambungan dan membuat catatan khusus bagi anak-anak yang menjadi bimbingannya selama mengikuti kegiatan pembelajaran yang dapat dipahami jika terjadi pergantian guru.
- Memberikan bantuan (berbagi pengalaman) pada guru kelas dan/atau guru mata pelajaran agar mereka dapat memberikan pelayanan pendidikan kepada anak-anak berkebutuhan khusus.

9. Sarana dan Prasarana Penunjang

Sarana dan prasarana pendidikan inklusif adalah perangkat keras maupun perangkat lunak yang dipergunakan untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan pendidikan inklusif pada satuan pendidikan tertentu.

Pada hakikatnya semua sarana dan prasarana pendidikan pada satuan pendidikan tertentu dapat dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif, tetapi untuk mengoptimalkan proses pembelajaran perlu dilengkapi aksesibilitas bagi kelancaran mobilisasi anak berkebutuhan khusus.

10. Pembiayaan

Pembiayaan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif dapat diperoleh dari pemerintah, pemerintah daerah, swasta, NGO, masyarakat (orangtua peserta didik dan lembaga swadaya masyarakat), dan/atau sumber dana dari luar negeri.

11. Pemberdayaan Masyarakat

Dalam rangka optimalisasi sumber daya masyarakat untuk kelancaran penyelenggaraan pendidikan inklusif, diperlukan upaya sistematis dan sistemik peran serta masyarakat, yang dapat berbentuk :

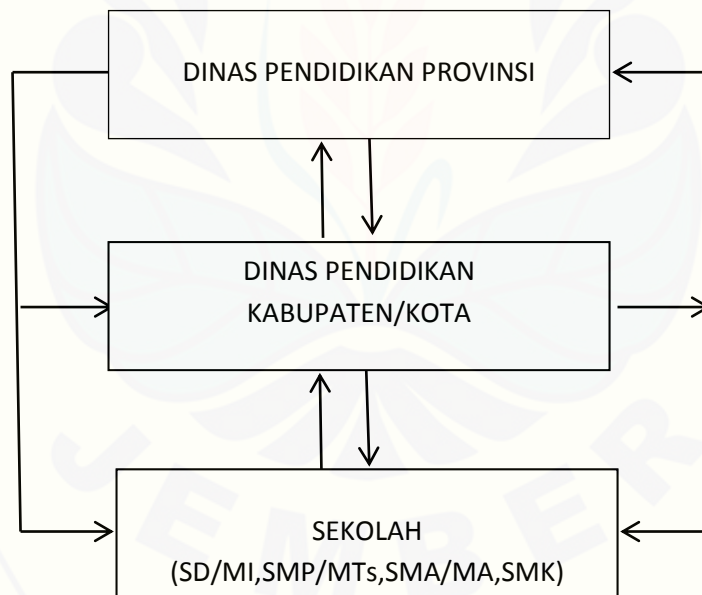
- (a.) Peran langsung, seperti bantuan tenaga/keahlian, dukungan pembiayaan, dukungan sarana prasarana, penyaluran lulusan, keterlibatan dalam tim pengelola.
- (b.) Peran tidak langsung, seperti bantuan pemikiran untuk pengambilan kebijakan, bantuan akses dan jaringan, pengembangan kurikulum, pengawasan dan lain-lain.

12. Mekanisme Penyelenggaraan

Untuk keperluan administrasi dan pembinaan, serta kelancaran dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif, harus mengikuti prosedur sebagai berikut :

- (a.) Sekolah yang akan menerima anak berkebutuhan khusus mengajukan proposal penyelenggaraan pendidikan inklusif kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Sedangkan sekolah yang telah memiliki peserta didik berkebutuhan khusus melaporkan penyelenggaraan pendidikan inklusif kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
- (b.) Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menindaklanjuti proposal/laporan dari sekolah yang bersangkutan kepada Dinas Pendidikan Provinsi.
- (c.) Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Dinas Pendidikan Provinsi melakukan visitasi ke sekolah yang bersangkutan.
- (d.) Dinas Pendidikan Provinsi menetapkan sekolah yang bersangkutan sebagai penyelenggara pendidikan inklusif dengan menerbitkan surat penetapannya, dengan tembusan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa.

Gambar 2.6 Mekanisme Penetapan Sekolah Inklusif



Sumber : Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009

2.1.6 Trend Dunia Pendidikan Inklusif

Model pendidikan inklusif seperti yang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) ini sudah menjadi trend dunia internasional. Di hampir semua negara maju, penghargaan, perlakuan dan penghormatan terhadap anak-anak berkebutuhan khusus itu semakin detail dan manusiawi. Di Amerika Serikat misalnya, pendidikan inklusif ini sangat berkembang pesat. Alam sosial, lingkungan masyarakat, peradaban dan pendidikan di sana sangat mendukung. Anak-anak yang normal bisa berempati dan bertoleransi. Bisa merasakan sulitnya dilahirkan sebagai manusia berkebutuhan khusus. Bisa menghormati mereka, dalam tutur kata, sikap dan perilakunya. Sedangkan yang tidak normal, berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mengikuti mereka yang normal. Karena itu mereka dengan mudah bisa menyatu dengan lingkungan sosialnya (Suyanto dan Mudjito, 2012:6).

Yang tidak bisa dilakukan oleh sekolah-sekolah khusus, seperti SLB (Sekolah Luar Biasa) adalah pendidikan bersosialisasi dengan kawan-kawannya. Itulah hal yang tidak ternilai harganya, bahkan tidak terbeli dengan angka berapapun. Sekolah inklusif menjadi tempat belajar anak-anak berkebutuhan khusus menjadi manusia-manusia normal. Mereka bisa bermain, bercanda, bersenda gurau, berbagi pengalaman, dengan kawan-kawan seusia. Kontak, interaksi, komunikasi dan sosialisasi seperti inilah yang mahal dan bahkan tidak terbeli. Inilah alasannya mengapa pendidikan inklusif akhirnya menjadi trend dunia.

Model inklusif ini memberi kesempatan yang luas kepada anak-anak berkebutuhan khusus untuk berinteraksi dengan anak-anak normal secara wajar di sekolah. Kelak, jika sudah lulus dari sekolah, mereka juga akan hidup dan berinteraksi dengan masyarakat. Mereka akan menjadi manusia yang mandiri. Mereka bisa cepat beradaptasi dan bersosialisasi dengan masyarakat. Itu adalah modal yang amat berharga bagi mereka selama menjalani masa pendidikan.

Di Amerika Serikat dan Eropa, program inklusif ini sudah berlangsung lama dan sukses membangun kesetaraan. Infrastruktur di sana juga sangat mendukung. Misalnya, semua gedung-gedung bertingkat dan fasilitas publik disana selalu menyediakan tempat parkir khusus untuk masyarakat “*difable*”. Lokasinya paling strategis, paling depan, paling mudah diakses, paling lebar, tidak ada penghalang dan bisa langsung menuju ke pintu utama. Biasanya ada gambar simbol kursi roda, berwarna biru atau kuning. Jika orang normal parkir di tempat tersebut, maka akan langsung dikenakan denda terbesar karena dianggap melakukan pelanggaran berat.

Ruang toilet juga demikian, dibuat dengan ukuran lain, lebih besar, lebih dekat dengan akses pintu keluar masuk, *handle* pintunya melintang, sehingga memudahkan membuka dan menutup pintu. Papan-papan petunjuk dengan simbol kursi roda di ruang-ruang publik juga tersebar di mana-mana.

Di kota-kota besar di Tiongkok, fasilitas publik yang *acceptable* terhadap orang-orang berkebutuhan khusus juga semakin lengkap. Di hampir semua pedestrian, tempat pejalan kaki di jalur-jalur protokol selalu dilengkapi dengan tanda khusus untuk tunanetra. Pola lantai trotoarnya juga dibuat berbeda dengan ekstrem. Dibuat garis-garis melintang, agar kalau mereka yang tidak bisa melihat bisa tetap menyusuri jalan itu dengan baik dan aman. Di airport juga demikian. Ada jalur-jalur yang keramik lantainya dibuat lebih kasar berpola patah-patah. Maksudnya, agar mereka yang tunanetra bisa memanfaatkan jalur itu dengan nyaman dan aman.

Kota Paris, Perancis, yang dibagi ke dalam kota tua dan kota baru juga memberikan penghargaan yang sangat tinggi bagi para penyandang cacat. Hampir semua gedung-gedung bertingkat bisa diakses oleh orang dengan kursi roda, tanpa harus memperoleh bantuan orang lain, karena ada satu lantai yang menghubungkan antar gedung satu dengan yang lain. Sejak awal perencanaan pembangunan gedung sudah ada persyaratan yang diberikan oleh tata kota atau semacam pemilik otoritas dalam mendirikan bangunan, selain harus melalui analisa dampak lingkungan, juga harus ada *connecting floor* antara satu gedung dengan gedung yang lain. Dengan demikian, setiap orang yang berkebutuhan khusus yang hendak berpindah dari satu gedung ke gedung yang lain tidak akan menemui kesulitan, karena tidak ada tangga naik turun dan tidak ada jalur yang membahayakan keselamatan mereka.

Itu semua membuktikan bahwa masyarakat di banyak penjuru dunia menempatkan orang-orang berkebutuhan khusus dalam posisi yang normal. Memberikan ruang kemandirian yang lebih leluasa untuk beraktivitas sebagaimana manusia normal. Dan mereka juga merasa lebih berdaya, lebih mandiri, serta lebih bebas untuk menentukan pilihan hidup dan optimis menjalani kehidupan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tema-tema penelitian tentang pendidikan inklusif sebenarnya telah banyak dilakukan di negara-negara Eropa Barat dan Amerika Serikat sejak tahun 1980-an. Penelitian yang berskala besar pernah dipelopori oleh *The National Academy of Science* Amerika Serikat. Hasilnya, klasifikasi dan penempatan terhadap anak-anak berkebutuhan khusus di sekolah, kelas atau tempat khusus terbukti tidak efektif dan berkesan diskriminatif

(Suyanto dan Mudjito, 2012:17). Meyer dalam Suyanto dan Mudjito (2012:18) mengatakan bahwa siswa yang memiliki kecacatan mampu menemukan keberhasilan yang lebih besar manakala mereka memperoleh pendidikan serta memiliki hubungan sosial dan persahabatan yang baik dengan masyarakat.

Selain itu, beberapa penelitian terdahulu yang juga bisa menjadi bahan rujukan dalam penelitian ini diantaranya adalah :

a. Zaini Sudarto (2016)

Judul penelitian : Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan pendidikan inklusif di jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian dengan menggunakan teori S. Grindle, sedangkan pengumpulan data yang dilakukan menggunakan teknik observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi.

Dalam implementasi kebijakan pendidikan inklusif di enam penyelenggara inklusif jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama ditemukan beberapa masalah klasik yaitu kurangnya tenaga Guru Pendidik Khusus (GPK), tidak tersedianya ruang khusus untuk penanganan ABK, tidak ada tenaga Psikolog atau Bimbingan Konseling (BK), kurangnya sosialisasi tentang pendidikan inklusif di masyarakat sekitar sekolah dan kurangnya pengetahuan reguler tentang ABK.

b. Sulistyadi (2014)

Judul penelitian : Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Layanan Pendidikan Inklusif di Kabupaten Sidoarjo.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan inklusif di Kabupaten Sidoarjo telah terlaksana sebagaimana yang diharapkan. Keberadaan sekolah-sekolah reguler yang melayani pendidikan inklusif mampu memberikan alternatif layanan pendidikan khusus bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Komitmen Dinas Pendidikan Sidoarjo sangat terlihat dari upaya mereka untuk secara maksimal memanfaatkan sumber daya yang ada di tengah segala keterbatasan, untuk dapat menunjang penyelenggaraan pendidikan inklusif secara keseluruhan.

Beberapa faktor yang menjadi kendala dalam implementasi kebijakan ini, yaitu (1) kurangnya pemahaman implementor terhadap isi pedoman umum dan khusus penyelenggaraan pendidikan inklusif, terutama informasi yang menyangkut aspek teknis

pembelajaran di dalam kelas; (2) *lack of experience* (kurangnya pengalaman) para GPK karena mayoritas bukanlah tenaga pengajar murni dengan latar belakang pendidikan khusus; (3) aspek anggaran yang sangat terbatas jika dibandingkan dengan jumlah peserta didik dan sekolah penyelenggara; (4) masih adanya beberapa sekolah yang belum memiliki sarana dan prasarana yang sesuai standar, karena kebanyakan sekolah belum memiliki ruang sumber atau *Resources and Treatment Room* (RTR); dan (5) masih belum ada insentif khusus bagi para guru reguler yang merangkap sebagai Guru Pendamping Khusus (GPK).

c. Pambudi (2012)

Judul penelitian : Implementasi Pendidikan Inklusi bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di Sekolah Menengah Atas (SMA) (Studi Kasus di Sekolah Inklusi SMA Negeri 10 Surabaya).

Hasil analisa penelitian menyimpulkan bahwa implementasi pendidikan inklusi di SMA Negeri 10 Surabaya dapat dikatakan sukses dan telah sesuai dengan Prosedur Operasi Standar Pendidikan Inklusi yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional tahun 2007. SMA Negeri 10 Surabaya telah memenuhi kriteria sekolah untuk pendidikan inklusi dan memberikan layanan dalam pendidikan inklusi, mempunyai manajemen sekolah untuk inklusi, melakukan identifikasi dan assesmen, kurikulum yang digunakan dalam pendidikan inklusi, sistem penilaian yang digunakan, melakukan bimbingan dan konseling, mempunyai pendidik dan tenaga kependidikan, mempunyai sarana dan prasarana penunjang walaupun masih terbatas, pembiayaan yang cukup, pemberdayaan masyarakat dan mekanisme penyelenggaraan dalam pendidikan inklusi. Selain itu, SMA Negeri 10 Surabaya juga mengembangkan potensi yang dimiliki oleh siswa ABK yaitu dengan memberikan kesempatan kepada siswa ABK untuk berprestasi di Olimpiade Sains.

Kendala-kendala yang dihadapi SMA Negeri 10 Surabaya antara lain adalah kurangnya informasi dan sosialisasi kepada guru mengenai implementasi pendidikan inklusi serta banyaknya siswa ABK yang diterima, kurangnya pemahaman guru terhadap ABK dan keberagaman siswa, ABK yang tidak percaya diri sehingga interaksi sosialnya terhambat, belum adanya kurikulum khusus untuk ABK, kurangnya jumlah guru pendamping dan pendamping yang ada tidak sesuai dengan mata pelajaran serta konstruksi gedung yang tidak sesuai dengan ABK. Selanjutnya upaya yang dilakukan oleh SMA Negeri 10 Surabaya untuk mengatasi kendala-kendala tersebut dengan

mengikutsertakan guru dalam pelatihan-pelatihan dan mengadakan sosialisasi kepada seluruh warga sekolah. Dalam upaya memaksimalkan layanan kepada ABK dilakukan pendekatan dengan ABK, membangkitkan semangat dan memotivasi ABK, menggunakan kurikulum reguler dengan teknis menyesuaikan ABK, upaya dalam sistem penilaian dengan menurunkan Standar Ketuntasan Minimum (SKM) untuk ABK, melibatkan siswa reguler untuk membantu menjadi pendamping ABK serta mengoptimalkan sarana prasarana yang ada dan ada pula ABK yang membawa alat-alat sendiri.

d. Wati (2014)

Judul penelitian : Manajemen Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar Negeri 32 Kota Banda Aceh.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program kepala sekolah dalam menyukseskan pendidikan inklusi di SD Negeri 32 Kota Banda Aceh disadari sebagai program yang sangat penting sehingga sangat didukung oleh semua staf di SD tersebut. Program pendidikan inklusi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang besar kepada anak berkebutuhan khusus dalam bidang pendidikan, sehingga tidak ada lagi anak berkebutuhan khusus yang tidak sekolah.

Terkait dengan implementasi pendidikan inklusi di SD Negeri 32 Kota Banda Aceh, kepala sekolah telah mengupayakan pelaksanaan program yang telah disusun. Hal ini dapat diketahui melalui kegiatan perencanaan pembuatan program, pelaksanaan program, serta pengawasan program yang dilakukan oleh kepala sekolah dan wakil dari Dinas PPO (Pendidikan, Pemuda dan Olahraga) Kota Banda Aceh. Pengawasan ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana program pendidikan inklusi ini berjalan di dalam kelas (kurikulum, sarana dan prasarana pembelajaran dan guru pendamping khusus), dan juga untuk memberikan penilaian, baik yang telah tercapai maupun yang belum tercapai. Hambatan dalam melaksanakan pendidikan inklusi di SD Negeri 32 Kota Banda Aceh meliputi : pembiayaan pendidikan, sarana dan prasarana serta kurangnya tenaga guru pendamping khusus.

e. Prastiyono (2013)

Judul Penelitian : Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif (Studi di Sekolah Galuh Handayani Surabaya).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan inklusi di sekolah Galuh Handayani Surabaya masih belum optimal atau masih belum sesuai

dengan harapan masyarakat. Ini disebabkan karena aktor implementor kurang mampu menjabarkan isi kebijakan dan kurang memahami bagaimana mensosialisasikan di sekolah-sekolah, akibatnya kepala sekolah dan para guru beserta tenaga kependidikan dalam melaksanakan pembelajaran sekolah kurang sesuai dengan program yang ditetapkan oleh Sekolah Galuh Handayani. Disamping itu, implementor belum memahami sepenuhnya tentang pendidikan inklusif sehingga dalam implementasinya menjadi bias dan tidak bisa mencapai sasaran.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun kegagalan implementasi kebijakan pendidikan inklusif di Sekolah Galuh Handayani Surabaya sangat dipengaruhi oleh faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Realitanya faktor-faktor tersebut belum dilaksanakan secara maksimal oleh para implementor dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Hal ini tercermin dari jarang nya implementor Dinas Pendidikan yang memberikan sosialisasi di Sekolah Galuh Handayani Surabaya, pemberian dana pendidikan relatif rendah tidak sesuai dengan kebutuhan sekolah, serta adanya biaya yang harus dikeluarkan saat ingin mengikuti pelatihan untuk meningkatkan kemampuan guru.

f. Hasyim (2013)

Judul Penelitian : Pendidikan Inklusif di SMK Negeri 2 Malang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pendidikan inklusif di SMK Negeri 2 Malang berawal dari perintah Dinas Pendidikan Kota Malang yang kemudian diperkuat dengan diterbitkannya Surat Keputusan Nomor : 800/1850/35.73.307/2011. Setelah berjalan selama 3 tahun, pelaksanaan pendidikan inklusif berjalan dengan baik dan lancar. Tidak ada permasalahan yang terjadi, baik berupa keluhan dari peserta didik reguler, guru reguler, maupun orang tua peserta didik inklusif. Pelaksanaan belajar peserta didik inklusif menerapkan sistem kelas *Pull Out*, yang berarti peserta didik inklusif belajar bersama dengan peserta didik reguler pada waktu pemberian materi pelajaran normatif, sedangkan saat pelajaran adaptif mereka ditarik atau berpindah ruang menuju ruang khusus inklusif dengan diajar dan dibimbing para Guru Pendamping Khususnya.

Kurikulum yang digunakan adalah kurikulum modifikasi yang disusun bersama antara Wakil Kepala Sekolah Bagian Kurikulum, Manajer Inklusif, Guru Pendamping Khusus serta Guru Reguler. Kurikulum modifikasi materi pelajaran disesuaikan dengan

ketunaan peserta didik, sehingga ada beberapa bagian yang tidak sama dengan peserta didik reguler. Untuk menarik minat belajar peserta didik inklusif digunakan beberapa cara atau strategi dalam belajar. Salah satunya adalah dengan pembelajaran menggunakan komputer, sehingga mereka lebih mudah menangkap dan menerima materi pelajaran. Seluruh warga SMK Negeri 2 Malang telah sangat mengerti tentang keberadaan peserta didik inklusif, karena sosialisasi dilakukan terus menerus. Apalagi didukung peranan peserta didik program keahlian Perawatan Sosial yang mendapat materi pelajaran tata cara melayani peserta didik berkebutuhan khusus, sehingga mereka bisa menjadi informan untuk teman-temannya yang ada di program studi yang lain, bagaimana menghadapi serta menerima peserta didik inklusif.

g. Marti (2012)

Judul penelitian : Pendidikan Inklusif di Sekolah Dasar Kota Padang.

Berdasarkan hasil pembahasan yang diperoleh diketahui bahwa pelaksanaan pendidikan inklusif di Sekolah Dasar Kota Padang sudah bisa dikatakan baik walaupun masih belum maksimal. Dari segi dukungan administrasi sekolah dan kondisi lingkungan sekitar sekolah dapat dilihat bahwa pendidikan inklusif sudah berjalan baik. Akan tetapi dari segi kompetensi guru dan dukungan masyarakat mengenai pendidikan inklusif masih belum berjalan maksimal. Diharapkan pemegang kebijakan di bidang Pendidikan Luar Biasa Dinas Pendidikan Kota Padang agar lebih memperhatikan jalannya pendidikan inklusif di setiap sekolah agar kendala-kendala yang dihadapi seperti masalah biaya segera dapat teratasi. Kepala Sekolah diharapkan lebih giat mengelola penyelenggaraan pendidikan inklusif mulai dari kebijakan, administrasi, sarana prasarana, kurikulum dan aspek lainnya yang mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif agar berjalan dengan maksimal. Bagi GPK diharapkan terus melakukan sosialisasi di lingkungan sekolah, orang tua dan masyarakat sekitar agar konsep inklusif lebih dipahami implementasinya. Bagi Guru Reguler harus terus meningkatkan pengetahuan dan pemahamannya tentang pendidikan inklusif. Orang tua dan masyarakat juga diharapkan turut berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif ini agar hal-hal yang menjadi kendala sekolah bisa segera terbantu dan teratasi.

BAB III. METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang mengungkapkan situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan data dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah (Satori dan Komariah, 2010:25). Metode kualitatif lebih suka menggunakan teknik analisa mendalam (*in-depth analysis*), yaitu mengkaji masalah kasus-perkasus karena metode kualitatif yakin bahwa sifat dari suatu masalah satu akan berbeda dengan sifat dari masalah lainnya. Yang dihasilkan dari metode kualitatif bukan suatu generalisasi, tetapi pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah (Sumanto, 1995:11).

Fathoni (2006:97) mengemukakan penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang bermaksud mengadakan pemeriksaan dan mengadakan pengukuran-pengukuran terhadap gejala tertentu. Sehubungan dengan itu Suryabrata (2000:18) berpendapat bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat pencandraan (deskriptif) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian.

Sementara Creswell (2010:258) menyatakan bahwa prosedur-prosedur kualitatif memiliki pendekatan yang lebih beragam dalam penelitian akademik ketimbang metode-metode kuantitatif. Penelitian kualitatif juga memiliki asumsi-asumsi filosofis, strategi-strategi penelitian, dan metode-metode pengumpulan, analisis serta interpretasi data yang beragam. Meskipun prosesnya sama, prosedur-prosedur kualitatif tetap mengandalkan data berupa teks dan gambar, memiliki langkah-langkah unik dalam analisis datanya, dan bersumber dari penelitian-penelitian yang berbeda-beda.

Menurut Arikunto (2005:234), penelitian deskriptif kualitatif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan “apa adanya” tentang suatu variabel, gejala atau keadaan. Penelitian yang dilakukan ini berusaha untuk mengungkapkan dan memahami kenyataan yang berhubungan dengan implementasi pendidikan inklusif di Kabupaten Banyuwangi.

Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah instrumen utama proses pengumpulan data. Peneliti terjun secara langsung ke lapangan untuk mengumpulkan sejumlah informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Menurut Creswell (2010:261), peneliti berperan sebagai instrumen kunci (*researcher as key*

instrument) yang mengumpulkan data sendiri melalui dokumentasi, observasi pelaku, atau wawancara dengan para partisipan (informan). Para peneliti kualitatif biasanya memilih mengumpulkan data dari beragam sumber dan tidak hanya bertumpu pada satu sumber saja. Kemudian peneliti *me-review* semua data tersebut, memberikannya makna, dan mengolahnya ke dalam kategori-kategori atau tema-tema yang melintasi semua sumber data.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam melakukan penelitian, maka sebagai langkah awal yang harus dilakukan adalah menentukan obyek yang akan dijadikan lokasi penelitian. Penentuan lokasi penelitian dimaksudkan untuk memperjelas masalah yang akan diteliti, ditetapkan berdasarkan rekomendasi dari pihak yang berhubungan langsung dengan lapangan yang sekiranya berpotensi memiliki banyak informasi.

Creswell (2010:266) mengemukakan tentang identifikasi lokasi-lokasi atau individu-individu yang sengaja dipilih dalam proposal penelitian. Gagasan di balik penelitian kualitatif adalah memilih dengan sengaja dan penuh perencanaan para partisipan (informan) dan lokasi (dokumen-dokumen atau materi visual) penelitian yang dapat membantu peneliti memahami masalah yang diteliti. Ditambahkan kembali oleh Miles dan Huberman dalam Creswell (2010:267), pembahasan mengenai para partisipan (informan) dan lokasi penelitian dapat mencakup empat aspek, yaitu : *setting* (lokasi penelitian), aktor (siapa yang akan diobservasi atau diwawancarai), peristiwa (kejadian apa saja yang dirasakan oleh aktor yang akan dijadikan topik wawancara dan observasi), serta proses (sifat peristiwa yang dirasakan oleh aktor dalam *setting* penelitian).

Obyek (aktor yang akan diobservasi atau diwawancarai) dalam penelitian ini meliputi: (1) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi; (2) Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Pendidikan Inklusif Kabupaten Banyuwangi yang dijabat oleh Kepala Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi; (3) Kepala SDN 3 Karangrejo; (4) Guru GPK di SDN 3 Karangrejo; (5) Siswa ABK di SDN 3 Karangrejo; (6) Orang tua ABK di SDN 3 Karangrejo; dan (7) Masyarakat di sekitar SDN 3 Karangrejo. Sumber data lainnya berupa dokumen-dokumen yang terkait dengan sumber-sumber data sebelumnya.

Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 3 Karangrejo Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi. SD Negeri 3 Karangrejo merupakan salah satu sekolah model (*piloting*) penyelenggara pendidikan inklusif di Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi Nomor :

188/2563/429.101/2014. Penelitian dilaksanakan selama 3 bulan, terhitung mulai tanggal 18 Juli sampai dengan 18 September 2016.

3.3 Metode Penentuan Informan

Metode penentuan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *purposive*. Metode ini dilakukan dengan mengambil orang-orang yang terpilih betul oleh peneliti menurut ciri-ciri spesifik yang dimiliki oleh orang tersebut sebagai informan. Moleong (2006:132) menjelaskan bahwa informan dalam sebuah penelitian memiliki peran yang penting sebagai sumber informasi. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Jadi, informan harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian. Informan berkewajiban secara sukarela menjadi anggota tim penelitian walaupun hanya bersifat informal. Sebagai anggota tim dengan kebaikannya dan dengan kesuka-relaannya informan dapat memberikan pandangan dari segi orang dalam tentang nilai-nilai, sikap, bangunan, proses dan kebudayaan yang menjadi latar penelitian.

Kegunaan informan bagi penelitian adalah agar dalam waktu yang relatif singkat banyak informasi yang terjaring karena informan dimanfaatkan untuk berbicara, bertukar pikiran dan membandingkan suatu kejadian yang ditemukan dari subjek lainnya. Penentuan informan dapat dilakukan melalui keterangan orang yang berwenang baik secara formal (pemerintah) maupun secara informal (pemimpin masyarakat seperti tokoh masyarakat serta pemimpin adat) dan dipandang paling banyak mengetahui permasalahan yang diteliti.

Dalam penelitian ini informan dipilih dan ditetapkan secara sengaja oleh peneliti berdasarkan tujuan penelitian. Informan ditentukan secara sengaja oleh peneliti karena informan adalah orang yang dapat memberikan keterangan atau informasi mengenai masalah yang sedang diteliti dan dapat berperan sebagai narasumber selama proses penelitian (Mantra, 2004:86).

Informan atau audiens yang dipilih dalam penelitian ini adalah orang-orang yang paling banyak mengetahui dan terlibat langsung dalam implementasi kebijakan pendidikan inklusif di Kabupaten Banyuwangi. Para informan tersebut meliputi : (1) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi; (2) Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Pendidikan Inklusif Kabupaten Banyuwangi yang dijabat oleh Kepala Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi; (3) Kepala SDN 3 Karangrejo; (4) Guru GPK di SDN 3 Karangrejo;

(5) Siswa ABK di SDN 3 Karangrejo; (6) Orang tua ABK di SDN 3 Karangrejo; dan (7) Masyarakat di sekitar SDN 3 Karangrejo.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Peneliti dalam kebanyakan penelitian kualitatif mengumpulkan beragam jenis data dan memanfaatkan waktu seefektif mungkin untuk mengumpulkan informasi di lokasi penelitian. Empat jenis strategi yang digunakan adalah observasi kualitatif, wawancara kualitatif, pengumpulan dokumen-dokumen kualitatif serta materi audio dan visual (Creswell, 2010:267). Sementara Yin (2014:103) menyebutkan bahwa ada 6 (enam) sumber bukti yang dapat dijadikan fokus bagi pengumpulan data, yaitu : dokumentasi, rekaman arsip, wawancara, observasi langsung, observasi pemeran dan perangkat fisik.

3.4.1 Dokumentasi

Beberapa pendekatan pengumpulan data kualitatif melalui dokumentasi, menurut Creswell (2010:272) bisa dilakukan dengan cara : mendokumentasikan buku harian selama penelitian, meminta buku harian atau *diary* dari partisipan (informan) selama penelitian, mengumpulkan surat pribadi dari partisipan (informan), menganalisis dokumen publik (seperti memo resmi, catatan-catatan resmi, atau arsip-arsip lainnya), menganalisis autobiografi atau biografi, meminta foto partisipan (informan) atau merekam suara mereka dengan videotape, audit-audit dan rekaman medis.

3.4.2 Rekaman Arsip

Menurut Yin (2014:107-108) rekaman arsip bisa merupakan hal yang relevan dan dapat digunakan bersama-sama dengan sumber-sumber informasi yang lain. Rekaman tersebut pada beberapa penelitian begitu penting sehingga bisa menjadi obyek perolehan kembali dan analisis yang luas. Sumber-sumber arsip dapat menghasilkan informasi kualitatif maupun kuantitatif. Data numerikal (informasi kuantitatif) sering relevan dan tersedia, demikian juga dengan data nonnumerikal (informasi kualitatif).

3.4.3 Wawancara

Salah satu sumber informasi yang sangat penting ialah wawancara. Bungin (2005:67) mengemukakan wawancara mendalam dimaksudkan untuk memburu “tabel hidup” yang terhampar dalam kenyataan sehari-hari di masyarakat. Wawancara digunakan dalam rangka memperoleh data informasi verbal secara langsung dari para informan, yaitu (1) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi; (2) Ketua Kelompok Kerja (Pokja)

Pendidikan Inklusif Kabupaten Banyuwangi yang dijabat oleh Kepala Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi; (3) Kepala SDN 3 Karangrejo; (4) Guru GPK di SDN 3 Karangrejo; (5) Siswa ABK di SDN 3 Karangrejo; (6) Orang tua ABK di SDN 3 Karangrejo; dan (7) Masyarakat di sekitar SDN 3 Karangrejo.

Moleong (2006:186) menambahkan bahwa wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara mendalam (*in-dept interview*). Wawancara mendalam (*in-dept interview*) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara.

Yin (2014:108) menjelaskan bahwa wawancara yang paling umum digunakan adalah tipe *open-ended*, dimana peneliti dapat bertanya kepada informan kunci tentang fakta-fakta di samping opini mereka mengenai kasus yang diteliti. Pada beberapa situasi, peneliti bahkan bisa meminta informan untuk mengetengahkan pendapatnya sendiri yang bisa digunakan sebagai dasar penelitian selanjutnya. Informan tersebut tak hanya bisa memberi keterangan tentang sesuatu kepada peneliti tetapi juga bisa memberi saran tentang sumber-sumber bukti lain yang mendukung serta menciptakan akses terhadap sumber yang bersangkutan.

Creswell (2010:272) selanjutnya menambahkan beberapa pendekatan pengumpulan data kualitatif melalui wawancara yaitu :

- Melaksanakan wawancara tidak-terstruktur dan terbuka, sambil mencatat hal-hal penting;
- Melaksanakan wawancara tidak-terstruktur dan terbuka, sambil merekamnya dengan audiotape, lalu mentranskripnya;
- Melaksanakan wawancara semi-struktur, sambil merekamnya dengan audiotape, lalu mentranskripnya;
- Melaksanakan wawancara *focus group*, sambil merekamnya dengan audiotape, lalu mentranskripnya;
- Melaksanakan jenis wawancara yang berbeda sekaligus : melalui email, dengan berhadap-hadapan langsung, wawancara *focus group*, wawancara *focus group online*, dan wawancara lewat telepon.

3.4.4 Observasi Langsung

Menurut Fathoni (2006:104) observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Selanjutnya Black dan Champion dalam Pambudi (2012:63) menambahkan bahwa observasi adalah mengamati (*watching*) dan mendengar (*listening*) perilaku seseorang selama beberapa waktu tanpa melakukan manipulasi atau pengendalian, serta mencatat penemuan yang memungkinkan atau memenuhi syarat untuk digunakan ke dalam tingkat penafsiran analisis. Lebih lanjut dijelaskan pula bahwa observasi baru dapat dikatakan tepat pelaksanaannya apabila memenuhi ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Dapat menangkap keadaan (konteks) sosial alamiah tempat terjadinya perilaku.
- b. Dapat menangkap peristiwa yang berarti atau kejadian-kejadian yang mempengaruhi relasi sosial para partisipan
- c. Mampu menentukan realitas serta peraturan yang berasal dari falsafah atau pandangan masyarakat yang diamati.
- d. Mampu mengidentifikasi keteraturan (*regularities*) dan gejala-gejala yang berulang dalam kehidupan sosial dengan membandingkan dan melihat perbedaan dari data yang diperoleh dalam suatu studi dengan data studi dari keadaan (*setting*) lingkungan lainnya.

3.4.5 Observasi Partisipan

Yin (2014:114-115) menjelaskan bahwa observasi partisipan adalah suatu bentuk observasi khusus dimana peneliti tidak hanya menjadi pengamat yang pasif. Melalui observasi partisipan peneliti juga bisa mengambil berbagai peran dalam situasi tertentu dan berpartisipasi dalam peristiwa-peristiwa yang akan diteliti, sehingga bisa merasakan kemampuan untuk menyadari realitas dari sudut pandang “orang dalam” pada penelitian tersebut.

3.4.6 Perangkat Fisik

Sumber bukti yang terakhir adalah perangkat fisik, yaitu peralatan teknologi, alat atau instrumen, pekerjaan seni atau beberapa bukti fisik lainnya. Perangkat fisik mempunyai relevansi kurang potensial yang paling lazim. Namun demikian, bilamana relevan, perangkat tersebut bisa menjadi komponen penting dalam keseluruhan kasus bersangkutan (Yin, 2014:118).

Peneliti merekam informasi dari partisipan (informan) dengan menggunakan catatan tangan, dengan audiotape, atau dengan videotape. Akan tetapi, meskipun wawancara ini

direkam menggunakan audiotape, peneliti tetap direkomendasikan untuk tetap mencatat karena banyak kejadian hasil rekaman menjadi korup, rusak atau gagal. Jika *videotape* yang digunakan, peneliti juga harus tetap mengatur rencana selanjutnya untuk mentranskrip hasil rekaman *videotape* ini (Creswell, 2010:273).

3.5 Teknik Analisa Data

Di dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan bersamaan atau hampir bersamaan dengan pengumpulan data. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya. Menurut Bogdan dan Biklen dalam Moleong (2006:248), analisis data kualitatif adalah : Upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Penelitian ini menggunakan alat analisis data kualitatif yang dikemukakan oleh Miles, Huberman dan Saldana. Aktivitas dalam analisis data menurut Miles, Huberman dan Saldana (2014 ; 31-33), antara lain :

1. Kondensasi Data

Kondensasi data merujuk pada proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstrakkan, dan/atau mentransformasikan data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan-catatan lapangan yang tertulis, transkrip wawancara, dokumen-dokumen, dan materi-materi empiris lainnya. Melalui kondensasi data, kita membuat data lebih kuat.

2. Penyajian Data

Menyusun informasi dengan cara tertentu sehingga memungkinkan penarikan kesimpulan atau pengambilan data ini membantu untuk memahami peristiwa yang terjadi dan mengarah pada analisis atau tindakan lebih lanjut berdasarkan pemahaman.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Meliputi makna yang disederhanakan, disajikan dalam pengujian data dengan cara mencatat keteraturan pola penjelasan secara logis dan metodologi, konfigurasi yang memungkinkan prediksi hubungan sebab akibat melalui hukum empiris. Sehingga data dapat diuji alasan atau keterpercayaannya, kekuatannya dan *confirmability* validitasnya.

3.6 Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data yang diperoleh dari lapangan diperiksa melalui kriteria dan teknik tertentu. Maka dalam menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan data. Sanafiah (1993:56) menyatakan bahwa pelaksanaan teknik pemeriksaan data yang dapat dilakukan adalah diskusi dengan teman sejawat dengan cara membicarakan hasil yang telah didapat dari penelitian yang telah dilaksanakan, kemudian dilakukan triangulasi yaitu membandingkan hasil observasi dan wawancara tentang pembelajaran inklusif, dan terakhir adalah dengan audit oleh dosen pembimbing.

Menurut Faisal (1990:31), untuk melihat keabsahan data diperlukan standar khusus yang sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif. Pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan standar kredibilitas dengan cara triangulasi. Standar kredibilitas diperlukan supaya hasil penelitian kualitatif dapat dipercaya oleh para pembaca, dan juga dapat disetujui kebenarannya oleh partisipan yang diteliti.

Standar kredibilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan standar kredibilitas dengan cara triangulasi. Moleong (2006:330) menjelaskan bahwa triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain, diluar data itu, untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Denzin dalam Moleong (2006:330-331) membedakan tiga macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan, yaitu :

1. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal itu dapat dicapai dengan jalan : (1) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara; (2) membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi; (3) membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu; (4) membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang pemerintahan, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi; (5) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.
2. Pada triangulasi dengan metode, terdapat dua strategi, yaitu : (1) pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data, dan (2) pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.
3. Triangulasi dengan teori, menurut Lincoln dan Guba dalam Moleong (2006:331) berdasarkan anggapan bahwa fakta tidak dapat diperiksa derajat kepercayaannya dengan

satu atau lebih teori. Sementara di sisi lain, Patton dalam Moleong (2006:331) berpendapat berbeda, bahwa hal itu dapat dilaksanakan dan dinamakan penjelasan banding (*rival explanation*). Dalam hal ini, jika analisis telah menguraikan pola, hubungan dan menyertakan penjelasan yang muncul dari analisis, maka penting sekali untuk mencari tema atau penjelasan pembandingan.

Triangulasi adalah cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi sewaktu mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan. Dengan kata lain bahwa dengan triangulasi, peneliti dapat *recheck* temuan dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode atau teori.

Dalam penelitian ini, pada tahap triangulasi, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber data dan teori. Dengan triangulasi sumber data, peneliti akan memadukan antara hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan triangulasi teori akan digunakan dalam bab selanjutnya untuk menganalisis hasil temuan lapangan dengan memadukan hasil penelitian dengan teori yang dipergunakan dalam Bab II.

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan yang dikemukakan di atas, selanjutnya bisa disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

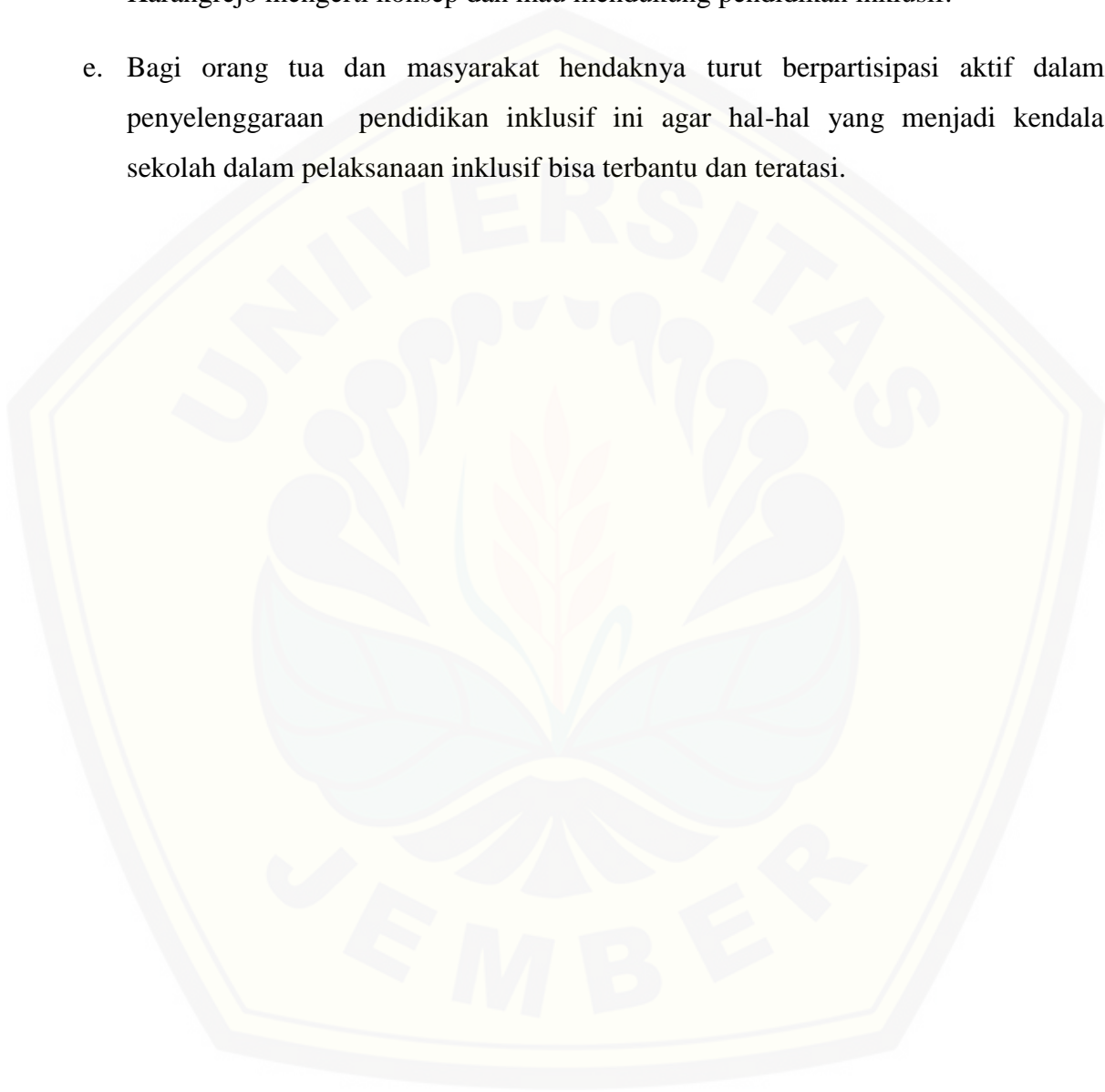
- a. Pendidikan inklusif sebagai salah satu kebijakan di bidang pendidikan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi sangat memerlukan dukungan dari semua pihak yang terkait. Kebijakan pendidikan inklusif ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang besar dalam mewujudkan kesetaraan di bidang pendidikan bagi semua warga negara, tanpa memandang kelainan, suku, ras, agama maupun karakteristik lainnya.
- b. Berdasarkan hasil pengamatan, implementasi pendidikan inklusif di SDN 3 Karangrejo sudah baik meskipun belum maksimal. Dari segi dukungan administrasi sekolah dan kondisi di lingkungan sekitar sekolah serta dukungan masyarakat sudah berjalan dengan baik. Akan tetapi segi kuantitas dan kompetensi guru serta GPK harus terus ditingkatkan.
- c. Kendala yang dihadapi dalam implementasi pendidikan inklusif di SDN 3 Karangrejo meliputi : pembiayaan pendidikan, sarana dan prasarana serta kurangnya tenaga Guru Pembimbing Khusus (GPK).

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas disarankan agar :

- a. Dinas Pendidikan kabupaten Banyuwangi selaku pemegang kebijakan lebih mengawasi dan memperhatikan jalannya pendidikan inklusif di setiap sekolah agar kendala-kendala yang dihadapi sekolah seperti biaya dan kekurangan tenaga GPK dapat teratasi;
- b. Bagi kepala sekolah agar lebih giat mengelola penyelenggaraan pendidikan inklusif dari sisi kebijakan, administrasi, sarana dan prasarana, kurikulum dan aspek lainnya yang mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif agar berjalan dengan lebih maksimal;

- c. Bagi GPK untuk lebih sering memperhatikan pelaksanaan pendidikan inklusif, dengan terus menerus melakukan sosialisasi di lingkungan sekolah, orang tua dan masyarakat sekitar agar konsep inklusif lebih dipahami oleh semua orang.
- d. Bagi para guru regular agar senantiasa meningkatkan pengetahuan dan pemahamannya mengenai pendidikan inklusif agar seluruh guru di SDN 3 Karangrejo mengerti konsep dan mau mendukung pendidikan inklusif.
- e. Bagi orang tua dan masyarakat hendaknya turut berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif ini agar hal-hal yang menjadi kendala sekolah dalam pelaksanaan inklusif bisa terbantu dan teratasi.



DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung : CV. Alfabeta.
- Anderson, James E. 2003. *Public Policymaking : An Introduction. Fifth Edition*. Boston : Houghton Mifflin Company.
- Arikunto, Suharsimi. 2005. *Manajemen Penelitian*. Jakarta : PT. Asdi Mahasatya.
- Bungin, Burhan. 2005. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada.
- Creswell, John W. 2010. *Research Design : Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2007. *Prosedur Operasional Standar Pendidikan Inklusif*. Jakarta : Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa.
- Dunn, William N. 1990. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Edisi Kedua*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Edwards III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington DC : Congressional Quarterly Press.
- Faisal, S. 1990. *Penelitian Kualitatif : Dasar-dasar dan Aplikasi*. Malang : Yayasan Asih Asah Asuh Malang (YA3 Malang).
- Fathoni, Abdurrahmat. 2006. *Metodologi Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Grindle, Merilee S., (ed). 1980. *Politics and A Policy Implementation in The Third World*. New Jersey : Princetown University Press.
- Hasyim, Y. 2013. Pendidikan Inklusif di SMK Negeri 2 Malang. *Jurnal Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan*, Volume 1, Nomor 2, Juli 2013 :112-121. ISSN : 2337-7623.
- Islamy, M. Irfan.1997. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Islamy, M. Irfan. 2003. *Metodologi Penelitian Administrasi*. Malang : Universitas Negeri Malang.
- Keban, Yeremias,T. 2004.*Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta : Gava Media.
- Mantra, I.B. 2004.*Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial*.Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Marti, A.D. 2012. Pendidikan Inklusif di sekolah Dasar Kota Padang. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Khusus*. Volume 1 Nomor 3 September 2012.
- Mazmanian, Daniel A. dan Sabatier, Paul A. 1983.*Implementation and Public Policy*.USA : Scott, Foresman and Company.

- Miles, Matthew B. A. Michael Huberman and Jhonny Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Third Edition*. Sage Publication, Inc.
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya Bandung.
- Mudjito, Harizal dan Elfindri. 2013. *Pendidikan Inklusif : Konsepsi dan Penerapan*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Mustopadidjaja, AR. 2002. *Format Bernegara Menuju Masyarakat Madani*. Jakarta :LAN.
- Mustopadidjaja, AR. 2003. *Manajemen Proses Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kinerja*. Jakarta : LAN.
- Pambudi, P.K.S. 2012. *Implementasi Pendidikan Inklusi bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di Sekolah Menengah Atas (SMA) : (Studi Kasus di Sekolah Inklusi SMA Negeri 10 Surabaya)*. Jember : Universitas Negeri Jember (Skripsi).
- Putra, Fadilah. 2003. *Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan Publik : Perubahan dan Inovasi Kebijakan Publik dalam Ruang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Prastiyono. 2013. Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif (Studi di Sekolah Galuh Handayani Surabaya. *DIA : Jurnal Administrasi Publik*. Juni 2013, Vol. 11, No.1, Hal.117-128.
- Sanafiah. 1993. *Penelitian Kualitatif*. Malang : Universitas Brawijaya.
- Satori, Djam'an dan Aan Komariah. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : CV. Alfabeta.
- Sudarto, Zaini. 2016. Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi. *Jurnal Pendidikan*. ISSN 2527-6891. Vol. I No. 1, 2016. Dipublikasikan oleh Program Studi Pendidikan Luar Biasa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang.
- Suharto, E. 2008. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung : PT. Rafika Aditama.
- Sulistiyadi, H.K. 2014. Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Layanan Pendidikan Inklusif di Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*. ISSN 2303-341X. Vol. 2 No. 1, Januari 2014.
- Sumanto. 1995. *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan : Aplikasi Metode Kuantitatif dan Statistika dalam Penelitian*. Yogyakarta : Andi Offset.
- Suryabrata, Sumadi. 2000. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada.
- Suyanto dan Mudjito, AK. 2012. *Masa Depan Pendidikan Inklusif*. Jakarta :Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Van Meter, Donald S. dan Van Horn, Carl E. 1975. *The Policy Implementation Process : A Conceptual Framework in Administration & Society*. London : Sage Publication.
- Wahab, Solichin Abdul. 2005. *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.

- Wahab, Solichin Abdul. 2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang : UMM Press.
- Wati, E. 2014. Manajemen Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar Negeri 32 Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Didaktika : Media Ilmiah Pendidikan dan Pengajaran*. ISSN 1411-612x.Vol. XIV No. 2, Februari 2014. Dipublikasikan oleh *Instructional Development Center*. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry.
- Yin, Robert K. 2014. *Studi Kasus : Desain & Metode*. Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Provinsi Jawa Timur.

Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 68 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Kabupaten Banyuwangi.

Surat Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 188.261/KEP/429.011/2014 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pendidikan Inklusif Kabupaten Banyuwangi.

Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi Nomor : 188/2563/429.101/2014 tentang Penetapan Sekolah Model (Piloting) Penyelenggara Pendidikan Inklusif Kabupaten Banyuwangi.

Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi Nomor : 188/2565/429.101/2014 tentang Penetapan Sekolah Luar Biasa (SLB) sebagai Pusat Sumber bagi Sekolah Model dan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif di Kabupaten Banyuwangi.

Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi Nomor : 188/2566/429.101/2014 tentang Penetapan Guru Pembimbing Khusus (GPK) Sekolah Penyelenggara Pendidikan Khusus Kabupaten Banyuwangi.

Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi Nomor : 188/2567/429.101/2014 tentang Penetapan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif Kabupaten Banyuwangi.

Lampiran



No.	Nama Sekolah	Jumlah ABK	Jenis Ketunaan										
			A	B	C	C1	D	D1	E	F	G	H	Gifted
47	SDN 1 Sidowangi	13			12		1						
48	SDN 2 Sidowangi	20			20								
49	SDN 5 Alasbuluh	16			16								
50	SDN 4 Watukebo	10			10								
51	SDN 3 Bangsring	16			15	1							
52	SDN 2 Watukebo	26			26								
53	SDN 1 Bangsring	15				2	2					11	
54	SDN 6 Watukebo	6		1	5								
55	SDN 1 Wongsorejo	20			17		3						
56	SDN Pengantigan Bwi.	12			9	3							
57	SDN 7 Kembiritan	8										8	
58	SDN 1 Genteng Wetan	15										15	
59	SDN 6 Sumbergondo	2										2	
60	SDN 2 Bumiharjo	2										2	
61	SDN 5 Genteng	6			2		1					3	
62	SDN 7 Genteng	6										6	
63	SD Muhammadiyah 9 Genteng	7										7	
64	SDN 4 GentengWetan	2										2	
65	SDN 10 Temurejo	6			1							5	
66	SDN 2 Setail	4										4	
67	SDN 4 Bagorejo	18										18	
68	SDN 1 Sambimulyo	22										22	
69	SDN 1 Sukorejo	7			2							5	
70	SDN 3 Gombengsari	10										10	
71	SMPN 3 Banyuwangi	7		1	2		3					1	
72	SMPN 5 Banyuwangi	14	1									5	8
73	SMP Muhammadiyah 3 Banyuwangi	11	2	1			1					7	
74	SMPN 1 Giri	12					3			1	1	7	
75	SMPN 1 Licin	9	3				1					5	
76	SMPN 1 Kalipuro	4					1					3	
77	SMPN 1 Kabat	18	1				1					16	
78	SMPN 2 Rogojampi	18	2	5			1		2			8	
79	SMPN 1 Glenmore	3	2				1						
80	SMPN 1 Muncar	14		3			1		1	1		8	
81	SMPN 1 Siliragung	6						1	3			2	
82	SMPN 1 Cluring	6										6	
83	SMPN 2 Gambiran	5										5	
84	SMPN 2 Srono	9										9	
85	SMPN 1 Songgon	16	3				2		3			8	
86	SMPN 1 Genteng	2										2	
87	SMPN 1 Tegalsari	1										1	
88	SMPN 1 Kalibaru	6		1			5						
89	SMPN 1 Srono	2	1				1						
90	SMPN 1 Bangorejo	6										6	
91	SMPN 1 Sempu	2					1		1				
92	SMPN 1 Wongsorejo	25	1							1		23	
93	SMPK Santo AgustinusPurwoharjo	3								1		2	

No.	Nama Sekolah	Jumlah ABK	Jenis Ketunaan											
			A	B	C	C1	D	D1	E	F	G	H	Gifted	
94	SMAN 1 Glagah	16	2											14
95	SMAN 1 Banyuwangi	6											6	
96	SMAN 1 Wongsorejo	8		1									7	
97	SMAN 1 Rogojampi	2											2	
98	SMAN Darussholah Singojuruh	8	1		6					1				
99	SMAN 1 Purwoharjo	4											4	
100	SMAN 1 Bangorejo	5											5	
101	SMAN 1 Genteng	8											8	
102	SMAN 1 Pesanggaran	5	5											
103	SMAN 1 Muncar	5	3		1								1	
104	SMAN 1 Cluring	5											5	
105	SMAN 1 Glenmore	1						1						
JUMLAH		1.237	35	27	278	24	54	3	36	30	6	711	22	

- A : Tunanetra,
 B : Tunarungu, Tunawicara,
 C : Tunagrahita Ringan (IQ = 50-70),
 C1 : Tunagrahita Sedang (IQ = 25-50),
 D : Tunadaksa Ringan,
 D1 : Tunadaksa Sedang,
 E : Tunalaras (disruptive), HIV AIDS & Narkoba,
 F : Autis dan Sindroma Asperger,
 G : Tunaganda,
 H : Kesulitan Belajar / Lambat Belajar (antara lain : Hyperaktif, ADD/ ADHD, Dysgraphia/ Tulis, Dyslexia/Baca, Dysphasia/Bicara, Dyscalculia/Hitung, Hyspraxia/ Motorik)
 GIFTED : Cerdas (Kelas Akselerasi).

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi (2016)

Lampiran 2

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

Pedoman Wawancara untuk Informan Kepala SDN 3 Karangrejo

1. LATAR BELAKANG INFORMAN

- a. Nama :
- b. Umur :
- c. Jabatan :
- d. Mata Pelajaran :
- e. Jenis Kelamin :
- f. Agama :
- g. Lama menjabat/mengajar :

2. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI OLEH ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS

- a. Menurut anda, masalah/persoalan apa yang sering dihadapi oleh anak berkebutuhan khusus di SDN 3 Karangrejo?
- b. Persoalan utama apa yang sedang dihadapi anak berkebutuhan khusus di SDN 3 Karangrejo saat ini yang terkait dengan prestasi, perkembangan pribadi dan sosialnya?
- c. Bagaimana kondisi anak berkebutuhan khusus di SDN 3 Karangrejo saat ini (yang terkait dengan prestasi, perkembangan pribadi dan sosialnya)?
- d. Menurut anda apakah segala kebutuhan dasar dalam pendidikan anak berkebutuhan khusus di SDN 3 Karangrejo sudah terpenuhi?
- e. Anak berkebutuhan khusus memiliki keterbatasan/gangguan fisik, mental, sosial atau emosional. Jenis keterbatasan/gangguan apa saja yang dimiliki oleh para anak berkebutuhan khusus di SDN 3 Karangrejo?

3. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN INKLUSIF BAGI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DI SDN 3 KARANGREJO

- a. Apakah anda mengetahui tentang pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus/sekolah inklusif? Dan sejauh mana anda mengetahuinya?
- b. Menurut anda, apakah anak berkebutuhan khusus mempunyai hak yang sama dalam memperoleh pendidikan? Mohon dijelaskan!
- c. Menurut anda, apakah keterbatasan fisik yang dimiliki anak berkebutuhan khusus dapat menjadi penghambat bagi mereka untuk memperoleh pendidikan di sekolah?
- d. Bagaimana tanggapan anda tentang anak berkebutuhan khusus yang bersekolah?
- e. Menurut anda, siapakah yang harus bertanggung jawab dalam pemenuhan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus?
- f. Sejak kapan awal pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus di SDN 3 Karangrejo? Bagaimana prosesnya?
- g. Bagaimana tanggapan saudara terhadap penunjukan SDN 3 Karangrejo sebagai salah satu *pilot school* di Kabupaten Banyuwangi?
- h. Bagaimana persepsi semua komponen sekolah terkait penyelenggaraan pendidikan inklusif? (mulai dari Kepala Sekolah, Guru, TU hingga orang tua siswa)
- i. Bagaimana penerimaan siswa normal terhadap keberadaan ABK di kelas mereka?
- j. Bagaimanakah proses awal sosialisasi pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus (sekolah inklusif) kepada guru-guru di SDN 3 Karangrejo dan ke masyarakat?
- k. Prinsip pendidikan inklusif adalah semua anak dapat belajar bersama-sama dan tergabung dalam sekolah dan kehidupan komunitas umum tanpa memandang

kesulitan ataupun perbedaan yang ada pada mereka. Menurut anda apakah prinsip ini diterapkan dalam pendidikan anak berkebutuhan khusus di SDN 3 Karangrejo?

- l. Tujuan utama dari sistem kegiatan pendidikan yang berlangsung di institusi persekolahan adalah mengembangkan dan membentuk potensi intelektual untuk menjadi cerdas secara terprogram dan koordinatif dengan materi pendidikan yang dipersiapkan untuk dilaksanakan secara metodis, sistematis, intensif, efektif dan efisien menurut ruang dan waktu yang telah ditentukan.
Menurut anda, sejauh ini apa yang telah dilakukan oleh SDN 3 Karangrejo dalam pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus terkait dengan tujuan utama tersebut?
- m. Berapa jumlah ABK di SDN 3 Karangrejo dari tahun ke tahun mulai awal diberlakukannya pendidikan inklusif?
- n. Bagaimana partisipasi orangtua siswa ABK terhadap proses belajar mengajar?
- o. Kinerja GPK sangat penting dipengaruhi oleh variabel : budaya organisasi, kepemimpinan Kepala Sekolah, kompetensi guru dan motivasi kerja. Menurut Saudara, bagaimana budaya organisasi yang berkembang di SDN 3 Karangrejo?
- p. Berapa jumlah GPK di SDN 3 Karangrejo? Apakah jumlah tersebut sudah cukup untuk mendampingi para ABK di SDN 3 Karangrejo?
- q. Apa saja latar belakang pendidikan para GPK di SDN 3 Karangrejo?
- r. Bagi GPK yang tidak berlatar belakang pendidikan khusus, bagaimana upaya yang dilakukan agar mereka mampu menjalankan perannya sebagai GPK yang baik?
- s. Bagaimana kompetensi para Guru yang ditunjuk menjadi GPK di SDN 3 Karangrejo?
- t. Bagaimana motivasi kerja para GPK di SDN 3 Karangrejo?
- u. Pihak sekolah memiliki kewenangan penuh untuk merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengevaluasi komponen-komponen pendidikan inklusif yang bersangkutan. Bagaimana SDN 3 Karangrejo melaksanakan kewenangan ini?
- v. Upaya ini harus didukung kemampuan manajerial Kepala Sekolah yang baik. Bagaimana upaya Kepala Sekolah untuk mendayagunakan sumber-sumber daya, baik personal maupun prasarana secara optimal?
- w. Bagaimana proses *assessment* yang dilakukan? Apakah dilakukan sendiri oleh GPK atau melibatkan tenaga ahli dari luar?
- x. Assessment ada 2 jenis, yaitu assessment fungsional dan assessment klinis. Di SDN 3 Karangrejo menggunakan jenis assessment yang mana?
- y. Apakah di SDN 3 Karangrejo terdapat RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran)? Kalau ada, siapa yang merancang RPP tersebut? (Guru Kelas/GPK/pihak lain)
- z. Apakah SDN 3 Karangrejo mempunyai perencanaan program pendidikan inklusif secara tertulis dalam bentuk program jangka panjang, jangka menengah atau jangka pendek?
- aa. Bagaimanakah perencanaan pendidikan yang dilakukan bagi anak berkebutuhan khusus di SDN 3 Karangrejo?
- bb. Apakah perencanaan tersebut melibatkan orang tua maupun tenaga ahli lain (seperti Guru SLB, Guru BK, Guru Mata Pelajaran, dokter dan lain-lain)?
- cc. Bagaimanakah dengan pengelolaan kegiatan pembelajaran di SDN 3 Karangrejo (seperti merumuskan tujuan pembelajaran, metode mengajar)?
- dd. Kurikulum yang digunakan bagi anak berkebutuhan khusus ada 3 jenis, yaitu kurikulum umum (reguler), kurikulum modifikasi dan kurikulum yang diindividualisasi. Jenis kurikulum manakah yang digunakan di SDN 3 Karangrejo?
- ee. Bagaimana SDN 3 Karangrejo mengembangkan kurikulum sesuai dengan tingkat, perkembangan dan karakteristik peserta didik agar lulusan memiliki kompetensi untuk bekal hidup (*life skill*)?

- ff. Apakah di SDN 3 Karangrejo ada Program Pengajaran Individual (PPI)? Siapa yang merancang PPI tersebut? (Guru Kelas/GPK/pihak lain)
 - gg. Program layanan pendidikan yang diberikan apakah bersifat layanan penuh/layanan pendidikan yang dimodifikasi/layanan pendidikan individualisasi?
 - hh. Untuk memperlancar pelaksanaan program layanan tersebut perlu didukung oleh unit khusus yang berfungsi sebagai *supporting program* dalam bentuk layanan remedial, layanan bimbingan, layanan latihan dan pengembangan, layanan assessment dan layanan observasi. Apakah layanan-layanan tersebut juga dimiliki oleh SDN 3 Karangrejo?
 - ii. Bagaimana peran para GPK untuk mewujudkan sistem Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan (PAKEM) di kelas?
 - jj. Dalam setiap program atau kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan, bagaimana tentang proses penilaiannya? Sistem penilaian apa yang digunakan di SDN 3 Karangrejo?
 - kk. Bagaimana Sistem Kenaikan Kelas yang digunakan di SDN 3 Karangrejo?
 - ll. Bagaimana sistem Laporan Hasil Belajar para ABK di SDN 3 Karangrejo?
 - mm. Apakah GPK di SDN 3 Karangrejo juga melakukan kegiatan bimbingan dan konseling bagi para ABK?
 - nn. Ujian Akhir Sekolah (UAS) para ABK apakah mengikuti standart SDLB atau SD? (Jika mengikuti standart SDLB secara administratif di bawah naungan Dispendik Provinsi, sedangkan jika mengikuti standart SD berarti secara administratif di bawah naungan Dispendik Kabupaten/Kota)
 - oo. Menurut anda, apakah terjadi peningkatan potensi yang dialami anak berkebutuhan khusus setelah mendapatkan pendidikan di SDN 3 Karangrejo?
 - pp. Sejauh ini bagaimana peningkatan potensi-potensi yang dialami anak berkebutuhan khusus?
 - qq. Prestasi apa saja yang pernah diraih oleh ABK di SDN 3 Karangrejo?
 - rr. Menurut anda, manfaat apa saja yang dapat diperoleh dan dilihat dari pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus yang dilakukan di SDN 3 Karangrejo?
4. KENDALA-KENDALA YANG DIHADAPI
- a. Menurut anda, kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh SDN 3 Karangrejo dalam pelaksanaan pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus?
 - b. Menurut anda, kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh guru-guru pengajar yang mengajar pada kelas yang terdapat anak berkebutuhan khusus?
 - c. Menurut anda, kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh anak berkebutuhan khusus dalam mengikuti kegiatan pembelajaran?
5. UPAYA MENGATASI KENDALA
- a. Upaya apa saja yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi oleh SDN 3 Karangrejo terkait pelaksanaan pendidikan inklusif?
 - b. Apakah ada pihak lain yang membantu SDN 3 Karangrejo dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi tersebut?
 - c. Pihak-pihak mana saja yang membantu SDN 3 Karangrejo dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi tersebut?
 - d. Sejauh mana pihak-pihak tersebut membantu SDN 3 Karangrejo?
6. Saran, masukan dan informasi tambahan (bersifat bebas)

Lampiran 3

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

Pedoman Wawancara untuk Informan GPK SDN 3 Karangrejo

1. LATAR BELAKANG INFORMAN

- a. Nama :
- b. Umur :
- c. Jabatan :
- d. Mata Pelajaran :
- e. Jenis Kelamin :
- f. Agama :
- g. Lama mengajar :

2. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI OLEH ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS

- a. Menurut anda, masalah/persoalan apa yang sering dihadapi oleh anak berkebutuhan khusus di SDN 3 Karangrejo?
- b. Persoalan utama apa yang sedang dihadapi anak berkebutuhan khusus di SDN 3 Karangrejo saat ini yang terkait dengan prestasi, perkembangan pribadi dan sosialnya?
- c. Bagaimana kondisi anak berkebutuhan khusus di SDN 3 Karangrejo saat ini (yang terkait dengan prestasi, perkembangan pribadi dan sosialnya)?
- d. Menurut anda apakah segala kebutuhan dasar dalam pendidikan anak berkebutuhan khusus di SDN 3 Karangrejo sudah terpenuhi?
- e. Anak berkebutuhan khusus memiliki keterbatasan/gangguan fisik, mental, sosial atau emosional. Jenis keterbatasan/gangguan apa saja yang dimiliki oleh para anak berkebutuhan khusus di SDN 3 Karangrejo?

3. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN INKLUSIF BAGI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DI SDN 3 KARANGREJO

- a. Apakah anda mengetahui tentang pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus/sekolah inklusif? Dan sejauh mana anda mengetahuinya?
- b. Menurut anda, apakah anak berkebutuhan khusus mempunyai hak yang sama dalam memperoleh pendidikan? Mohon dijelaskan!
- c. Menurut anda, apakah keterbatasan fisik yang dimiliki anak berkebutuhan khusus dapat menjadi penghambat bagi mereka untuk memperoleh pendidikan di sekolah?
- d. Bagaimana tanggapan anda tentang anak berkebutuhan khusus yang bersekolah?
- e. Menurut anda, siapakah yang harus bertanggung jawab dalam pemenuhan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus?
- f. Sejak kapan awal pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus di SDN 3 Karangrejo? Bagaimana prosesnya?
- g. Bagaimana tanggapan saudara terhadap penunjukan SDN 3 Karangrejo sebagai salah satu *pilot school* di Kabupaten Banyuwangi?
- h. Bagaimana persepsi semua komponen sekolah terkait penyelenggaraan pendidikan inklusif? (mulai dari Kepala Sekolah, Guru, TU hingga orang tua siswa)
- i. Bagaimana penerimaan siswa normal terhadap keberadaan ABK di kelas mereka?
- j. Bagaimanakah proses awal sosialisasi pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus (sekolah inklusif) kepada guru-guru di SDN 3 Karangrejo dan ke masyarakat?
- k. Prinsip pendidikan inklusif adalah semua anak dapat belajar bersama-sama dan tergabung dalam sekolah dan kehidupan komunitas umum tanpa memandang

kesulitan ataupun perbedaan yang ada pada mereka. Menurut anda apakah prinsip ini telah diterapkan dalam pendidikan anak berkebutuhan khusus di SDN 3 Karangrejo?

- l. Tujuan utama dari sistem kegiatan pendidikan yang berlangsung di institusi persekolahan adalah mengembangkan dan membentuk potensi intelektual untuk menjadi cerdas secara terprogram dan koordinatif dengan materi pendidikan yang dipersiapkan untuk dilaksanakan secara metodis, sistematis, intensif, efektif dan efisien menurut ruang dan waktu yang telah ditentukan.
Menurut anda, sejauh ini apa yang telah dilakukan oleh SDN 3 Karangrejo dalam pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus terkait dengan tujuan utama tersebut?
- m. Berapa jumlah GPK di SDN 3 Karangrejo? Apakah jumlah tersebut sudah cukup untuk mendampingi para ABK di SDN 3 Karangrejo?
- n. Apakah GPK yang ada saat ini merupakan guru asli dari SDN 3 Karangrejo atukah pindahan dari sekolah lain untuk mencukupi kebutuhan GPK di SDN 3 Karangrejo?
- o. Apa saja latar belakang pendidikan para GPK di SDN 3 Karangrejo?
- p. Bagaimana kompetensi para Guru yang ditunjuk menjadi GPK di SDN 3 Karangrejo?
- q. Bagi GPK yang tidak berlatar belakang pendidikan khusus, bagaimana upaya yang dilakukan agar mampu menjalankan perannya sebagai GPK yang baik?
- r. Apakah para GPK pernah mengikuti diklat khusus GPK atau diklat terkait lainnya?
- s. Apakah peran ibu/bapak hanya sebagai GPK saja atau juga memiliki peran lain sebagai Guru Kelas / Guru Mata Pelajaran?
- t. Menurut anda, apakah jumlah GPK di SDN 3 Karangrejo sudah mencukupi kebutuhan? Jika belum, berapa jumlah idealnya?
- u. Apakah sebagai GPK, ibu/bapak menyusun instrumen dan melaksanakan *assessment* pendidikan bagi para siswa ABK? Jika iya, apakah disusun dan dilaksanakan sendiri oleh GPK, atau melibatkan Guru Kelas/Guru Mata Pelajaran/pihak profesional lain?
- v. *Assessment* ada 2 jenis, yaitu *assessment* fungsional dan *assessment* klinis. Di SDN 3 Karangrejo menggunakan jenis *assessment* yang mana?
- w. Berapa jumlah ABK di SDN 3 Karangrejo dari tahun ke tahun mulai awal diberlakukannya pendidikan inklusif?
- x. Bagaimana partisipasi orangtua siswa ABK terhadap proses belajar mengajar?
- y. Apakah terjalin kerjasama yang baik antara guru, sekolah dan orang tua peserta didik, dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian kemajuan belajar para siswa ABK?
- z. Pihak sekolah memiliki kewenangan penuh untuk merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengevaluasi komponen-komponen pendidikan inklusif yang bersangkutan. Bagaimana SDN 3 Karangrejo melaksanakan kewenangan ini?
- aa. Upaya ini harus didukung kemampuan manajerial Kepala Sekolah yang baik. Menurut anda, bagaimana upaya Kepala Sekolah untuk mendayagunakan sumber-sumber daya, baik personal maupun prasarana secara optimal agar implementasi kebijakan pendidikan inklusif ini bisa berjalan sesuai harapan?
- bb. Kinerja GPK sangat penting dipengaruhi oleh variabel : budaya organisasi, kepemimpinan Kepala Sekolah, kompetensi guru dan motivasi kerja. Menurut Saudara, bagaimana budaya organisasi yang berkembang di SDN 3 Karangrejo?
- cc. Bagaimana motivasi kerja para GPK di SDN 3 Karangrejo?

- dd. Apakah di SDN 3 Karangrejo terdapat RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran)? Kalau ada, siapa yang merancang RPP tersebut? (Guru Kelas/GPK/pihak lain)
- ee. Apakah SDN 3 Karangrejo mempunyai perencanaan program pendidikan inklusif secara tertulis dalam bentuk program jangka panjang, jangka menengah atau jangka pendek?
- ff. Bagaimanakah perencanaan pendidikan yang dilakukan bagi anak berkebutuhan khusus di SDN 3 Karangrejo?
- gg. Apakah perencanaan tersebut melibatkan orang tua maupun tenaga ahli lain (seperti Guru SLB, Guru BK, Guru Mata Pelajaran, dokter dan lain-lain)?
- hh. Bagaimanakah dengan pengelolaan kegiatan pembelajaran di SDN 3 Karangrejo (seperti merumuskan tujuan pembelajaran, metode mengajar)?
- ii. Kurikulum yang digunakan bagi anak berkebutuhan khusus ada 3 jenis, yaitu kurikulum umum (reguler), kurikulum modifikasi dan kurikulum yang diindividualisasi. Jenis kurikulum manakah yang digunakan di SDN 3 Karangrejo?
- jj. Bagaimana SDN 3 Karangrejo mengembangkan kurikulum sesuai dengan tingkat, perkembangan dan karakteristik peserta didik agar lulusan memiliki kompetensi untuk bekal hidup (*life skill*)?
- kk. Apakah di SDN 3 Karangrejo ada Program Pengajaran Individual (PPI)? Siapa yang merancang PPI tersebut? (Guru Kelas/GPK/pihak lain)
- ll. Program layanan pendidikan yang diberikan apakah bersifat layanan penuh/layanan pendidikan yang dimodifikasi/layanan pendidikan individualisasi?
- mm. Untuk memperlancar pelaksanaan program layanan tersebut perlu didukung oleh unit khusus yang berfungsi sebagai *supporting program* dalam bentuk layanan remedial, layanan bimbingan, layanan latihan dan pengembangan, layanan assessment dan layanan observasi. Apakah layanan-layanan tersebut juga dimiliki oleh SDN 3 Karangrejo?
- nn. Bagaimana peran para GPK untuk mewujudkan sistem Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan (PAKEM) di kelas?
- oo. Dalam setiap program atau kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan, bagaimana tentang proses penilaiannya? Sistem penilaian apa yang digunakan di SDN 3 Karangrejo?
- pp. Bagaimana Sistem Kenaikan Kelas yang digunakan di SDN 3 Karangrejo?
- qq. Bagaimana sistem Laporan Hasil Belajar para ABK di SDN 3 Karangrejo?
- rr. Apakah GPK di SDN 3 Karangrejo juga melakukan kegiatan bimbingan dan konseling bagi para ABK?
- ss. Ujian Akhir Sekolah (UAS) para ABK apakah mengikuti standart SDLB atau SD? (Jika mengikuti standart SDLB secara administratif di bawah naungan Dispendik Provinsi, sedangkan jika mengikuti standart SD berarti secara administratif di bawah naungan Dispendik Kabupaten/Kota)
- tt. Menurut anda, apakah terjadi peningkatan potensi yang dialami anak berkebutuhan khusus setelah mendapatkan pendidikan di SDN 3 Karangrejo?
- uu. Sejauh ini bagaimana peningkatan potensi-potensi yang dialami anak berkebutuhan khusus?
- vv. Prestasi apa saja yang pernah diraih oleh ABK di SDN 3 Karangrejo?
- ww. Menurut anda, manfaat apa saja yang dapat diperoleh dan dilihat dari pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus yang dilakukan di SDN 3 Karangrejo?
- xx. Adakah hal membanggakan yang saudara rasakan sejak menjadi GPK?
- yy. Sebagai guru GPK, adakah kompensasi yang pernah saudara terima dari pemerintah atau pihak-pihak lain yang peduli pada pendidikan inklusif? Jika ada, berupa apa dan berapa nilainya?

- zz. Menurut saudara, apakah semua itu sudah sesuai dengan segala pengorbanan saudara sebagai GPK? Jika belum sesuai bagaimana harapan saudara?
- aaa. Apa harapan, saran dan masukan saudara terkait pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif di Kabupaten Banyuwangi, khususnya di SDN 3 Karangrejo?

4. KENDALA-KENDALA YANG DIHADAPI

- a. Menurut anda, kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh SDN 3 Karangrejo dalam pelaksanaan pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus?
- b. Menurut anda, kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh guru-guru pengajar yang mengajar pada kelas yang terdapat anak berkebutuhan khusus?
- c. Menurut anda, kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh anak berkebutuhan khusus dalam mengikuti kegiatan pembelajaran?

5. UPAYA MENGATASI KENDALA

- a. Upaya apa saja yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi oleh SDN 3 Karangrejo terkait pelaksanaan pendidikan inklusif?
 - b. Apakah ada pihak lain yang membantu SDN 3 Karangrejo dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi tersebut?
 - c. Pihak-pihak mana saja yang membantu SDN 3 Karangrejo dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi tersebut?
 - d. Sejauh mana pihak-pihak tersebut membantu SDN 3 Karangrejo?
6. Saran, masukan dan informasi tambahan lainnya (bersifat bebas)

Lampiran 4.

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

Pedoman Wawancara untuk Informan Anak Berkebutuhan Khusus di SDN 3 Karangrejo

1. LATAR BELAKANG INFORMAN

- a. Nama :
- b. Umur :
- c. Kelas :
- d. Jenis Kelamin :
- e. Agama :
- f. Jenis Kebutuhan Khusus :

2. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI OLEH ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS

- a. Menurut kamu, masalah/persoalan apa yang sering kamu hadapi di SDN 3 Karangrejo?
- b. Persoalan utama apa yang sedang kamu hadapi di SDN 3 Karangrejo (yang terkait dengan prestasi, perkembangan pribadi dan sosialnya)?
- c. Bagaimana kondisi anak berkebutuhan khusus di SDN 3 Karangrejo saat ini yang terkait dengan prestasi, perkembangan diri pribadi dan interaksi sosial dengan teman-teman? Tolong dijelaskan!
- d. Menurut kamu, apakah segala kebutuhan dasar kamu dalam pendidikan anak berkebutuhan khusus di SDN 3 Karangrejo sudah terpenuhi? Tolong jelaskan pendapat kamu!

3. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN INKLUSIF BAGI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DI SDN 3 KARANGREJO

- a. Untuk apa kamu bersekolah?
- b. Apakah kamu mengetahui tentang pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus/sekolah inklusif? Dan sejauh mana kamu mengetahuinya?
- c. Bisa diceritakan nggak, bagaimana proses awal kamu bersekolah di SDN 3 Karangrejo?
- d. Bagaimana tanggapan kamu bersekolah di SDN 3 Karangrejo?
- e. Menurut kamu, sejauh ini bagaimana proses pelaksanaan pendidikan bagi ABK di SDN 3 Karangrejo?
- f. Menurut kamu bagaimana peran sekolah dalam pendidikan inklusif?
- g. Menurut kamu, bagaimana cara para guru-guru mengajar di kelas?
- h. Sejauh ini kamu paham nggak dengan apa yang diterangkan oleh guru-guru waktu pelajaran?
- i. Sejauh ini yang kamu rasakan, apakah terjadi peningkatan potensi nggak yang kamu rasakan selama mengikuti pendidikan inklusif di SDN 3 Karangrejo?
- j. Jika terjadi peningkatan, sejauh mana peningkatan potensi yang kamu alami tersebut?
- k. Menurut kamu, manfaat apa saja yang dapat anda peroleh dari pendidikan inklusif yang dilakukan di SDN 3 Karangrejo?

4. KENDALA-KENDALA YANG DIHADAPI

- a. Apakah selama kamu mengikuti kegiatan pembelajaran di SDN 3 Karangrejo terdapat kendala-kendala yang kamu hadapi? Tolong dong diceritakan?
- b.

5. UPAYA MENGATASI KENDALA

- a. Upaya apa saja yang telah kamu lakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut?
- b. Apakah ada pihak lain yang membantu kamu dalam mengatasi kendala-kendala tersebut?
- c. Pihak-pihak mana saja yang membantu kamu dalam mengatasi kendala-kendala yang kamu hadapi tersebut?
- d. Sejauh mana pihak-pihak tersebut membantu kamu?
- e. Apa harapan anda dari penyelenggaraan pendidikan bagi anak yang berkebutuhan khusus?

Saran, masukan dan informasi tambahan (bersifat bebas)

.....



Lampiran 5.

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

Pedoman Wawancara untuk Informan
Orang Tua Anak Berkebutuhan Khusus di SDN 3 Karangrejo

1. LATAR BELAKANG INFORMAN

- a. Nama :
- b. Umur :
- c. Jenis Kelamin :
- d. Alamat :
- e. Identitas Anak :
 - Nama :
 - Umur :
 - Kelas :
 - Jenis Kebutuhan Khusus :

2. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI OLEH ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS

- a. Menurut ibu/bapak, masalah/persoalan apa yang sering dihadapi di SDN 3 Karangrejo terkait dengan pendidikan inklusif?
- b. Persoalan utama apa yang sedang dihadapi para ABK di SDN 3 Karangrejo (yang terkait dengan prestasi, perkembangan pribadi dan sosialnya)?
- c. Bagaimana kondisi anak berkebutuhan khusus di SDN 3 Karangrejo saat ini yang terkait dengan prestasi, perkembangan diri pribadi dan interaksi sosial dengan teman-teman? Tolong dijelaskan!
- d. Menurut ibu/bapak, apakah segala kebutuhan para ABK dalam pendidikan inklusif di SDN 3 Karangrejo sudah terpenuhi? Tolong jelaskan pendapat anda!

3. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN INKLUSIF BAGI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DI SDN 3 KARANGREJO

- a. Untuk apa anda menyekolahkan putra/putri ibu/bapak?
- b. Mengapa memilih SDN 3 Karangrejo?
- c. Apakah ibu/bapak mengetahui tentang pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus/sekolah inklusif? Dan sejauh mana anda mengetahuinya?
- d. Mohon diceritakan, bagaimana proses awal putra/putri anda bersekolah di SDN 3 Karangrejo?
- e. Bagaimana tanggapan anda setelah putra putrinya bersekolah di SDN 3 Karangrejo?
- f. Menurut anda, sejauh ini bagaimana proses pelaksanaan pendidikan bagi ABK di SDN 3 Karangrejo?
- g. Menurut anda bagaimana peran sekolah dalam pendidikan inklusif?
- h. Menurut anda, bagaimana cara para guru-guru mengajar di kelas?
- i. Sejauh ini putra/putri saudara paham tidak dengan apa yang diterangkan oleh guru-guru waktu pelajaran?
- j. Sejauh ini, apakah terjadi peningkatan potensi yang anda rasakan selama putra/putri anda mengikuti pendidikan inklusif di SDN 3 Karangrejo?
- k. Jika terjadi peningkatan, sejauh mana peningkatan potensi yang putra/putri anda alami tersebut?
- l. Menurut anda, selain peningkatan potensi, manfaat lain apa yang dapat putra/putri anda peroleh dari pendidikan inklusif di SDN 3 Karangrejo?

4. KENDALA-KENDALA YANG DIHADAPI

- a. Apakah selama putra/putri ibu/bapak mengikuti kegiatan pembelajaran di SDN 3 Karangrejo terdapat kendala-kendala yang dihadapi? Mohon diceritakan?
- b. Apakah anda memiliki masalah dengan pelaksanaan pendidikan inklusif bagi putra/putri ibu/bapak di SDN 3 Karangrejo?

5. UPAYA MENGATASI KENDALA

- a. Upaya apa saja yang telah anda lakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut?
- b. Apakah ada pihak lain yang membantu anda dalam mengatasi kendala-kendala tersebut?
- c. Pihak-pihak mana saja yang membantu anda dalam mengatasi kendala-kendala tersebut?
- d. Sejauh mana pihak-pihak tersebut membantu anda?
- e. Apa harapan anda dari penyelenggaraan pendidikan bagi anak yang berkebutuhan khusus?

Saran, masukan dan informasi tambahan (bersifat bebas)



Lampiran 6

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

Pedoman Wawancara untuk Informan Ketua Pokja Inklusif

1. LATAR BELAKANG INFORMAN

- a. Nama :
- b. Umur :
- c. Jenis Kelamin :
- d. Agama :
- e. Jabatan :
- f. Lama menjabat :

2. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN INKLUSIF

- a. Apakah anda mengetahui tentang pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus/sekolah inklusif?
- b. Sejak kapan anda mengetahui tentang pendidikan inklusif? Dan sejauh mana anda mengetahuinya?
- c. Sepengetahuan saudara, sejak kapan awal pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus dilaksanakan di Kabupaten Banyuwangi? Bagaimana prosesnya?
- d. Menurut anda, bagaimana kebijakan pendidikan inklusif di Kabupaten Banyuwangi?
- e. Sejak kapan kebijakan pendidikan inklusif ini dikeluarkan dan dilaksanakan di Kabupaten Banyuwangi?
- f. Bagaimanakah proses sosialisasi awal pelaksanaan pendidikan inklusif di Kabupaten Banyuwangi?
- g. Bagaimana respon sekolah-sekolah tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif ini di sekolah mereka?
- h. Apakah kegiatan sosialisasi ini masih berlanjut hingga saat ini?
- i. Langkah-langkah apa saja yang telah diambil untuk mengawal pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif ini?
- j. Bagaimana latar belakang pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Inklusif di Kabupaten Banyuwangi?
- k. Siapa saja yang dilibatkan dalam Pokja Inklusif ini? (Susunan Organisasi Pokja Inklusif Kabupaten Banyuwangi)
- l. Sejauh ini, bagaimana peran Pokja Inklusif dalam menyukseskan pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif di Kabupaten Banyuwangi?
- m. Ada beberapa sekolah yang ditunjuk menjadi *Pilot School* pelaksanaan pendidikan inklusif. Apa alasan penunjukan beberapa sekolah menjadi *pilot school* pelaksanaan pendidikan inklusif?
- n. Pertimbangan apa sajakah yang digunakan untuk memilih sekolah-sekolah tersebut?
- o. Sekolah-sekolah mana sajakah yang telah ditunjuk menjadi *pilot school*?
- p. Bagaimana tanggapan saudara terhadap penunjukan SDN 3 Karangrejo sebagai salah satu *pilot school* di Kabupaten Banyuwangi?
- q. Apa kelebihan SDN 3 Karangrejo dibanding *pilot school* lainnya?
- r. Bagaimana pelaksanaan pendidikan inklusif di masing-masing *pilot school* tersebut? Apakah sudah sesuai dengan harapan?
- s. Ada berapa dan sekolah mana saja yang ditunjuk menjadi sekolah inklusif di Kabupaten Banyuwangi?
- t. Apakah ada penambahan dari tahun ke tahun jumlah sekolah inklusif di Banyuwangi?

- u. Berapa jumlah ABK di Kabupaten Banyuwangi dari tahun ke tahun? (Data per sekolah inklusif dan data di SLB dari tahun ke tahun)
- v. Berapa jumlah GPK di Kabupaten Banyuwangi dari tahun ke tahun? (Rincian per sekolah inklusif)
- w. Bagaimana kompetensi mereka?
- x. Bagi yang tidak memiliki latar belakang pendidikan khusus, bagaimana upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kompetensi mereka?
- y. Kompensasi apa sajakah yang diberikan oleh Pemerintah, baik pusat, provinsi maupun Kabupaten Banyuwangi, untuk memotivasi para GPK?
- z. Upaya peningkatan mutu pendidikan di sekolah inklusif perlu didukung kemampuan manajerial kepala sekolah. Selain peningkatan kompetensi bagi GPK, apakah juga ada upaya peningkatan kompetensi para kepala sekolah inklusif?
- aa. Pihak sekolah memiliki kewenangan penuh untuk merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengevaluasi komponen-komponen pendidikan inklusif yang bersangkutan. Bagaimana sekolah-sekolah inklusif di Kabupaten Banyuwangi melaksanakan kewenangan ini?
- bb. Bagaimana proses *assessment* yang dilakukan? Apakah dilakukan sendiri oleh GPK atau melibatkan tenaga ahli dari luar?
- cc. *Assessment* ada 2 jenis, yaitu *assessment* fungsional dan *assessment* klinis. Untuk sekolah-sekolah inklusif di Kabupaten Banyuwangi mereka menggunakan jenis *assessment* yang mana?
- dd. Apakah di sekolah-sekolah inklusif tersebut terdapat RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran)? Kalau ada, siapa yang merancang RPP tersebut? (Guru Kelas/GPK/pihak lain)
- ee. Apakah sekolah-sekolah inklusif di Kabupaten Banyuwangi mempunyai perencanaan program pendidikan inklusif secara tertulis dalam bentuk program jangka panjang, jangka menengah atau jangka pendek?
- ff. Bagaimanakah perencanaan pendidikan yang dilakukan bagi anak berkebutuhan khusus di sekolah-sekolah inklusif di Kabupaten Banyuwangi?
- gg. Apakah perencanaan tersebut melibatkan orang tua maupun tenaga ahli lain (seperti Guru SLB, Guru BK, Guru Mata Pelajaran, dokter dan lain-lain)?
- hh. Bagaimanakah dengan pengelolaan kegiatan pembelajaran di sekolah-sekolah inklusif tersebut (seperti perumusan tujuan pembelajaran, metode mengajar)?
- ii. Kurikulum yang digunakan bagi anak berkebutuhan khusus ada 3 jenis, yaitu kurikulum umum (reguler), kurikulum modifikasi dan kurikulum yang diindividualisasi. Jenis kurikulum manakah yang digunakan di sekolah-sekolah inklusif yang ada di Kabupaten Banyuwangi?
- jj. Bagaimana upaya sekolah-sekolah inklusif tersebut dalam mengembangkan kurikulum sesuai dengan tingkat, perkembangan dan karakteristik peserta didik agar lulusan memiliki kompetensi untuk bekal hidup (*life skill*)?
- kk. Apakah di sekolah-sekolah inklusif tersebut ada Program Pengajaran Individual (PPI)? Siapa yang merancang PPI tersebut? (Guru Kelas/GPK/pihak lain)
- ll. Program layanan pendidikan yang diberikan apakah bersifat layanan penuh/layanan pendidikan yang dimodifikasi/layanan pendidikan individualisasi?
- mm. Untuk memperlancar pelaksanaan program layanan tersebut perlu didukung oleh unit khusus yang berfungsi sebagai *supporting program* dalam bentuk layanan remedial, layanan bimbingan, layanan latihan dan pengembangan, layanan *assessment* dan layanan observasi. Apakah layanan-layanan tersebut juga dimiliki oleh sekolah-sekolah inklusif di Kabupaten Banyuwangi?

- nn. Dalam setiap program atau kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan, bagaimana tentang proses penilaiannya? Sistem penilaian apa yang digunakan di sekolah-sekolah inklusif di Kabupaten Banyuwangi?
- oo. Bagaimana Sistem Kenaikan Kelas yang digunakan di sekolah-sekolah inklusif di Kabupaten Banyuwangi?
- pp. Bagaimana sistem Laporan Hasil Belajar para ABK di sekolah-sekolah inklusif di Kabupaten Banyuwangi?
- qq. Apakah GPK di sekolah-sekolah inklusif di Kabupaten Banyuwangi juga melakukan kegiatan bimbingan dan konseling bagi para ABK?
- rr. Ujian Akhir Sekolah (UAS) para ABK apakah mengikuti standart SDLB atau SD? (Jika mengikuti standart SDLB secara administratif di bawah naungan Dispendik Provinsi, sedangkan jika mengikuti standart SD berarti secara administratif di bawah naungan Dispendik Kabupaten/Kota)
- ss. Menurut anda, apakah terjadi peningkatan potensi yang dialami anak berkebutuhan khusus setelah mendapatkan pendidikan di sekolah inklusif?
- tt. Sejauh ini bagaimana peningkatan potensi-potensi yang dialami anak berkebutuhan khusus di Kabupaten Banyuwangi?
- uu. Prestasi apa saja yang pernah diraih oleh ABK di Kabupaten Banyuwangi?
- vv. Menurut anda, manfaat apa saja yang dapat diperoleh dan dilihat dari pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus yang dilakukan di sekolah-sekolah inklusif di Kabupaten Banyuwangi?
- ww. Kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan untuk membangun sinergitas seluruh elemen pendukung implementasi pendidikan inklusif di Kabupaten Banyuwangi?
- xx. Sejauh ini bagaimana pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif di Kabupaten Banyuwangi?
- yy. Secara lebih detail, bagaimana pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolah-sekolah lain yang telah ditunjuk menjadi sekolah inklusif?
- zz. Bagaimana peran Sekolah Luar Biasa sebagai Pusat Sumber di Kabupaten Banyuwangi?
- aaa. Berapa Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Banyuwangi untuk tahun 2014 dan 2015?
- bbb. Bagaimana pengaruh adanya kebijakan pendidikan inklusif terhadap APK dan APM di Kabupaten Banyuwangi?
- ccc. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun kegagalan implementasi suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Menurut bapak bagaimana keempat faktor tersebut mempengaruhi implementasi pendidikan inklusif di Kabupaten Banyuwangi?
- ddd. Apakah ada juklak (petunjuk pelaksanaan) dan juknis (petunjuk teknis) terkait implementasi pendidikan inklusif di Kabupaten Banyuwangi?
- eee. Dalam hal komunikasi, ada 3 hal yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu : Transmisi (sebuah kebijakan yang akan diimplementasikan harus disalurkan para pejabat yang akan melaksanakannya), Kejelasan (*Clarity*) tujuan dan cara yang akan digunakan dalam sebuah kebijakan, serta Konsistensi (komunikasi yang jelas dan konsisten). Bagaimana kaitannya saat komunikasi berperan dalam implementasi kebijakan pendidikan inklusif di Kabupaten Banyuwangi?
- fff. Apakah ada media komunikasi khusus yang dimiliki oleh pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi pendidikan inklusif di Kabupaten Banyuwangi?
- ggg. Apakah antar pihak tersebut juga selalu intens melakukan komunikasi terkait beragam masalah dan upaya pemecahan bersama?

- hhh. Disposisi adalah sikap dan komitmen dari pelaksana terhadap kebijakan atau program yang harus mereka laksanakan agar mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Sejauh ini bagaimana peran Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi dalam implementasi kebijakan pendidikan inklusif ini?
- iii. Bagaimana wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terhadap pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif ini? (bisa dari sisi prioritas anggaran, beasiswa ABK, pemenuhan sarana prasarana atau wujud komitmen lainnya)
- jjj. Tiga unsur utama yang mempengaruhi kemampuan dan kemauan aparat pelaksana untuk melaksanakan kebijakan yaitu Kognisi (seberapa jauh pemahaman pelaksana terhadap kebijakan), arahan dan tanggapan pelaksana (bagaimana penerimaan, ketidakberpihakan maupun penolakan pelaksana) serta intensitas respon atau tanggapan pelaksana. Menurut saudara, bagaimana pemenuhan 3 unsur tersebut oleh para pelaksana kebijakan, mulai dari pelaksana level akar rumput (sekolah-sekolah inklusif) hingga pemerintah pusat?
- kkk. Sejauh ini bagaimana dukungan dari pemerintah, mulai dari pemerintah pusat hingga kabupaten terkait anggaran dan kecukupan sarana prasarana? (data numerik dari tahun ke tahun)
- lll. Selain dana, bantuan apa lagi yang pernah diberikan oleh pemerintah?
- mmm. Apakah ada mekanisme pelaporan secara periodik perihal implementasi kebijakan pendidikan inklusif ini kepada Bupati/Gubernur/Menteri Pendidikan?
- nnn. Adakah evaluasi secara periodik dari pemerintah pusat/provinsi/kabupaten terkait dengan implementasi kebijakan pendidikan inklusif ini?
- ooo. Adakah apresiasi dari pemerintah pusat/provinsi/kabupaten terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pendidikan inklusif ini? (mulai dari para GPK, sekolah-sekolah inklusif, para kepala sekolah inklusif, Pokja Inklusif)
- ppp. Tujuan utama dari sistem kegiatan pendidikan yang berlangsung di institusi persekolahan adalah mengembangkan dan membentuk potensi intelektual untuk menjadi cerdas secara terprogram dan koordinatif dengan materi pendidikan yang dipersiapkan untuk dilaksanakan secara metodis, sistematis, intensif, efektif dan efisien menurut ruang dan waktu yang telah ditentukan. Menurut anda, sejauh ini apa yang telah dilakukan oleh SDN 3 Karangrejo sudah sesuai dengan tujuan utama tersebut?
- qqq. Apakah ada konsep pengembangan atau penyempurnaan kebijakan pendidikan inklusif ke depan agar implementasinya semakin tepat sasaran dan bisa menyentuh semakin banyak anak berkebutuhan khusus?
3. KENDALA-KENDALA YANG DIHADAPI
- a. Menurut anda, kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh sekolah-sekolah inklusif di Kabupaten Banyuwangi dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif?
- b. Menurut anda, kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh SDN 3 Karangrejo sebagai salah satu *pilot school* dalam pelaksanaan pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus?
- c. Menurut anda, kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh guru-guru pengajar yang mengajar pada kelas yang terdapat anak berkebutuhan khusus?
- d. Menurut anda, kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh anak berkebutuhan khusus dalam mengikuti kegiatan pembelajaran?

4. UPAYA MENGATASI KENDALA

- a. Upaya apa saja yang telah, sedang dan akan dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi oleh sekolah-sekolah inklusif di Kabupaten Banyuwangi khususnya di SDN 3 Karangrejo terkait pelaksanaan pendidikan inklusif?
- b. Apakah ada pihak lain yang membantu dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi tersebut?
- c. Pihak-pihak mana saja yang membantu dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi tersebut?
- d. Sejauh mana pihak-pihak tersebut membantu implementasi kebijakan pendidikan inklusif?

Saran, masukan dan informasi tambahan (bersifat bebas)



Lampiran 7

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

Pedoman Wawancara untuk Informan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi

1. LATAR BELAKANG INFORMAN

- a. Nama :
- b. Umur :
- c. Jenis Kelamin :
- d. Agama :
- e. Jabatan :
- f. Lama menjabat :

2. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN INKLUSIF

- a. Apakah anda mengetahui tentang pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus/sekolah inklusif?
- b. Sejak kapan anda mengetahui tentang pendidikan inklusif? Dan sejauh mana anda mengetahuinya?
- c. Sepengetahuan saudara, sejak kapan awal pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus dilaksanakan di Kabupaten Banyuwangi? Bagaimana prosesnya?
- d. Menurut anda, bagaimana kebijakan pendidikan inklusif di Kabupaten Banyuwangi?
- e. Sejak kapan kebijakan pendidikan inklusif ini dikeluarkan dan dilaksanakan di Kabupaten Banyuwangi?
- f. Bagaimanakah proses sosialisasi awal pelaksanaan pendidikan inklusif di Kabupaten Banyuwangi?
- g. Bagaimana respon sekolah-sekolah tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif ini di sekolah mereka?
- h. Apakah kegiatan sosialisasi ini masih berlanjut hingga saat ini?
- i. Langkah-langkah apa saja yang telah diambil untuk mengawal pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif ini?
- j. Bagaimana latar belakang pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Inklusif di Kabupaten Banyuwangi?
- k. Siapa saja yang dilibatkan dalam Pokja Inklusif ini? (Susunan Organisasi Pokja Inklusif Kabupaten Banyuwangi)
- l. Sejauh ini, bagaimana peran Pokja Inklusif dalam menyukseskan pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif di Kabupaten Banyuwangi?
- m. Ada beberapa sekolah yang ditunjuk menjadi *Pilot School* pelaksanaan pendidikan inklusif. Apa alasan penunjukan beberapa sekolah menjadi *pilot school* pelaksanaan pendidikan inklusif?
- n. Pertimbangan apa sajakah yang digunakan untuk memilih sekolah-sekolah tersebut?
- o. Sekolah-sekolah mana sajakah yang telah ditunjuk menjadi *pilot school*?
- p. Bagaimana tanggapan saudara terhadap penunjukan SDN 3 Karangrejo sebagai salah satu *pilot school* di Kabupaten Banyuwangi?
- q. Apa kelebihan SDN 3 Karangrejo dibanding *pilot school* lainnya?
- r. Bagaimana pelaksanaan pendidikan inklusif di masing-masing *pilot school* tersebut? Apakah sudah sesuai dengan harapan?
- s. Ada berapa dan sekolah mana saja yang ditunjuk menjadi sekolah inklusif di Kabupaten Banyuwangi?
- t. Apakah ada penambahan dari tahun ke tahun jumlah sekolah inklusif di Banyuwangi?
- u. Berapa jumlah ABK di Kabupaten Banyuwangi dari tahun ke tahun? (Data per sekolah inklusif dan data di SLB dari tahun ke tahun)

- v. Berapa jumlah GPK di Kabupaten Banyuwangi dari tahun ke tahun? (Rincian per sekolah inklusif)
- w. Bagaimana kompetensi mereka?
- x. Bagi yang tidak memiliki latar belakang pendidikan khusus, bagaimana upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kompetensi mereka?
- y. Kompensasi apa sajakah yang diberikan oleh Pemerintah, baik pusat, provinsi maupun Kabupaten Banyuwangi, untuk memotivasi para GPK?
- z. Upaya peningkatan mutu pendidikan di sekolah inklusif perlu didukung kemampuan manajerial kepala sekolah. Selain peningkatan kompetensi bagi GPK, apakah juga ada upaya peningkatan kompetensi para kepala sekolah inklusif?
- aa. Pihak sekolah memiliki kewenangan penuh untuk merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengevaluasi komponen-komponen pendidikan inklusif yang bersangkutan. Bagaimana sekolah-sekolah inklusif di Kabupaten Banyuwangi melaksanakan kewenangan ini?
- bb. Bagaimana proses *assessment* yang dilakukan? Apakah dilakukan sendiri oleh GPK atau melibatkan tenaga ahli dari luar?
- cc. *Assessment* ada 2 jenis, yaitu *assessment* fungsional dan *assessment* klinis. Untuk sekolah-sekolah inklusif di Kabupaten Banyuwangi mereka menggunakan jenis *assessment* yang mana?
- dd. Apakah di sekolah-sekolah inklusif tersebut terdapat RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran)? Kalau ada, siapa yang merancang RPP tersebut? (Guru Kelas/GPK/pihak lain)
- ee. Apakah sekolah-sekolah inklusif di Kabupaten Banyuwangi mempunyai perencanaan program pendidikan inklusif secara tertulis dalam bentuk program jangka panjang, jangka menengah atau jangka pendek?
- ff. Bagaimanakah perencanaan pendidikan yang dilakukan bagi anak berkebutuhan khusus di sekolah-sekolah inklusif di Kabupaten Banyuwangi?
- gg. Apakah perencanaan tersebut melibatkan orang tua maupun tenaga ahli lain (seperti Guru SLB, Guru BK, Guru Mata Pelajaran, dokter dan lain-lain)?
- hh. Bagaimanakah dengan pengelolaan kegiatan pembelajaran di sekolah-sekolah inklusif tersebut (seperti perumusan tujuan pembelajaran, metode mengajar)?
- ii. Kurikulum yang digunakan bagi anak berkebutuhan khusus ada 3 jenis, yaitu kurikulum umum (reguler), kurikulum modifikasi dan kurikulum yang diindividualisasi. Jenis kurikulum manakah yang digunakan di sekolah-sekolah inklusif yang ada di Kabupaten Banyuwangi?
- jj. Bagaimana upaya sekolah-sekolah inklusif tersebut dalam mengembangkan kurikulum sesuai dengan tingkat, perkembangan dan karakteristik peserta didik agar lulusan memiliki kompetensi untuk bekal hidup (*life skill*)?
- kk. Apakah di sekolah-sekolah inklusif tersebut ada Program Pengajaran Individual (PPI)? Siapa yang merancang PPI tersebut? (Guru Kelas/GPK/pihak lain)
- ll. Program layanan pendidikan yang diberikan apakah bersifat layanan penuh/layanan pendidikan yang dimodifikasi/layanan pendidikan individualisasi?
- mm. Untuk memperlancar pelaksanaan program layanan tersebut perlu didukung oleh unit khusus yang berfungsi sebagai *supporting program* dalam bentuk layanan remedial, layanan bimbingan, layanan latihan dan pengembangan, layanan *assessment* dan layanan observasi. Apakah layanan-layanan tersebut juga dimiliki oleh sekolah-sekolah inklusif di Kabupaten Banyuwangi?
- nn. Dalam setiap program atau kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan, bagaimana tentang proses penilaiannya? Sistem penilaian apa yang digunakan di sekolah-sekolah inklusif di Kabupaten Banyuwangi?

- oo. Bagaimana Sistem Kenaikan Kelas yang digunakan di sekolah-sekolah inklusif di Kabupaten Banyuwangi?
- pp. Bagaimana sistem Laporan Hasil Belajar para ABK di sekolah-sekolah inklusif di Kabupaten Banyuwangi?
- qq. Apakah GPK di sekolah-sekolah inklusif di Kabupaten Banyuwangi juga melakukan kegiatan bimbingan dan konseling bagi para ABK?
- rr. Ujian Akhir Sekolah (UAS) para ABK apakah mengikuti standart SDLB atau SD? (Jika mengikuti standart SDLB secara administratif di bawah naungan Dispendik Provinsi, sedangkan jika mengikuti standart SD berarti secara administratif di bawah naungan Dispendik Kabupaten/Kota)
- ss. Menurut anda, apakah terjadi peningkatan potensi yang dialami anak berkebutuhan khusus setelah mendapatkan pendidikan di sekolah inklusif?
- tt. Sejauh ini bagaimana peningkatan potensi-potensi yang dialami anak berkebutuhan khusus di Kabupaten Banyuwangi?
- uu. Prestasi apa saja yang pernah diraih oleh ABK di Kabupaten Banyuwangi?
- vv. Menurut anda, manfaat apa saja yang dapat diperoleh dan dilihat dari pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus yang dilakukan di sekolah-sekolah inklusif di Kabupaten Banyuwangi?
- ww. Kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan untuk membangun sinergitas seluruh elemen pendukung implementasi pendidikan inklusif di Kabupaten Banyuwangi?
- xx. Sejauh ini bagaimana pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif di Kabupaten Banyuwangi?
- yy. Secara lebih detail, bagaimana pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolah-sekolah lain yang telah ditunjuk menjadi sekolah inklusif?
- zz. Bagaimana peran Sekolah Luar Biasa sebagai Pusat Sumber di Kabupaten Banyuwangi?
- aaa. Berapa Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Banyuwangi untuk tahun 2014 dan 2015?
- bbb. Bagaimana pengaruh adanya kebijakan pendidikan inklusif terhadap APK dan APM di Kabupaten Banyuwangi?
- ccc. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun kegagalan implementasi suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Menurut bapak bagaimana keempat faktor tersebut mempengaruhi implementasi pendidikan inklusif di Kabupaten Banyuwangi?
- ddd. Apakah ada juklak (petunjuk pelaksanaan) dan juknis (petunjuk teknis) terkait implementasi pendidikan inklusif di Kabupaten Banyuwangi?
- eee. Dalam hal komunikasi, ada 3 hal yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu : Transmisi (sebuah kebijakan yang akan diimplementasikan harus disalurkan para pejabat yang akan melaksanakannya), Kejelasan (*Clarity*) tujuan dan cara yang akan digunakan dalam sebuah kebijakan, serta Konsistensi (komunikasi yang jelas dan konsisten). Bagaimana kaitannya saat komunikasi berperan dalam implementasi kebijakan pendidikan inklusif di Kabupaten Banyuwangi?
- fff. Apakah ada media komunikasi khusus yang dimiliki oleh pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi pendidikan inklusif di Kabupaten Banyuwangi?
- ggg. Apakah antar pihak tersebut juga selalu intens melakukan komunikasi terkait beragam masalah dan upaya pemecahan bersama?
- hhh. Disposisi adalah sikap dan komitmen dari pelaksana terhadap kebijakan atau program yang harus mereka laksanakan agar mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Sejauh ini bagaimana peran Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi dalam implementasi kebijakan pendidikan inklusif ini?

- iii. Bagaimana wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terhadap pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif ini? (bisa dari sisi prioritas anggaran, beasiswa ABK, pemenuhan sarana prasarana atau wujud komitmen lainnya)
 - jjj. Tiga unsur utama yang mempengaruhi kemampuan dan kemauan aparat pelaksana untuk melaksanakan kebijakan yaitu Kognisi (seberapa jauh pemahaman pelaksana terhadap kebijakan), arahan dan tanggapan pelaksana (bagaimana penerimaan, ketidakberpahaman maupun penolakan pelaksana) serta intensitas respon atau tanggapan pelaksana. Menurut saudara, bagaimana pemenuhan 3 unsur tersebut oleh para pelaksana kebijakan, mulai dari pelaksana level akar rumput (sekolah-sekolah inklusif) hingga pemerintah pusat?
 - kkk. Sejauh ini bagaimana dukungan dari pemerintah, mulai dari pemerintah pusat hingga kabupaten terkait anggaran dan kecukupan sarana prasarana? (data numerik dari tahun ke tahun)
 - lll. Selain dana, bantuan apa lagi yang pernah diberikan oleh pemerintah?
 - mmm. Apakah ada mekanisme pelaporan secara periodik perihal implementasi kebijakan pendidikan inklusif ini kepada Bupati/Gubernur/Menteri Pendidikan?
 - nnn. Adakah evaluasi secara periodik dari pemerintah pusat/provinsi/kabupaten terkait dengan implementasi kebijakan pendidikan inklusif ini?
 - ooo. Adakah apresiasi dari pemerintah pusat/provinsi/kabupaten terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pendidikan inklusif ini? (mulai dari para GPK, sekolah-sekolah inklusif, para kepala sekolah inklusif, Pokja Inklusif)
 - ppp. Tujuan utama dari sistem kegiatan pendidikan yang berlangsung di institusi persekolahan adalah mengembangkan dan membentuk potensi intelektual untuk menjadi cerdas secara terprogram dan koordinatif dengan materi pendidikan yang dipersiapkan untuk dilaksanakan secara metodis, sistematis, intensif, efektif dan efisien menurut ruang dan waktu yang telah ditentukan. Menurut anda, sejauh ini apa yang telah dilakukan oleh SDN 3 Karangrejo sudah sesuai dengan tujuan utama tersebut?
 - qqq. Apakah ada konsep pengembangan atau penyempurnaan kebijakan pendidikan inklusif ke depan agar implementasinya semakin tepat sasaran dan bisa menyentuh semakin banyak anak berkebutuhan khusus?
3. KENDALA-KENDALA YANG DIHADAPI
- a. Menurut anda, kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh sekolah-sekolah inklusif di Kabupaten Banyuwangi dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif?
 - b. Menurut anda, kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh SDN 3 Karangrejo sebagai salah satu *pilot school* dalam pelaksanaan pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus?
 - c. Menurut anda, kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh guru-guru pengajar yang mengajar pada kelas yang terdapat anak berkebutuhan khusus?
 - d. Menurut anda, kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh anak berkebutuhan khusus dalam mengikuti kegiatan pembelajaran?

4. UPAYA MENGATASI KENDALA

- a. Upaya apa saja yang telah, sedang dan akan dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi oleh sekolah-sekolah inklusif di Kabupaten Banyuwangi khususnya di SDN 3 Karangrejo terkait pelaksanaan pendidikan inklusif?
- b. Apakah ada pihak lain yang membantu dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi tersebut?
- c. Pihak-pihak mana saja yang membantu dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi tersebut?
- d. Sejauh mana pihak-pihak tersebut membantu implementasi kebijakan pendidikan inklusif?

Saran, masukan dan informasi tambahan (bersifat bebas)



Lampiran 8.

PEDOMAN WAWANCARA TRIANGULASI

A. Profil Sekolah

1. Nama Sekolah :
2. Alamat Sekolah :
3. Tahun berdiri sekolah :
4. No. Surat Ijin Pendirian Sekolah :
5. Status akreditasi sekolah & tahun :
6. Visi Sekolah :
7. Misi Sekolah :
8. No. SK penyelenggaraan pendidikan inklusif :

B. Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif di SDN 3 Karangrejo

1. Prinsip penyelenggaraan pendidikan inklusif
2. Tujuan penyelenggaraan pendidikan inklusif
3. Sasaran penyelenggaraan pendidikan inklusif
4. Kriteria sekolah
5. Layanan dalam pendidikan inklusif
6. Manajemen sekolah di sekolah inklusif
7. Identifikasi dan assessment
8. Kurikulum yang digunakan
9. Sistem penilaian
10. Bimbingan dan konseling
11. Pendidik dan tenaga kependidikan
12. Sarana dan prasarana penunjang
13. Pembiayaan
14. Pemberdayaan masyarakat
15. Mekanisme penyelenggaraan
16. Transmisi, *Clarity* (kejelasan) dan Konsistensi Komunikasi
17. Sumberdaya (staf, informasi, kewenangan, dan fasilitas)
18. Disposisi (kognisi (pemahaman), arahan dan tanggapan pelaksana serta intensitas respon atau tanggapan pelaksana)
19. Struktur birokrasi

C. Kendala dalam Implementasi Pendidikan Inklusif

1. Bagaimanakah kendala-kendala yang dihadapi dalam memberikan layanan kepada siswa berkebutuhan khusus dalam pendidikan inklusif?
2. Bagaimanakah kendala-kendala manajemen sekolah dalam melaksanakan kebijakan pendidikan inklusif?
3. Bagaimana kendala-kendala yang dihadapi dalam identifikasi dan assesmen?
4. Bagaimana kendala-kendala dengan kurikulum yang digunakan dalam pendidikan inklusif?
5. Bagaimana kendala-kendala dalam sistem penilaian yang dilakukan?
6. Bagaimana kendala-kendala dalam bimbingan dan konseling yang dilakukan dalam pendidikan inklusif?
7. Bagaimana kendala-kendala dalam pendidik dan tenaga kependidikan?
8. Bagaimana kendala-kendala dalam sarana dan prasarana penunjang?
9. Bagaimana kendala-kendala dalam pembiayaan pendidikan inklusif?

10. Bagaimana kendala-kendala dalam pemberdayaan masyarakat terkait dengan implementasi pendidikan inklusif?
11. Bagaimana kendala-kendala dalam mekanisme penyelenggaraan pendidikan inklusif?
12. Bagaimana kendala-kendala dalam hal komunikasi terkait mekanisme pelaksanaan pendidikan inklusif?
13. Bagaimana kendala-kendala di bidang sumberdaya dalam mekanisme penyelenggaraan pendidikan inklusif?
14. Bagaimana kendala-kendala terkait disposisi dalam mekanisme penyelenggaraan pendidikan inklusif?
15. Bagaimana kendala-kendala dalam hal struktur birokrasi terhadap mekanisme penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kabupaten Banyuwangi?

D. Upaya Mengatasi Kendala dalam Implementasi Pendidikan Inklusif

1. Bagaimanakah upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala dalam memberikan layanan kepada siswa berkebutuhan khusus?
2. Bagaimanakah upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala manajemen sekolah?
3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala dalam identifikasi dan assesmen?
4. Bagaimanakah upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala terkait kurikulum yang digunakan?
5. Bagaimanakah upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala dalam sistem penilaian?
6. Bagaimanakah upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala bimbingan dan konseling?
7. Bagaimanakah upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala pendidik dan tenaga kependidikan?
8. Bagaimanakah upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala sarana dan prasarana penunjang?
9. Bagaimanakah upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala pembiayaan pendidikan inklusif?
10. Bagaimanakah upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala dalam pemberdayaan masyarakat?
11. Bagaimanakah upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala mekanisme penyelenggaraan pendidikan inklusif?
12. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala dalam hal komunikasi terkait mekanisme pelaksanaan pendidikan inklusif?
13. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam mengatasi di bidang sumberdaya dalam mekanisme penyelenggaraan pendidikan inklusif?
14. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala terkait disposisi dalam mekanisme penyelenggaraan pendidikan inklusif?
15. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala dalam hal struktur birokrasi terhadap mekanisme penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kabupaten Banyuwangi?

Lampiran 9

TRANSKRIP WAWANCARA PENELITIAN

dengan Informan Kepala SDN 3 Karangrejo

1. LATAR BELAKANG INFORMAN

- a. Nama : SITI HAFIYAH, S.Pd., MM.
- b. Umur : 54 Tahun
- c. Jabatan : Kepala SDN 3 Karangrejo
- d. Mata Pelajaran : IPS
- e. Jenis Kelamin : Perempuan
- f. Agama : Islam
- g. Lama menjabat/mengajar : 10 tahun / 20 tahun

2. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI OLEH ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS

- a. Menurut anda, masalah/persoalan apa yang sering dihadapi oleh anak berkebutuhan khusus di SDN 3 Karangrejo?

Jawaban :

Terutama ya fasilitas...sarana prasarana yang kurang memadai. Gurunya juga latar belakangnya kan nggak khusus.

- b. Persoalan utama apa yang sedang dihadapi anak berkebutuhan khusus di SDN 3 Karangrejo saat ini yang terkait dengan prestasi, perkembangan pribadi dan sosialnya?

Jawaban :

Tidak ada masalah, mereka baik-baik saja. Untuk saat ini masih belum ada prestasi, tapi mereka bisa bergaul dengan baik dengan teman-temannya yang normal.

- c. Bagaimana kondisi anak berkebutuhan khusus di SDN 3 Karangrejo saat ini (yang terkait dengan prestasi, perkembangan pribadi dan sosialnya)?

Jawaban :

Untuk tahun ajaran yang kemarin sudah ada prestasi, tapi dari olahraga.. kalau akademiknya nggak ada, yang ada dari olahraga atletik..lari..

Untuk pergaulan sehari-hari anak-anak ABK nggak ada masalah. Yang normal pun saling membantu dan bisa menerima yang ABK. Tidak ada yang kuper karena kekurangannya karena semua saling menerima. Yang normal *welcome* sama temen-temennya yang tidak normal. Prestasi belajar mereka berkembang sesuai dengan kemampuan mereka. Mereka bisa mengikuti pelajaran dengan baik, seumpama ada yang kurang nanti akan ada tambahan pelajaran dari GPK.

- d. Menurut anda apakah segala kebutuhan dasar dalam pendidikan anak berkebutuhan khusus di SDN 3 Karangrejo sudah terpenuhi?

Jawaban :

Sudah terpenuhi dengan baik, karena GPK selalu siap membantu. Kalau sewaktu-waktu ada kesulitan ada bantuan guru dari pusat sumber (SLB/SDLB)

- e. Anak berkebutuhan khusus memiliki keterbatasan/gangguan fisik, mental, sosial atau emosional. Jenis keterbatasan/gangguan apa saja yang dimiliki oleh para anak berkebutuhan khusus di SDN 3 Karangrejo?

Jawaban :

Keterbatasannya kalo fisik sekarang nggak ada, mental ada, yang autis... yang aktif sekali.... dan lambat belajar...

3. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN INKLUSIF BAGI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DI SDN 3 KARANGREJO

- a. Apakah anda mengetahui tentang pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus/sekolah inklusif? Dan sejauh mana anda mengetahuinya?

Jawaban :

Untuk inklusif ini anak yang difabel disejajarkan dengan yang normal, sebaiknya tidak dibeda-bedakan, sekolahnya juga sama, mendapat perlakuan yang sama, tidak boleh sekolah sendiri-sendiri... harus di kelas yang sama, sesuai dengan tingkat usia.

- b. Menurut anda, apakah anak berkebutuhan khusus mempunyai hak yang sama dalam memperoleh pendidikan? Mohon dijelaskan!

Jawaban :

Iya. Anak-anak difabel juga berhak mendapatkan pendidikan yang layak, sama dengan anak-anak yang normal.

- c. Menurut anda, apakah keterbatasan fisik yang dimiliki anak berkebutuhan khusus dapat menjadi penghambat bagi mereka untuk memperoleh pendidikan di sekolah?

Jawaban :

Saya kira ndak. Karena anak-anak itu sekarang merasa sudah banyak temannya, sudah *enjoy*. Baik itu belajar maupun bermain-main dia sudah *enjoy*. Apalagi para GPK dan guru-guru sudah ramah dan menerima mereka, jadi mereka kerasan.. seneng bisa belajar bersama.

- d. Bagaimana tanggapan anda tentang anak berkebutuhan khusus yang bersekolah?

Jawaban :

Mereka memang harus sekolah untuk bekal hidup mereka.

- e. Menurut anda, siapakah yang harus bertanggung jawab dalam pemenuhan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus?

Jawaban :

Ya tentunya tanggung jawab bersama... orang tua... juga guru, juga pemerintah, lingkungan masyarakat. Semua harus bertanggung jawab. Harus saling tolong-menolong, artinya wali murid juga tidak boleh pasrah *bongkolan* di sekolah, harus selalu memantau perkembangan putra putrinya. Kalau ada sekolah kurang mampu untuk menghadapi anak ini, supaya nanti bisa mengarahkan anaknya ini ke psikiaternya, ke dokternya dan sebagainya. Untuk pemerintahnya juga demikian, harus peduli dengan anak-anak di situ karena rata-rata memang, khususnya di SDN 3 Karangrejo anak-anak ABK itu memang kurang mampu. Ndak ada yang luar biasa, jadi ya latar belakangnya memang anak yang kurang beruntung. Disitu pemerintah juga harus baik itu ngopeni beasiswa anak ABK, juga termasuk GPK, juga operasional dari sekolah ini. Kontribusi dari orang tua belum ada. Sekedar hanya menyekolahkan anaknya, untuk wali murid yang lain juga yaa seperti itulah. Pokoknya yang penting anaknya sudah sekolah. Keterbatasan mereka membuat mereka tidak bisa banyak membantu. Padahal biayanya kan juga banyak mbak May... mereka juga disibukkan bekerja juga, jadi ya itu kendalanya. Kontribusi yang nyata masih belum kelihatan, karena latar belakang yang kurang mampu tadi.

Kalau dari pemerintah dukungan yang sudah diterima, alhamdulillah mulai ada bantuan buku-buku, peraturan Perbup Permen juga sudah ada...kemudian bantuan untuk GPK juga sudah ada, masing-masing sudah diterima, jadi untuk menambah semangat para GPK walaupun hanya sekedar untuk mengikuti diklat-diklat pembelajaran inklusif sudah menerima, alhamdulillah. Cuma beasiswa untuk inklusifnya aja yang belum. Operasionalnya hanya sekolah piloting yang sudah. Ya kalo per tri bulan itu kadang-kadang dapatnya 10 juta, kadang-kadang 7,5 juta. Jadi ndak mesti. Tergantung dari banyaknya jatah APBD soalnya dibagi-bagi sama yang

lain. Ini dari pokja (inklusif) dapetnya... berarti dari kabupaten. Yang dapet hanya sekolah piloting aja. Yang non piloting nggak dapet. Padahal setiap sekolah pasti ada ABK cuman dia kan nggak piloting jadi ya nggak dapet. Tapi syukur alhamdulillah, sekarang GPK-nya sudah ada insentif per bulan 300 ribu. Sudah bisa untuk tadi, mengikuti diklat-diklat. Kalau ada pameran-pameran para GPK juga sudah mampu mengondisikan untuk tampil.

- f. Sejak kapan awal pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus di SDN 3 Karangrejo? Bagaimana prosesnya?

Jawaban :

Tahun 2008 mulainya. Prosesnya itu pertama, ada siswa tahun ajaran baru itu pendaftaran siswa baru, semua daftar. Karena di SDN 3 Karangrejo gak pilih-pilih, terus tingkat usianya dan domisili juga dekat, kemudian semua sudah diterima eee ternyata ada salah satu anak yang anaknya nggak diajak. Setelah semuanya masuk ternyata kok ada yang anaknya digendong. Kok digendong ini padahal mau diukur tinggi badannya... eee ternyata gak punya kaki. Itu prosesnya. Terus kita gimana sebagai sekolah, kok seperti itu padahal sudah terlanjur kita terima. Karena dia secara mental normal, secara fisik aja dia anu... ya udah gak papa. Akhirnya dia mau sekolah situ. Akhirnya dia sekolah terus dari awal. Dengan adanya proses itu akhirnya sekolah menjadi sekolah inklusif. Kok sekolah ini mau menerima yang kayak itu, akhirnya terus mencari-cari yang lain, dan ternyata disitu banyak sekali anak lambat belajar. Akhirnya ya itu jadi sekolah inklusif. Murid yang pertama sekolah itu sekarang sudah SMPLB. Malah dia berprestasi, dengan kursi roda dari Makassar, O2SN menang terus. Dia cowok, namanya Choirul Anam. Kapan hari juga dapat penghargaan dari bapak Bupati, itu dari SDN 3 Karangrejo. Untuk tahun yang kemarin ini ada yang bisu tuli. Tapi dia pintar merias. Dia cewek, naik sepeda montor lancar. Sekarang dia sudah lulus. Tapi ini dia mau sekolah SMPLB, tapi kejauhan. Dia nggak mau bermalam di asrama karena mbantu ibunya. Rumahnya di lokalisasi. Sebenarnya dia kalau diarahkan merias pintar. Baca tulisnya lancar. Minimal anak-anak ini kan harus bisa baca sama nulis namanya sendiri. Karena kami ini pengen mereka itu mampu menulis namanya sendiri, alamat dan tanda tangan. Karena untuk menjangkau pengetahuan yang lain kita merasa nggak mampu, selain karena kemampuan anaknya juga sehingga mengutamakan kemampuan sosialisasinya aja gitu. Itu sebagai bekal *lifeskil* untuk bertahan hidup.

- g. Bagaimana tanggapan saudara terhadap penunjukan SDN 3 Karangrejo sebagai salah satu *pilot school* di Kabupaten Banyuwangi?

Jawaban :

Yaa alhamdulillah saya senang sekali. Karena nanti yang jelas sekolah-sekolah yang lain akan ketularan ya mbak.. masa di Karangrejo aja mau menerima ABK kok saya ndak mau.. minimal menginspirasi yang lain. Ternyata anak-anak seperti itu memang tidak boleh dibiarkan. Walaupun anak-anak itu tidak bisa sekolah di tempatnya, jika diperlukan mereka harus dijemput di rumah mereka agar tetap bisa mendapatkan pendidikan. Anak-anak itu harus dibuat agar senyaman mungkin dalam bersekolah. Contohnya ada seorang anak yang sangat hiperaktif, sekarang dia kelas 2.

Untuk tahun ajaran kali ini tidak ada ABK. Mungkin karena sejak tahun 2014 memang semua sekolah SD diwajibkan menerima ABK, jadi sekarang anak-anak ABK yang mau sekolah bisa memilih sekolah yang dekat dengan tempat tinggalnya. Kalau kejauhan sekolahnya mungkin orang tua juga gimana... keberatan gitu ya, jadi akhirnya milih sekolah yang deket-deket aja. Kalau dulu banyak anak-anak ABK yang jauh rumahnya, ada yang rumahnya Kalipuro. Karena mereka tahunya SD yang menerima ABK ya hanya di SDN 3 Karangrejo, jadi ya mereka akhirnya

menyekolahkan anaknya di sini. Padahal kita ya gak ahli, cuman sedikit berpengalaman dan yang terpenting GPK-nya berdedikasi penuh.

- h. Bagaimana persepsi semua komponen sekolah terkait penyelenggaraan pendidikan inklusif? (mulai dari Kepala Sekolah, Guru, TU hingga orang tua siswa)

Jawaban :

Awalnya ada penolakan, alasannya mau dijadikan apa sekolah ini? Karena saat di luar sana sudah terjadi persaingan prestasi kok kita malah terima anak yang gitu-gitu. Penolakan ini dari wali murid dan sebagian guru. Mereka takut masyarakat nanti menilai sekolah kita malah jadi SLB. Akhirnya saya sebagai kepala sekolah akhirnya memberi pengarahannya bahwa kita mengajarkan anak itu tidak *digebyah uyah* sama tapi sesuai dengan kemampuannya. Nanti kalo memang anak itu tidak mampu ya biar semampu-mampunya anak ini. Nanti kalau memang standar nasional gak mampu ya dibuatkan soal sendiri yang penting anak ini bisa lulus dengan tingkat kemampuannya dan tingkat usianya. Saudara-saudara ndak usah khawatir karena dibalik semua ini pasti akan banyak hikmahnya. Akhirnya sedikit demi sedikit mereka berubah menerima. Awalnya komite sama sekali tidak mau menerima karena banyak ABK yang ke SDN 3 Karangrejo, terus mau jadi apa sekolah kita. Alhamdulillah sekarang anak-anak ABK itu malah pinter-pinter, ada yang pinter nari, merias. Dan alhamdulillah gak mengganggu, gak mempengaruhi yang lain. Alhamdulillah sudah banyak yang lulus dan masuk SMP Negeri. Yang mau mondok juga banyak. Yang anak-anak ABK yang gak mampu ya sama ibunya diarahkan ke keterampilan atau apa gitu. Yaa sekolah kita ini intinya mau menerima mereka walaupun di awal pada tahun 2008 lalu sempat memberikan penolakan. Namun karena sekarang wajib belajar kan 12 tahun, baik anak yang normal maupun ABK kan semuanya ciptaan Tuhan jadi semuanya sama haknya untuk mendapat pendidikan. Akhirnya alhamdulillah sekarang semua mau. Dan itupun kemarin ada anak saya yang pinter dan berprestasi sehingga bisa menepis kekuatiran sekolah ini tidak bisa berprestasi karena adanya ABK. Ukuran berprestasi bukan dibandingkan dengan yang lain-lain, tetapi ukuran saya anak-anak saya bisa masuk SMP negeri gitu aja saya sudah bangga. Ukurannya bukan hanya sekedar nilai tapi saat mereka sudah semakin dewasa mereka bisa membedakan mana yang baik dan tidak. Penanaman sikap, nilai, karakter itu yang penting.

- i. Bagaimana penerimaan siswa normal terhadap keberadaan ABK di kelas mereka?

Jawaban :

Ndak masalah. Mereka menyadari bahwa kita semua adalah ciptaan Allah. Kita tidak boleh menghina kalau ada teman yang tidak sempurna. Mereka harus tetap ditemani, harus dibantu... dan akhirnya semuanya berjalan biasa. Kadang ada anak-anak hiperaktif yang justru jadi tontonan teman-temannya. Tapi mereka semua menyadari kok... itu tetap teman yang harus dibantu juga. Yang penting kita semua harus ramah karena orang tuanya juga bisa tersinggung kalau anaknya tidak diperlakukan secara baik. Tingkahnya anak-anak itu macam-macam... yang penting kita semua harus sabar. GPK-nya sabar. Kepala sekolahnya juga sabar. Kalo lingkungan masyarakat sekitar juga gak ada masalah karena mereka sudah menyerahkan semua pada sekolah. Kalau memang sekolah mampu menerima anak seperti itu ya monggo. Mereka mengikuti aja, setuju..setuju...

- j. Bagaimanakah proses awal sosialisasi pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus (sekolah inklusif) kepada guru-guru di SDN 3 Karangrejo dan ke masyarakat?

Jawaban :

Jawabannya terangkum dalam poin h dan i.

- k. Prinsip pendidikan inklusif adalah semua anak dapat belajar bersama-sama dan tergabung dalam sekolah dan kehidupan komunitas umum tanpa memandang kesulitan ataupun perbedaan yang ada pada mereka. Menurut anda apakah prinsip ini diterapkan dalam pendidikan anak berkebutuhan khusus di SDN 3 Karangrejo?

Jawaban :

Sudah. Prinsip ini sudah diterapkan di SDN 3 Karangrejo.

- l. Tujuan utama dari sistem kegiatan pendidikan yang berlangsung di institusi persekolahan adalah mengembangkan dan membentuk potensi intelektual untuk menjadi cerdas secara terprogram dan koordinatif dengan materi pendidikan yang dipersiapkan untuk dilaksanakan secara metodis, sistematis, intensif, efektif dan efisien menurut ruang dan waktu yang telah ditentukan.

Menurut anda, sejauh ini apa yang telah dilakukan oleh SDN 3 Karangrejo dalam pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus terkait dengan tujuan utama tersebut?

Jawaban :

Tujuan utama dari pendidikan ini adalah penanaman nilai. Ilmu yang diberikan sesuai dengan kemampuan mereka. Yang penting bisa dijadikan sebagai bekal hidup mereka. Walaupun mereka tidak sempurna tapi tetap bisa mandiri dan bersosialisasi dengan lingkungan.

- m. Berapa jumlah ABK di SDN 3 Karangrejo dari tahun ke tahun mulai awal diberlakukannya pendidikan inklusif?

Jawaban :

Mulai tahun 2008 ada 5 orang tunadaksa, yang daksa parah 1 orang yang lainnya daksa ringan, misalnya jari tangannya tidak 5 tapi 2, telinganya gak sempurna, ya macem-macem lah mbak. Jumlahnya yang paling banyak ya memang barengannya Choirul Anam ini. Setelahnya itu fisik normal tapi lambat belajar. Lambat belajar itu artinya temannya sudah mau bisa membaca besok lupa lagi, sudah mau anu lupa lagi... jadi ada yang sampai kelas 3, kelas 4 gak bisa baca. Tapi mereka ya tetep dinaikkan karena usianya kan sudah cukup. Ini ada yang sampei kelas 6 diajak bicara gak mau, diajarin juga gak mau akhirnya ya wis cerita-cerita aja... kalau kemampuannya bercerita ya udah bercerita aja.

Terus nanti penilaiannya gimana? Ya untuk sementara nanti mana pelajaran yang gak bisa akan diajari lagi sama GPK, kadang-kadang dia yang gak mau.. tapi terus gimana lha wong sudah kelas 6 jadi ya terus dimotivasi, dan alhamdulillah sekarang sudah mulai mau diarahkan. Kalau ujian mereka dibedakan, dibikinkan soal sendiri sesuai kemampuannya itu. Soalnya dari sekolah sendiri. Pokoknya mampunya apa ya itu.. nanti ada levelnya, seumpama KKM-nya kalo yang normal 7 dia itu 4 atau 3 tapi *grade*-nya dinaikkan. Ada *tengerannya* mbak May bahwa ini ABK gitu, dinaikkan *grade*-nya. KKM 7 yang normal dengan 7 yang ABK itu beda. Raportnya untuk sementara ini masih sama tapi guru GPK sudah punya catatan sendiri. Ada keterangan tambahan. Karena sekarang ini KKM itu kan standar minimal jadi yang anak-anak ABK ya harus mengikuti karena ini sekolahnya sekolah regular sekolah negeri jadi ya harus mengikuti. Padahal dia pake level yang bawah. Karena raportnya masih sama ya dibuat sama gitu. Termasuk ijazah-ijazah ya sama. Jadi kalo ada anak ini standar kelulusannya gini ya segini wis. Yang terpenting nanti akhirnya kalo memang belum mampu melanjutkan ke SMP tapi mereka sudah punya bekal minimal untuk hidupnya. Nanti kalau mau pengetahuan lebih ya nanti kalau SMP bisa. Ada ABK SDN 3 Karangrejo yang setelah lulus melanjutkan ke SMP regular, kalau tidak bisa diterima di SMP biasa ya bisa ke SMP inklusif seperti SMP Muhammadiyah, SMPN 5 Banyuwangi, ada yang di SMPN Kabat atau ke SMPLB. Nanti Kepala Sekolah

memberikan surat pengantar dan surat keterangan untuk melanjutkan sekolah. Semuanya dimudahkan. Insya Allah kalau kita memberi kemudahan kita nanti juga akan dibalas dengan kemudahan, begitu.

- n. Bagaimana partisipasi orangtua siswa ABK terhadap proses belajar mengajar?

Jawaban :

Orang tua menyerahkan sepenuhnya segala sesuatunya kepada sekolah.

- o. Kinerja GPK sangat penting dipengaruhi oleh variabel : budaya organisasi, kepemimpinan Kepala Sekolah, kompetensi guru dan motivasi kerja. Menurut Saudara, bagaimana budaya organisasi yang berkembang di SDN 3 Karangrejo?

Jawaban :

Budaya organisasi sudah berjalan lancar, artinya GPK itu memang mempunyai tugas tambahan untuk memberi tambahan pelajaran pada anak-anak ABK tentunya dengan dibuktikan dengan jurnalnya bahwa pada hari ini bu guru GPK harus menambah jam pelajaran di kelas ini yang ada ABK. Bu guru ini jurnalnya juga berbeda. Jadi sudah punya tugasnya seperti itu. Sudah mengerti tugasnya.

- p. Berapa jumlah GPK di SDN 3 Karangrejo? Apakah jumlah tersebut sudah cukup untuk mendampingi para ABK di SDN 3 Karangrejo?

Jawaban :

Ada 3 orang GPK. Dua PNS, 1 GTT. Mestinya itu ya belum cukup. Mestinya 1 ABK itu ditangani 2 orang. Dan disini tuh satu kelas kan ada yang ABK-nya 2, ada yang 3, selain itu yang lainnya murid biasa, murid reguler. Jika di kelas itu minimal 2 orang ABK jadi harusnya di tiap kelas itu minimal ada 1 GPK. Mestinya... Sedangkan di SDN 3 Karangrejo rombel-nya ada 6 cuman ada 3 GPK. Kurang 3 mestinya ya.. itu GPK juga merangkap wali kelas juga. Beratnya kan di situ. Jadi nanti GPK itu yang 1 menanganai kelas 1 sama 5, GPK 2 menanganai kelas 2 sama 6, GPK berikutnya kelas yang belum. Nanti saya mintain laporannya. Nanti teknisnya, mengajarnya setelah selesai mbak May.. setelah selesai mengajar dia nanti akan dipanggil sendiri untuk mengulang pelajaran yang tadi. Jadi semacam jam pelajaran tambahan. Jadi ibarat kita menumbuk beras, glepung.. nanti kalo ada yang belum halus nanti ya ditumbuk lagi..

- q. Apa saja latar belakang pendidikan para GPK di SDN 3 Karangrejo?

Jawaban :

Mereka dari pendidikan umum bukan pendidikan khusus. Ndak ada yang khusus, umum semua. Jadi ya ilmunya itu ya apa adanya umum. Semampunya.. awalnya pakai insting aja mengajarnya.

- r. Bagi GPK yang tidak berlatar belakang pendidikan khusus, bagaimana upaya yang dilakukan agar mereka mampu menjalankan perannya sebagai GPK yang baik?

Jawaban :

Mereka semuanya mengikuti diklat khusus, tapi kurang merata, artinya itu setahun itu belum tentu 3/4 kali, kadang-kadang tahun ini ada tahun besok ndak ada. Itu pun yang dikirim harus 1 dulu, itu nanti tahun berikutnya yang satu lagi, terus yang lainnya lupa hehe... tapi ketiganya sudah pernah ikut diklat semua. Ada sertifikat juga yang mereka punya.

- s. Bagaimana kompetensi para Guru yang ditunjuk menjadi GPK di SDN 3 Karangrejo?

Jawaban :

Yaa sepanjang ini kompetensi mereka masih *support* ya untuk mengajar ABK, kan sudah diklat.

- t. Bagaimana motivasi kerja para GPK di SDN 3 Karangrejo?

Jawaban :

Semangat. Mereka masih semangat sampai sekarang. Apalagi sekarang sudah ada atensi/*reward* biarpun tidak besar nominalnya. Sekarang mereka malah mencari lo.

Mereka mencari anak-anak yang belum sekolah di lingkungan sini. Karena itu merupakan asetnya mereka. Nanti sama Pak Hamami diberi poin. Kan sekolah inklusif harus ada ABK-nya. Tapi karena tahun ini gak ada ABK ya gak ada. Karena memang gak ada.

- u. Pihak sekolah memiliki kewenangan penuh untuk merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengevaluasi komponen-komponen pendidikan inklusif yang bersangkutan. Bagaimana SDN 3 Karangrejo melaksanakan kewenangan ini?

Jawaban :

Semuanya di-*handle* sendiri dan aman. Seperti sekolah reguler pada umumnya mbak, cuman kelebihanya ya yang tadi itu, ada administrasi tersendiri bagaimana cara menangani anak yang ABK, materinya kan tentunya berbeda. Jadi mengorganisasikan juga berbeda. Itu GPK yang punya itu. Sudah ada panduannya.

- v. Upaya ini harus didukung kemampuan manajerial Kepala Sekolah yang baik. Bagaimana upaya Kepala Sekolah untuk mendayagunakan sumber-sumber daya, baik personal maupun prasarana secara optimal?

Jawaban :

Insya Allah untuk sementara ini masih bisa ditangani, masih bisa berjalan, tapi nanti kalau menemui titik buntu itu saya ke pak kabid (Pak Hamami). Tapi insya Allah ya mendukung ya. Beliau siap membantu dan siap mengupayakan. Sayangnya anggaran dari pusat saat ini sepertinya gak ada karena yang dibantu hanya PLB-nya. Dua tahun yang lalu itu masih ada dari pusat, sekarang malah gak ada. Wong insentifnya aja kemarin dari pemda kok, lha dari APBD, brarti yang operasional kemarin ya dari APBD. Jadi yang terakhir dari pusat ya 2 tahun yang lalu. Karena Banyuwangi sudah mendeklarasikan diri sebagai Kabupaten Inklusif jadi ya dianggap sudah mampu dan diserahkan lagi ke kabupatennya masing-masing. Lagian dipandang dari yang luar sana Banyuwangi itu sudah hebat inklusifnya. Buktinya orang Kalimantan mau ke sini studi banding, Sidoarjo studi banding. Padahal Sidoarjo lebih dulu lo menjadi Kabupaten Inklusif. Menurut mereka di Banyuwangi tuh sudah jalan, sudah bagus pendidikan inklusifnya. Salah satu yang dituju ya SDN 3 Karangrejo. Yaa kita tunjukkan aja apa adanya. Kemarin GPK kita juga sempat studi banding ke P4TK Bandung untuk belajar.

- w. Bagaimana proses *assessment* yang dilakukan? Apakah dilakukan sendiri oleh GPK atau melibatkan tenaga ahli dari luar?

Jawaban :

Eee...proses *assessment* ini setelah dia menjadi siswa. Untuk mengetahui tingkat kemampuan atau kesulitan apa yang dimiliki ABK. Ooo anak ini tanda-tanda autisme, anak ini pertanda lemah belajar, anak ini macem-macem itu... ya di *assessment* itu. GPK sendiri yang melakukan *assessment*. Karena kita pernah mendapat pelatihan itu jadi tidak perlu melibatkan pusat sumber. Dari sudah ada formatnya itu terus dia wawancara sendiri. Dengan adanya *assessment* ini kita jadi tahu ooo anak ini ini, anak ini ini... terus dilengkapi dengan adanya psikiater. Ada Bu Betty psikiater. Kami kerja samanya dengan beliau.

- x. *Assessment* ada 2 jenis, yaitu *assessment* fungsional dan *assessment* klinis. Di SDN 3 Karangrejo menggunakan jenis *assessment* yang mana?

Jawaban :

Assessment yang dilakukan adalah *assessment* fungsional.

- y. Apakah di SDN 3 Karangrejo terdapat RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran)? Kalau ada, siapa yang merancang RPP tersebut? (Guru Kelas/GPK/pihak lain)

Jawaban :

Ada RPP. Yang merancang RPP adalah GPK-nya sendiri, karena menyesuaikan dengan materi pelajaran.

- z. Apakah SDN 3 Karangrejo mempunyai perencanaan program pendidikan inklusif secara tertulis dalam bentuk program jangka panjang, jangka menengah atau jangka pendek?

Jawaban :

Sebetulnya ada tapi belum sempat membuat. Sebetulnya ada, tapi karena inklusif itu konsepnya masih mencari-cari jadi kami masih bingung. Seharusnya ada sosialisasi dan panduan kerangka dari Dinas Pendidikan, tapi sayangnya sosialisasi untuk hal ini masih kurang. Lagian yang ada di bawah juga podho-podho sibuke jadi mungkin secara khusus kurang sering ketemuan. Mestinya ada. Sebenarnya kalo dari Dinas mengharuskan harus ini harus ini kita mesti berusaha wis golek-golek. Di Pokja Inklusif juga saling mengingatkan tapi pihak sekolah juga harus berbagi konsentrasi dengan siswa yang reguler juga. Sehingga untuk masalah ini agak terabaikan, yang penting kegiatan jalan.

- aa. Bagaimanakah perencanaan pendidikan yang dilakukan bagi anak berkebutuhan khusus di SDN 3 Karangrejo?

Jawaban :

Untuk perencanaan dibuat langsung oleh para GPK.

- bb. Apakah perencanaan tersebut melibatkan orang tua maupun tenaga ahli lain (seperti Guru SLB, Guru BK, Guru Mata Pelajaran, dokter dan lain-lain)?

Jawaban :

Untuk sementara waktu perencanaan ini ya melibatkan Pusat Sumber. Kalo kita gak bisa gimana gimananya ya kita bisa tanya ke Pusat Sumber. Biasanya yang dimintain tolong Pak Jumadi dari SLB. Untuk komite sementara ini tidak ada peran karena rata-rata kurang terpelajar untuk orang tua ABK-nya. Ibu-ibunya banyak yang kurang terpelajar, lulusan SD atau SMP. Makanya sekarang saya pengen anak-anak itu harus bisa baca tulis. Apalagi sekarang ada Indonesia pintar. Dan mereka juga harus bisa nulis namanya dan tanda tangan biar nanti mereka bisa dapetin bantuan.

- cc. Bagaimanakah dengan pengelolaan kegiatan pembelajaran di SDN 3 Karangrejo (seperti merumuskan tujuan pembelajaran, metode mengajar)?

Jawaban :

Yaa dilakukan bersama-sama sesuai tugas dan perannya masing-masing.

- dd. Kurikulum yang digunakan bagi anak berkebutuhan khusus ada 3 jenis, yaitu kurikulum umum (reguler), kurikulum modifikasi dan kurikulum yang diindividualisasi. Jenis kurikulum manakah yang digunakan di SDN 3 Karangrejo?

Jawaban :

Kurikulum yang digunakan kurikulum modifikasi. Jadi kurikulum yang umum itu nanti diturunkan grade-nya sesuai dengan kemampuan anak. Kalau misalnya yang reguler itu level 1 seumpama ya atau level 2 nanti anak-anak yang ABK diturunkan lagi.

- ee. Bagaimana SDN 3 Karangrejo mengembangkan kurikulum sesuai dengan tingkat, perkembangan dan karakteristik peserta didik agar lulusan memiliki kompetensi untuk bekal hidup (*life skill*)?

Jawaban :

Selain meteri pelajaran, para ABK juga mendapatkan pelajaran keterampilan, menari. Mereka itu kalo kesenian malah pinter-pinter lo. Walaupun bisu (tunawicara) mereka itu dicoba ya bisa. Yang ngelatih menari bu Lilik. Keterampilannya diajarkan menempel-menempel, nggunting-nggunting...sebenarnya kemampuan motorik mereka normal.

- ff. Apakah di SDN 3 Karangrejo ada Program Pengajaran Individual (PPI)? Siapa yang merancang PPI tersebut? (Guru Kelas/GPK/pihak lain)

Jawaban :

PPI itu yang tambahan itu tadi ya... jadi selain belajar gabungan yang materinya sama terus nanti ada pelajaran tambahan secara individual sesuai tingkat kemampuannya langsung dengan GPK-nya masing-masing

- gg. Program layanan pendidikan yang diberikan apakah bersifat layanan penuh/layanan pendidikan yang dimodifikasi/layanan pendidikan individualisasi?

Jawaban :

Program layanan pendidikan yang diberikan bersifat layanan yang dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka. ABK yang paling banyak adalah lambat belajar, untuk tahun ini tidak ada tuna daksa.

- hh. Untuk memperlancar pelaksanaan program layanan tersebut perlu didukung oleh unit khusus yang berfungsi sebagai *supporting program* dalam bentuk layanan remedial, layanan bimbingan, layanan latihan dan pengembangan, layanan assessment dan layanan observasi. Apakah layanan-layanan tersebut juga dimiliki oleh SDN 3 Karangrejo?

Jawaban :

Yaa ada itu... semuanya yang *handle* GPK. Yaa seadanya ya bisa diadakan dengan sumber daya yang ada... saya juga ikut. Saya tugasnya memantau, kalau gak dijalankan nanti saya yang *complain*. Semua harus dilaksanakan karena saya butuh bukti fisik, bukti-buktinya harus ada, saya nggak mau *awu-awu*. Hayo ini udah dikerjakan apa belum? Kalo lengah nanti saya yang mengingatkan.

- ii. Bagaimana peran para GPK untuk mewujudkan sistem Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan (PAKEM) di kelas?

Jawaban :

Yaa peran GPK yaa seperti guru sekolah reguler itu, mereka juga diajak main bareng-bareng, memancing anak baik ABK maupun reguler agar terasah gitu ya... agar terangsang semangat belajarnya ya dibikin senang. Alhamdulillah yang di sinipun anak-anaknya senang. Buktinya saat ada yang disuruh pindah sekolah yang dekat rumahnya mereka bilang nggak mauuu aku maunya di Karangrejo 3 aja. Kamu seneng sama siapa? Katanya seneng bu Dyah.. seneng main pitik-pitikan. Padahal rumahnya jauh di Singotrunan, naik becak tiap hari 20 ribu, tapi anaknya gak mau pindah sekolah dan sudah nyaman bersekolah di Karangrejo 3. Anaknya sekarang sudah kelas 2, umurnya 8 tahun. Tiap hari dia diantar dan ditemani ibunya. Kalo gak ditemani ibunya ya gak bisa sekolah mbak. Karena dia baru nulis dihapus, baru nulis dihapus... ibunya ikut masuk di dalam kelas. Ibunya harus ikut mengawasi anaknya kalau mau sekolah di sini. Kalau anaknya mau sekolah di sini bareng-bareng ya sampeyan harus ikut ngawasi. Ibunya lama-lama malah pengen jadi guru, hehe... ibunya Umam (si anak ini) malah kadang ikutan ngurusin siswa yang reguler. Si Umam ini harus dijagain melekat karena dia suka mukulin temen-temannya. Tingkahnya hiperaktif. Kmarin umam dinaikkan dari kelas 1 ke kelas 2. Walaupun kemampuannya tidak sama dengan siswa reguler namun asalkan dia bisa menulis namanya, untuk saat ini hal itu sudah cukup, sambil nanti kita terus bekal dia dengan

kemampuan lainnya. Untuk tes-tesnya soalnya dibuatkan sendiri oleh gurunya, kalau misalnya siswa reguler soalnya 20 ya si anak ABK ini soalnya 5. Ya dikerjakan tuh.. ya bisa..

- jj. Dalam setiap program atau kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan, bagaimana tentang proses penilaiannya? Sistem penilaian apa yang digunakan di SDN 3 Karangrejo?

Jawaban :

Penilaiannya disesuaikan dengan kemampuannya. Setiap anak harus terus naik sesuai dengan umurnya. Soalnya nanti kalau usianya sudah banyak tapi dia gak naik-naik nanti yang kecil-kecil ditanduki (ditendangi). Secara psikologis mereka juga kasihan kalau tidak dinaikkan. Yaa nanti kalau pas kelulusan ya sesuaikan dengan kemampuannya, yang penting dia punya tanda lulus dengan bisa membaca dan menulis sederhana, karena kemampuan mereka memang minimal.

- kk. Bagaimana Sistem Kenaikan Kelas yang digunakan di SDN 3 Karangrejo?

Jawaban :

Anak-anak tetap dinaikkan sesuai dengan umurnya. Kemampuan mereka memang tidak bisa disamakan dengan siswa reguler lainnya. Mereka menggunakan standar sendiri menyesuaikan dengan kemampuan yang mereka miliki.

- ll. Bagaimana sistem Laporan Hasil Belajar para ABK di SDN 3 Karangrejo?

Jawaban :

Laporan Hasil Belajar anak-anak ABK yaa sama dengan anak reguler, tapi ada catatan khususnya karena memang mereka beda. Kemampuannya kan tidak sama.

- mm. Apakah GPK di SDN 3 Karangrejo juga melakukan kegiatan bimbingan dan konseling bagi para ABK?

Jawaban :

Ya selalu ada konsultasi antara wali murid dengan GPK. Bahkan kadang ada inisiatif agar si anak ABK ini seneng mereka janji untuk ngasih hadiah kalau anak-anak ini bisa menjawab atau mengerjakan tugas. Nanti uangnya dari orang tua. Hadiahnya apa aja yang penting mereka senang... kadang kerupuk, permen.. pokoknya biar surprise gitu lo. Bentuk kerjasamanya bisa semacam itu. Kadang ada anak ABK yang suka menulis dan menghapus-menghapus, yaa mereka dibelikan papan tulis kecil sendiri biar mereka bisa tetap nyaman belajar.

- nn. Ujian Akhir Sekolah (UAS) para ABK apakah mengikuti standart SDLB atau SD? (Jika mengikuti standart SDLB secara administratif di bawah naungan Diknas Provinsi, sedangkan jika mengikuti standart SD berarti secara administratif di bawah naungan Diknas Kabupaten/Kota)

Jawaban :

Ujian Akhir Sekolah anak-anak ABK pakai standart SD, karena orang tua mereka takut kalau gak pakai standart SD nanti ijazahnya gak laku. Nanti kalau sertifikatnya beda nggak laku anaknya gak bisa sekolah lagi. Lagi pula dari Dinas Kementerian Pusat itu terlambat terus jadi yaa anak-anak sekolahnya kapan, saya ini digembrongi orang tua terus. Pokoknya GPK itu mendampingi terus, pas ujian juga didampingi... diingatkan terus anak-anaknya sampai mereka selesai dan lulus.

Sebetulnya sama Kementerian Luar Biasa PKLK sebenarnya sudah ada ijazahnya sendiri, tapi karena pendistribusiannya lama, saya sama wali murid kan gak enak mbak, akhirnya mereka pengen disamakan dengan anak reguler. Anak-anak ini gak mampu ya pak.. yaa pokoknya gimana caranya mereka gak mau ijazahnya beda, karena awalnya mau saya bedakan saya buat sendiri. Diknas sendiri gak masalah karena Diknas juga menyadari pendistribusiannya itu yang lama. Sebenarnya seandainya yang sana itu gencar mbak, kita siap, kita berani mbak. Yang

kita gak berani itu kalau digembrongi wali murid takutnya anaknya gak bisa sekolah. Semua wali murid rata-rata kemauannya sama. Tidak hanya yang berpendidikan rendah, bahkan wali murid yang berlatar belakang dosen, waktu itu anaknya autis, tetap memaksa untuk mendapatkan ijazah yang sama dengan siswa reguler lainnya, padahal anaknya memiliki kemampuan yang tidak sama. Tapi alhamdulillah anak-anak ABK itu bisa juga kok... mereka ikut ujian. Malah kemarin itu ada yang bisu (tuna wicara) namanya Dika, malah nilainya lebih bagus dari pada yang normal. Soalnya kan hanya nyilang, jadi ya dia bisa ngerjakan sendiri. Dia sudah bisa membaca jadi ya akhirnya dia bisa ngerjakan soal ujian. Yang lambat belajar itu yang susah, sampai sekarang ada yang belum bisa membaca padahal sudah kelas 6, namanya Faturrohman. Kepintarannya hanya bercerita. Ya sudah, kita tidak bisa memaksakan. Memang potensinya sebatas itu.

- oo. Menurut anda, apakah terjadi peningkatan potensi yang dialami anak berkebutuhan khusus setelah mendapatkan pendidikan di SDN 3 Karangrejo?

Jawaban :

Yaa secara akademik minimal mereka sudah bisa menulis, membaca dan tanda tangan. Selain itu ada kemampuan tambahan *skill* lain, misalnya membuat kipas, menari, merias dan kemampuan olahraga, seperti atletik. Kalau anak-anak lambat belajar itu sebenarnya bisa diarahkan ke olahraga, cuman sayangnya guru olahraganya yang sekarang itu sudah tua jadi kurang bisa mengeksplorasi kemampuan mereka.

- pp. Sejauh ini bagaimana peningkatan potensi-potensi yang dialami anak berkebutuhan khusus?

Jawaban :

Sama lah seperti jawaban di atas.

- qq. Prestasi apa saja yang pernah diraih oleh ABK di SDN 3 Karangrejo?

Jawaban :

Prestasi akademik tidak ada. Tapi ada alumni SDN 3 Karangrejo yang berhasil menjadi juara atletik tingkat Provinsi Jawa Timur.

- rr. Menurut anda, manfaat apa saja yang dapat diperoleh dan dilihat dari pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus yang dilakukan di SDN 3 Karangrejo?

Jawaban :

Minimal anak-anak ABK tersebut bisa menulis, membaca dan tanda tangan serta kemampuan keterampilan tambahan lainnya. Semua itu tentunya akan sangat bermanfaat bagi para ABK sebagai bekal hidup mereka. Karena mereka juga belajar bersosialisasi dengan teman-temannya, itu juga menjadi bekal mereka untuk bersosialisasi dengan masyarakat yang lebih luas lagi.

4. KENDALA-KENDALA YANG DIHADAPI

- a. Menurut anda, kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh SDN 3 Karangrejo dalam pelaksanaan pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus?

Jawaban :

Pertama ya sarana prasarana. Lalu SDM-nya. Wali muridnya juga kurang pro aktif. Sebagian besar mereka pasrah putra-putrinya mau digimanakan. Tapi ya ada seperti orang tuanya Umam yang masih mau terlibat karena memang putranya hiperaktif luar biasa. Kalau tidak didampingi ya tidak bisa belajar.

- b. Menurut anda, kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh guru-guru pengajar yang mengajar pada kelas yang terdapat anak berkebutuhan khusus?

Jawaban :

Karena mereka tidak punya keahlian khusus jadi ya kesulitannya disana. Mereka akhirnya mengajar dengan menggunakan insting saja. Ya walaupun ada kesulitan nanti ya tinggal koordinasi dengan SLB sebagai pusat sumber.

- c. Menurut anda, kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh anak berkebutuhan khusus dalam mengikuti kegiatan pembelajaran?

Jawaban :

Anak-anak ABK kendalanya gak ada, mereka mengikuti pelajaran dengan nyaman gak ada masalah. Cuman ya materi yang diterima tidak bisa sepenuhnya, tapi mau mendengarkan walaupun kadang juga sibuk sendiri. Daya tangkapnya mereka yang memang masih kurang.

5. UPAYA MENGATASI KENDALA

- a. Upaya apa saja yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi oleh SDN 3 Karangrejo terkait pelaksanaan pendidikan inklusif?

Jawaban :

Dengan selalu mendekati pusat sumber dan para ahli di bidangnya ini. Selalu banyak bertanya dan selalu pro aktif. Terkait keterbatasan anggaran agar semua proses belajar mengajar tetap berjalan dengan baik, semampunya saya ambilkan dari BOS tapi karena memang belum ada anggaran alokasi khusus ya gimana caranya pokoknya mereka juga bisa belajar dengan baik. Pemerintah kita masih kurang. Padahal kapan hari sama Pak Hamami juga diajak ke Pemkab tapi ya nyatanya bantuannya emang belum ada. Belum ada anggaran khusus untuk anak ABK. Maunya saya tuh gini lo mbak, setelah mendeklarasikan sekolah inklusif, ayo yang jadi piloting 1 atau 2 entah SD atau SMP-nya, *dibenakno temenan*. Baik itu fasilitas, apa apanyalah yang mencerminkan ada ABK. Seperti itu tadi, ada jalannya khusus... ya itu semua lah, agar dibenahi untuk mencerminkan pendidikan inklusif. Kalau sekarang kan seadanya. Sesuai kemampuan sekolah, segini ya segini. Karena dulu sempat ada siswa yang berkursi roda ya cuman tak ginikan (dilandaikan) aja jalannya masuk ke kelas sampai ke bawah. Mau lebih wong kita gak punya uang, gitu.. diakali dengan kreatifitas. Yang penting memudahkan anak-anak. Alhamdulillah masih bisa jalan. Tapi sebetulnya kalau ada satu atau dua sekolah yang total seperti sekolah model gitu wooo mungkin semua orang yang punya anak berkebutuhan khusus datang kesini mbak. Kalau sekarang ini kan masih setengah-setengah. Tapi yaa saya selalu mengatakan pada semua teman-teman, mari kita lakukan semua ini dengan ikhlas, kita punya momongan anak-anak seperti ini ya yang ikhlas semuanya untuk mendapatkan ridho dari Allah. Ini jadi ladang amal buat kita semua.

- b. Apakah ada pihak lain yang membantu SDN 3 Karangrejo dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi tersebut?

Jawaban :

Selain dari SLB sebagai Pusat Sumber ya dari Pokja Inklusif yang banyak membantu. Ada pertemuan rutin sebulan sekali dengan semua anggota Pokja Inklusif termasuk semua GPK dan sekolah-sekolah inklusif.

- c. Pihak-pihak mana saja yang membantu SDN 3 Karangrejo dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi tersebut?

Jawaban :

Secara teknis kami banyak dibantu oleh Pusat Sumber dan Pokja Inklusif. Terkait masalah anggaran, selain bantuan dari pusat, kami kadang-kadang juga mendapat bantuan dari pihak luar. Diantaranya IKAWANGI (Ikatan Keluarga Banyuwangi) Jakarta, yang pernah membantu dan selanjutnya kami gunakan untuk menambah alat bantu belajar bagi para siswa ABK di SDN 3 Karangrejo.

- d. Sejauh mana pihak-pihak tersebut membantu SDN 3 Karangrejo?

Jawaban :

Yaa bantuan ini kan tidak mengikat, jadi ya semauanya mereka saja. Kami sendiri juga tidak bisa istilahnya *njagakno* datangnya bantuan dari mereka. Karena itu ya kami harus pinter-pinter mengelola dana BOS supaya semua proses pembelajaran bisa berjalan dengan baik dan lancar.

Saran, masukan dan informasi tambahan (bersifat bebas) :

Masukannya ya agar pemerintah itu peduli, lebih peduli, seperti kepenginnya saya, kalau sekolah piloting ya benar-benar piloting. Yang bisa dilihat dan harus didukung bener. Bisa jadi percontohan, jadi kalau dikunjungi tamu ya biar tidak *ngisin-ngisini*. Apalagi Karangrejo itu kan tanahnya ada, seumpama mau dibuat apa ya ada. Tapi kalau kondisinya seperti itu kan sama saja seperti sekolah yang lain. Tapi dibanding piloting yang lain-lain *yo paling apik dhewe*. Karena kita punya ruangan khusus sumber untuk pembelajaran tambahan anak-anak. Kalau di tempat lain ya campur dengan yang lain-lain. Makanya dibanding yang lain ya masih mending di SDN 3 Karangrejo. Seandainya piloting memang benar-benar di-*setting* yang bagus, ada psikiaternya seperti di Surabaya dan Sidoarjo. Guru yang lain harusnya juga turut peduli, karena kadang ada yang merasa bukan tanggung jawabnya sehingga tidak mau terlibat membantu dan semuanya diserahkan kepada GPK. Seharusnya di masing-masing sekolah inklusif itu minimal ada 1 Guru yang berlatar belakang PLB. SLB saja sebagai Pusat Sumber terkadang juga masih mengeluh kekurangan tenaga, apalagi yang sekolah inklusif. Makanya kami ya berjalan apa adanya yang penting anak-anak itu bisa sekolah tidak diam di rumah. Nanti dengan berproses setiap hari mereka bisa belajar bersosialisasi dengan teman-temannya dan belajar nilai-nilai hidup sebagai bekal mereka selanjutnya.

Lampiran 10

TRANSKRIP WAWANCARA PENELITIAN

dengan Informan GPK di SDN 3 Karangrejo

1. LATAR BELAKANG INFORMAN

- a. Nama : Lilik Sekar Nurlika, S.Pd.
- b. Umur : 54 tahun
- c. Jabatan : GPK (Guru Pembimbing Khusus)
- d. Mata Pelajaran : IPA
- e. Jenis Kelamin : Perempuan
- f. Agama : Islam
- g. Lama mengajar : 28 tahun

2. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI OLEH ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS

- a. Sepanjang pengetahuan anda, masalah/persoalan apa yang sering dihadapi oleh anak berkebutuhan khusus di SDN 3 Karangrejo?

Jawaban :

Para ABK di sini kebanyakan awalnya minder mbak. Mereka pendiam karena gak pede dengan kondisinya.

- b. Bagaimana kondisi anak berkebutuhan khusus di SDN 3 Karangrejo saat ini (yang terkait dengan prestasi, perkembangan pribadi dan sosialnya)?

Jawaban :

Mereka sekarang sudah lebih terbuka dengan lingkungan. Mereka sambil belajar sekaligus membiasakan untuk bersosialisasi dengan lingkungan yang lebih besar dibanding keluarga mereka di rumah. Mereka pun lebih pede kalau disuruh tampil, meskipun masih ada juga yang malu-malu, biasalaah...

- c. Menurut anda apakah segala kebutuhan dasar dalam pendidikan anak berkebutuhan khusus di SDN 3 Karangrejo sudah terpenuhi?

Jawaban :

Untuk kebutuhan dasar insya Allah sudah cukup meskipun dengan standart minimal. Meskipun ada yang kurang yaa kami tetap berupaya untuk tetap mengajar anak-anak dengan baik.

- d. Anak berkebutuhan khusus memiliki keterbatasan/gangguan fisik, mental, sosial atau emosional. Jenis keterbatasan/gangguan apa saja yang dimiliki oleh para anak berkebutuhan khusus di SDN 3 Karangrejo?

Jawaban :

Peserta didik berkebutuhan khusus pada tahun ajaran 2015/2016 di SDN 3 Karangrejo berjumlah 35 orang, yang terdiri dari 1 (satu) orang ABK Tuna Rungu dan Tuna Wicara, 2 (dua) orang ABK Tuna Laras, 5 (lima) orang ABK Autis dan Sindroma Asperger, 1 (satu) orang ABK Tuna Ganda dan 26 (dua puluh enam) orang ABK Lambat Belajar (*Slow Learner*).

3. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN INKLUSIF BAGI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DI SDN 3 KARANGREJO

- a. Apakah anda mengetahui tentang pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus/sekolah inklusif? Dan sejauh mana anda mengetahuinya?

Jawaban :

Insya Allah iya. Saya sudah beberapa kali mengikuti diklat pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi.

- b. Bagaimana tanggapan anda tentang anak berkebutuhan khusus yang bersekolah?

Jawaban :

Ya harus itu. Pendidikan kan menjadi hak seluruh warga negara, termasuk anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus. Di sekolah mereka bisa mempelajari banyak hal agar mereka bisa lebih mandiri.

- c. Menurut anda, apakah anak berkebutuhan khusus mempunyai hak yang sama dalam memperoleh pendidikan? Mohon dijelaskan!

Jawaban :

Pastinya itu. Itu hak mereka. Makanya saya suka sedih kalau ada sekolah yang nolak anak dengan kebutuhan khusus. Kan kasihan ya mereka... padahal kalau mau sekolah ke SLB jauh. Ongkosnya mahal. Iya kalau mereka orang tuanya mampu, lha kalau tidak... makanya meskipun awalnya kami di sini belum tahu banyak tentang pendidikan khusus kami sudah meniatkan diri, dengan didukung ibu kepala sekolah, untuk menerima anak-anak tersebut dan membimbing mereka dengan semaksimal kemampuan kami. Insya Allah Allah beri petunjuk yaaa...

- d. Menurut anda, apakah keterbatasan fisik yang dimiliki anak berkebutuhan khusus dapat menjadi penghambat bagi mereka untuk memperoleh pendidikan di sekolah?

Jawaban :

Tidak sepenuhnya jadi masalah. Kalau cuman fisik atau tunadaksa sebenarnya gak terlalu masalah juga. Dulu ada murid kami, saya lupa namanya... tunadaksa tapi pemikirannya normal, jadi ya dia bisa mengikuti pelajaran dengan baik, bahkan waktu ujian nilainya sering lebih baik dibanding anak-anak yang normal. Yang sulit itu justru anak-anak slow learner sama tunagrahita, karena mereka memang lambaaaaat sekali dalam menangkap setiap informasi. Jadi yaa harus sabar mb.

- e. Menurut anda, siapakah yang harus bertanggung jawab dalam pemenuhan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus?

Jawaban :

Semuanya mbak. Tidak hanya guru dan kepala sekolah, tapi orang tua juga harus aktif memberi dukungan, juga pemerintah sebagai pemangku kebijakan.

- f. Sejak kapan awal pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus di SDN 3 Karangrejo? Bagaimana prosesnya?

Jawaban :

Seingat saya sejak tahun 2008-an gitu ya... terus berlanjut sampai sekarang. Saat dulu belum trend sekolah inklusif, di Karangrejo 3 ini sudah mulai mbak.

- g. Bagaimana tanggapan saudara terhadap penunjukan SDN 3 Karangrejo sebagai salah satu *pilot school* di Kabupaten Banyuwangi?

Jawaban :

Saya senang sekali mbak. Tapi ya ini juga jadi beban tambahan buat kami mbak, karena banyak yang belajar di sini untuk melihat pendidikan inklusif padahal lo kami juga masih banyak yang kurang, kadang kami malu sendiri, hehe...

- h. Bagaimana persepsi semua komponen sekolah terkait penyelenggaraan pendidikan inklusif? (mulai dari Kepala Sekolah, Guru, TU hingga orang tua siswa)

Jawaban :

Alhamdulillah sekarang semua sudah mendukung. Tapi dulu ya komite orang tua sempat menolak. Mereka khawatir kalau SD ini nanti bisa jadi SLB saking banyaknya ABK. Tapi alhamdulillah sekarang mereka sudah mendukung karena memang keberadaan ABK sama sekali tidak mengganggu proses belajar putra putri mereka.

- i. Bagaimana penerimaan siswa normal terhadap keberadaan ABK di kelas mereka?

Jawaban :

Sejauh ini alhamdulillah anak-anak yang normal baik-baik saja. Keberadaan ABK diantara mereka diterima dengan baik, walaupun kadang ada yang jadi tontonan juga saat ada ABK yang autis hiperaktif saat belajar. Tapi mereka sekaligus belajar bertoleransi dengan sesama karena mereka sudah meyakini bahwa sebagai sesama ciptaan Tuhan kita harus saling menyayangi meskipun berbeda-beda keadaannya. Mereka pun juga diajari agar lebih bersyukur karena diciptakan sehat dan sempurna. Namun tetap tidak boleh memandang rendah teman-teman yang berkebutuhan khusus karena di sini semua bersaudara.

- j. Bagaimanakah proses awal sosialisasi pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus (sekolah inklusif) kepada guru-guru di SDN 3 Karangrejo dan ke masyarakat?

Jawaban :

Awalnya ya agak sulit, seperti saya cerita tadi, tapi alhamdulillah nya sekarang mereka semua sudah mengerti.

- k. Prinsip pendidikan inklusif adalah semua anak dapat belajar bersama-sama dan tergabung dalam sekolah dan kehidupan komunitas umum tanpa memandang kesulitan ataupun perbedaan yang ada pada mereka. Menurut anda apakah prinsip ini telah diterapkan dalam pendidikan anak berkebutuhan khusus di SDN 3 Karangrejo?

Jawaban :

Iya mbak, sudah.

- l. Tujuan utama dari sistem kegiatan pendidikan yang berlangsung di institusi persekolahan adalah mengembangkan dan membentuk potensi intelektual untuk menjadi cerdas secara terprogram dan koordinatif dengan materi pendidikan yang dipersiapkan untuk dilaksanakan secara metodis, sistematis, intensif, efektif dan efisien menurut ruang dan waktu yang telah ditentukan.

Menurut anda, sejauh ini apa yang telah dilakukan oleh SDN 3 Karangrejo dalam pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus terkait dengan tujuan utama tersebut?

Jawaban :

Sejauh ini kami hanya berupaya untuk memberikan bekal bagi mereka agar mereka bisa menjadi pribadi yang lebih mandiri dengan keterbatasan yang mereka miliki. Kami menyesuaikan dengan kemampuan yang mereka miliki, karena memang mereka berbeda.

- m. Berapa jumlah GPK di SDN 3 Karangrejo?

Jawaban :

Ada 3 (tiga) orang. Saya, bu Dyah dan bu Anny.

- n. Menurut anda, apakah jumlah GPK di SDN 3 Karangrejo sudah mencukupi kebutuhan? Jika belum, berapa jumlah idealnya?

Jawaban :

Idealnya 1 GPK memegang 5 anak ABK... Lha di sini sekarang ABK nya ada 35 orang, jadi ya kami bagi-bagi tugas, yaa disini masalahnya.

- o. Apakah latar belakang pendidikan ibu/bapak?

Jawaban :

Saya Sarjana Pendidikan

- p. Apakah ibu/bapak juga terlibat dalam menyusun instrumen dan melaksanakan *assessment* pendidikan bagi para siswa ABK?

Jawaban :

Iya, justru disini kami berperan banyak, selain itu ada bu Hafi Kepala Sekolah juga, sama perwakilan dari pusat sumber dan psikiater bu Betty.

- q. Pihak sekolah memiliki kewenangan penuh untuk merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengevaluasi komponen-

komponen pendidikan inklusif yang bersangkutan. Bagaimana SDN 3 Karangrejo melaksanakan kewenangan ini?

Jawaban :

Kami mengoptimalkan segala potensi yang ada di kami untuk bisa melaksanakan itu semua. Yang penting ikhtiar mbak... semua proses yang terbaik buat anak-anak kami lakukan.

- r. Apakah terjalin kerjasama yang baik antara guru, sekolah dan orang tua peserta didik, dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian kemajuan belajar para siswa ABK?

Jawaban :

Yaa sejauh ini semua bekerjasama dengan baik, bahkan ada wali murid, ibunya Umam kelas 2 yang sambil nemenin anaknya juga membantu kami dalam proses belajar mengajar. Tapi untuk wali murid lainnya biasanya ya pasrah aja... nggak ada yang ikutan.

- s. Menurut anda, apakah terjadi peningkatan potensi yang dialami anak berkebutuhan khusus setelah mendapatkan pendidikan di SDN 3 Karangrejo?

Jawaban :

Tentu ada, meskipun sangat kecil. Tapi sekecil apapun yang penting ada progress iya kan? Daripada mereka diem aja di rumah ya mending sekolah.

- t. Sejauh ini bagaimana peningkatan potensi-potensi yang dialami anak berkebutuhan khusus?

Jawaban :

Belum ada yang berprestasi secara akademik, tapi ada yang berhasil juara balap kursi roda lo tingkat provinsi, namanya Anam... sekarang dia sudah sekolah di SMPLB.

- u. Prestasi apa saja yang pernah diraih oleh ABK di SDN 3 Karangrejo?

Jawaban :

Ya itu tadi, Anam jadi juara provinsi, tapi setelah tingkat nasional saya tidak tahu hasilnya, hehe...

- v. Menurut anda, manfaat apa saja yang dapat diperoleh dari pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus yang dilakukan di SDN 3 Karangrejo?

Jawaban :

Mereka menjadi sosok yang lebih terbuka dengan lingkungan, bisa berkomunikasi aktif, menjadi lebih mandiri dan menggali potensi yang mungkin mereka miliki. Bisa di bidang seni, ada yang pintar menari, merias, atau di bidang olahraga. Mereka bebas memilih apa yang mereka suka.

4. KENDALA-KENDALA YANG DIHADAPI

- a. Menurut anda kendala dan kesulitan apa saja yang biasa dihadapi saat mendidik siswa ABK di SDN 3 Karangrejo?

Jawaban :

Jumlah GPK dan ABK yang tidak proporsional menjadi kendala terbesar disini. Seandainya GPK nya bisa ditambah lagi tentu kami bisa lebih fokus mengajar anak-anak. Tapi yaa kami terus berusaha...

- b. Menurut anda, kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh anak berkebutuhan khusus dalam mengikuti kegiatan pembelajaran?

Jawaban :

Mereka memiliki daya tangkap yang berbeda-beda. Untuk yang memiliki daya tangkap rendah, mereka tidak cukup jika dijelaskan hanya satu kali. Mereka butuh tambahan jam pelajaran untuk menjelaskan kembali apa yang sudah diajarkan. Namun seringkali tetap harus banyak pengulangan sehingga kami memang dituntut untuk memiliki kesabaran ekstra.

- c. Secara global, kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh SDN 3 Karangrejo dalam implementasi kebijakan pendidikan inklusif bagi para siswa ABK?

Jawaban :

Selain jumlah GPK dan ABK yang tidak proporsional, kendala lain adalah sarana prasarana belajar. Meskipun kami sudah punya ruang sumber khusus untuk anak-anak ABK, tapi untuk alat-alat pembelajarannya masih banyak yang belum lengkap. Seperti anak kami yang tuna rungu dan tuna wicara. Dia sangat membutuhkan alat bantu pendengaran. Tapi karena harganya yang sangat mahal, kami belum bisa menyediakan untuk saat ini. Jadi komunikasi yang kami jalin hanyalah dengan bahasa isyarat dan bahasa tulisan.

5. UPAYA MENGATASI KENDALA

- a. Upaya apa saja yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi oleh SDN 3 Karangrejo terkait pelaksanaan pendidikan inklusif?

Jawaban :

Kami berusaha mengoptimalkan segala potensi yang kami miliki agar semua proses pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Biarpun ada yang kurang gak papa lah... kami jalanin saja.

- b. Apakah ada pihak lain yang membantu SDN 3 Karangrejo dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi tersebut?

Jawaban :

Ada, alhamdulillah.

- c. Pihak-pihak mana saja yang membantu SDN 3 Karangrejo dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi tersebut?

Jawaban :

Bantuan kami dapatkan dari pusat sama Dinas Pendidikan. Sama dari IKAWANGI Jakarta juga... lalu buku-buku dari USAID tentang pendidikan inklusif juga ada.

- d. Sejauh mana pihak-pihak tersebut membantu SDN 3 Karangrejo?

Jawaban :

Yaa kan mereka membantu tanpa ikatan, jadi yaa gak bisa selalu diharapkan. Makanya kami harus pintar-pintar mengelola dana BOS supaya semuanya bisa jalan.

Saran, masukan dan informasi tambahan lainnya (bersifat bebas) :

Kami sebagai GPK sangat berharap pemerintah lebih peduli pada kami, para GPK, dan juga anak-anak kami, para ABK. Kami berterima kasih sudah mendapatkan insentif dari Pemkab. Banyuwangi. Meskipun nominalnya tidak besar ya tetap kami syukuri. Ke depan kami berharap upaya peningkatan kompetensi bisa terus dilakukan, syukur-syukur semua guru regular juga bisa menjadi GPK sehingga kekurangan tenaga pendidik di sekolah-sekolah inklusif bisa terpenuhi. Syukur-syukur lagi kalau anak-anak kami, semua ABK, tidak hanya yang berprestasi, juga bisa mendapatkan beasiswa untuk meringankan beban keluarganya. Usul lagi, gimana kalau setiap tahun dipilih ABK berprestasi, GPK paling berdedikasi dan sekolah inklusif terbaik sehingga semua pihak bisa semakin bersemangat dalam menyukseskan pendidikan inklusif ini. Mudah-mudahan ya, aamiin.

Lampiran 11

TRANSKRIP WAWANCARA PENELITIAN

dengan Informan Anak Berkebutuhan Khusus di SDN 3 Karangrejo

1. LATAR BELAKANG INFORMAN

- a. Nama : Choirul Umam
- b. Umur : 8 tahun
- c. Kelas : 2
- d. Jenis Kelamin : Laki-laki
- e. Agama : Islam
- f. Jenis Kebutuhan Khusus : Autis

2. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI OLEH ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS

- a. Menurut kamu, masalah/persoalan apa yang sering kamu hadapi di SDN 3 Karangrejo?

Jawaban :

Enggak tau

- b. Persoalan utama apa yang sedang kamu hadapi di SDN 3 Karangrejo (yang terkait dengan prestasi, perkembangan pribadi dan sosialnya)?

Jawaban :

Enggak ada

- c. Bagaimana kondisi anak berkebutuhan khusus di SDN 3 Karangrejo saat ini yang terkait dengan prestasi, perkembangan diri pribadi dan interaksi sosial dengan teman-teman? Tolong dijelaskan!

Jawaban :

Aku senang kok

- d. Menurut kamu, apakah segala kebutuhan dasar kamu dalam pendidikan anak berkebutuhan khusus di SDN 3 Karangrejo sudah terpenuhi? Tolong jelaskan pendapat kamu!

Jawaban :

Aku senang disini.

3. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN INKLUSIF BAGI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DI SDN 3 KARANGREJO

- a. Untuk apa kamu bersekolah?

Jawaban :

Biar pintar

- b. Apakah kamu mengetahui tentang pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus/sekolah inklusif? Dan sejauh mana kamu mengetahuinya?

Jawaban :

(menggeleng tidak tahu)

- c. Bisa diceritakan nggak, bagaimana proses awal kamu bersekolah di SDN 3 Karangrejo?

Jawaban :

Umam sekolah biar pintar, temannya banyak.

- d. Bagaimana tanggapan kamu bersekolah di SDN 3 Karangrejo?

Jawaban :

Aku senang.

- e. Menurut kamu, sejauh ini bagaimana proses pelaksanaan pendidikan bagi ABK di SDN 3 Karangrejo?

Jawaban:

Aku senang sama bu guru

- f. Menurut kamu bagaimana peran sekolah dalam pendidikan inklusif?

Jawaban :

Enggak tahu

- g. Menurut kamu, bagaimana cara para guru-guru mengajar di kelas?

Jawaban :

Bu guru baik

- h. Sejauh ini kamu paham nggak dengan apa yang diterangkan oleh guru-guru waktu pelajaran?

Jawaban :

(tertawa)

- i. Sejauh ini yang kamu rasakan, apakah terjadi peningkatan potensi nggak yang kamu rasakan selama mengikuti pendidikan inklusif di SDN 3 Karangrejo?

Jawaban :

Umam pintar (tertawa)

- j. Jika terjadi peningkatan, sejauh mana peningkatan potensi yang kamu alami tersebut?

Jawaban :

Aku jadi pintar (sambil tertawa)

- k. Menurut kamu, manfaat apa saja yang dapat kamu peroleh dari pendidikan inklusif yang dilakukan di SDN 3 Karangrejo?

Jawaban :

Umam jadi pintar (tertawa lalu lari)

4. KENDALA-KENDALA YANG DIHADAPI

- a. Apakah selama kamu mengikuti kegiatan pembelajaran di SDN 3 Karangrejo terdapat kendala-kendala yang kamu hadapi? Tolong dong diceritakan?

Jawaban :

(dibantu Ibu Umam) Umam seneng aja di sini, sekolah sama temen-temen, baik-baik. Bu guru baik, ngajak mainan.

5. UPAYA MENGATASI KENDALA

- a. Upaya apa saja yang telah kamu lakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut?

Jawaban :

Nggak ada

- b. Apakah ada pihak lain yang membantu kamu dalam mengatasi kendala-kendala tersebut?

Jawaban :

(menggeleng)

- c. Apa harapan kamu dari penyelenggaraan pendidikan bagi anak yang berkebutuhan khusus?

Jawaban :

Umam mau sekolah di sini terus.

Saran, masukan dan informasi tambahan (bersifat bebas)

Terima kasih bu guru (tertawa)

Lampiran 12

TRANSKRIP WAWANCARA PENELITIAN

dengan Informan

Orang Tua Anak Berkebutuhan Khusus di SDN 3 Karangrejo

1. LATAR BELAKANG INFORMAN

- a. Nama : Sulastri
- b. Umur : 28 tahun
- c. Jenis Kelamin : Perempuan
- d. Alamat : Kelurahan Singonegaran
- e. Identitas Anak :
 - Nama : Choirul Umam
 - Umur : 8 tahun
 - Kelas : 2
 - Jenis Kebutuhan Khusus : Autis

2. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI OLEH ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS

- a. Menurut ibu/bapak, masalah/persoalan apa yang sering dihadapi di SDN 3 Karangrejo terkait dengan pendidikan inklusif?

Jawaban :

Gurunya sedikit, padahal anak yang perlu diajar, yang cacat eh berkebutuhan khusus banyak, jadi ya repot. Kayaknya perlu ditambah ya...

- b. Persoalan utama apa yang sedang dihadapi para ABK di SDN 3 Karangrejo (yang terkait dengan prestasi, perkembangan pribadi dan sosialnya)?

Jawaban :

Enggak ada masalah kok... semua anak-anak rukun. Walaupun anak saya gak seperti mereka dan sering nakal mukulin temannya tapi temannya mengerti kok. Saya latih Umam untuk meminta maaf setiap dia salah, supaya dia belajar, mana yang salah mana yang benar.

- c. Bagaimana kondisi anak berkebutuhan khusus di SDN 3 Karangrejo saat ini yang terkait dengan prestasi, perkembangan diri pribadi dan interaksi sosial dengan teman-teman? Tolong dijelaskan!

Jawaban :

Anak saya dan teman-temannya semua bisa belajar dengan baik. Yaa walaupun Umam masih susah belajarnya tapi dia sudah belajar bersosialisasi dan berteman dengan banyak orang, jadi dia lebih pede dan tidak malu-malu lagi.

- d. Menurut ibu/bapak, apakah segala kebutuhan para ABK dalam pendidikan inklusif di SDN 3 Karangrejo sudah terpenuhi? Tolong jelaskan pendapat anda!

Jawaban :

Yaa sudah baik, tapi kayaknya perlu terus ditambah lagi ya.. soalnya ada anak tuna rungu dan tuna wicara tapi karena banyak alat yang nggak ada jadi ya agak sulit nangkap pelajarannya.

3. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN INKLUSIF BAGI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DI SDN 3 KARANGREJO

- a. Untuk apa anda menyekolahkan putra/putri ibu/bapak?

Jawaban :

Biar anak saya bisa lebih mandiri dan pintar, bisa bertemu banyak orang jadi saat dia tambah besar nanti dia akan bisa bekerja sama orang lain. Tidak minder sendirian.

- b. Mengapa memilih SDN 3 Karangrejo?

Jawaban :

Saya tanya-tanya dan banyak yang cerita kalau di SDN 3 Karangrejo ini banyak anak yang kurang seperti Umam dan gurunya baik-baik. Makanya saya bawa Umam belajar di sini, biarpun jauh dari rumah tapi gak papa.

- c. Apakah ibu/bapak mengetahui tentang pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus/sekolah inklusif? Dan sejauh mana anda mengetahuinya?

Jawaban :

Saya baru tahu di sini. Sekolah inklusif itu sekolah yang menerima anak-anak berkebutuhan khusus untuk sekolah bareng sama anak normal untuk sekolah bareng-bareng.

- d. Mohon diceritakan, bagaimana proses awal putra/putri anda bersekolah di SDN 3 Karangrejo?

Jawaban :

Dulu awalnya saya malu mau mengajak anak saya sekolah. Lha wong Umam itu susah disuruh diem. Geraaak terus. Saya mikirnya gimanaa kalo Umam sekolah, pasti gurunya kerepotan. Apa mau sekolah nerima ya? Tapi alhamdulillah... saya ketemu Bu Hafi (kepala sekolah) dan bu Lilik (GPK). Guru-guru di sini baik-baik semua. Umam diterima dengan baik dan bisa sekolah sama teman-temannya yang yang lain. Tapi karena Umam memang hiperaktif makanya saya harus nemenin dia terus di kelas, soalnya kalo enggak dia bisa mengganggu teman-temannya yang lain. Setelah naik kelas 2 Umam sudah mulai bisa menyesuaikan. Dia tidak segalak dulu sama teman-temannya, suka mukul-mukul. Sekarang dia sudah mau ngobrol dan main bareng teman-temannya. Yaa mudah-mudahan Umam bisa menjadi lebih baik setelah belajar di sini.

- e. Bagaimana tanggapan anda setelah putra putrinya bersekolah di SDN 3 Karangrejo?

Jawaban :

Umam sudah bisa ngobrol dan bermain dengan teman-temannya. Dia tidak suka menyendiri lagi. Meskipun belum bisa lancar membaca tapi dia sudah mulai bisa menulis namanya sendiri. Alhamdulillah...

- f. Menurut anda, sejauh ini bagaimana proses pelaksanaan pendidikan bagi ABK di SDN 3 Karangrejo?

Jawaban :

Alhamdulillah sudah baik kok...

- g. Menurut anda bagaimana peran sekolah dalam pendidikan inklusif?

Jawaban :

Ya penting... guru-guru yang mengajar dengan sabar memberikan ilmu yang bermanfaat. Setiap hari melihat bu guru mengajar membuat saya juga pengen jadi guru, hehe...

- h. Menurut anda, bagaimana cara para guru-guru mengajar di kelas?

Jawaban:

Guru-guru disini sabar-sabar dan baik-baik.

- i. Sejauh ini putra/putri saudara paham tidak dengan apa yang diterangkan oleh guru-guru waktu pelajaran?

Jawaban :

Umam masih belum lancar membaca, tapi minimal sekarang dia sudah bisa menulis namanya sendiri, meskipun harus diingatkan terus dengan sabar. Untuk pelajaran sepertinya Umam masih kesulitan karena dia suka sibuk sendiri, tapi gak papa, mudah-mudahan lama-lama dia juga akan mengerti, amin.

- j. Sejauh ini, apakah terjadi peningkatan potensi yang anda rasakan selama putra/putri anda mengikuti pendidikan inklusif di SDN 3 Karangrejo?

Jawaban :

Umam sangat aktif anaknya, saya pengen dia ikut lomba-lomba olahraga. Tapi ya harus pelan-pelan... nanti diarahkan. Biar nanti bu guru yang bantu, saya ikut saja.

- k. Jika terjadi peningkatan, sejauh mana peningkatan potensi yang putra/putri anda alami tersebut?

Jawaban :

Biarpun nggak banyak, tapi saya bersyukur Umam sudah bersekolah di sini. Daripada nggak sekolah, kasihan dia gak ngerti apa-apa. Makanya saya bersyukur sekali ada sekolah seperti SDN 3 Karangrejo yang mau menerima anak-anak seperti anak saya. Terima kasih... .

- l. Menurut anda, selain peningkatan potensi, manfaat lain apa yang dapat putra/putri anda peroleh dari pendidikan inklusif di SDN 3 Karangrejo?

Jawaban :

Umam belajar berkumpul dengan banyak orang. Nanti kan dia kalau sudah besar juga akan berkumpul dengan masyarakat. Dia belajar mulai sekarang.

4. KENDALA-KENDALA YANG DIHADAPI

- a. Apakah selama putra/putri ibu/bapak mengikuti kegiatan pembelajaran di SDN 3 Karangrejo terdapat kendala-kendala yang dihadapi? Mohon diceritakan?

Jawaban :

Kalau saya sih alhamdulillah gak ada masalah karena saya selalu mendampingi Umam. Bahkan kadang saya juga bisa sambil membantu bu guru kalo ada yang kurang-kurang di kelas, lha wong anak ABKnya banyak, gurunya cuman sedikit. Makanya kasihan...

- b. Apakah anda memiliki masalah dengan pelaksanaan pendidikan inklusif bagi putra/putri ibu/bapak di SDN 3 Karangrejo?

Jawaban :

Enggak ada mbak... alhamdulillah, saya sudah bersyukur anak saya bisa diterima sekolah di sini.

5. UPAYA MENGATASI KENDALA

- a. Upaya apa saja yang telah anda lakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut?

Jawaban :

Makanya saya kadang-kadang ikut mbantuin... semampu saya, ngambil-ngambilkan apa gitu kalo ada yang kurang... saya senang kok bisa mbantu, biarpun sedikit.

- b. Apakah ada pihak lain yang membantu anda dalam mengatasi kendala-kendala tersebut?

Jawaban :

Enggak wong saya nggak mbantu banyak kok. Tapi karena saya suka mbantu bu guru dan juga anak-anak lain temennya Umam, mereka jadi baik juga lo sama Umam dan menganggap saya juga bu guru kecil di sini hehe...

- c. Pihak-pihak mana saja yang membantu anda dalam mengatasi kendala-kendala tersebut?

Jawaban :

Kami saling membantu di sini. Semuanya baik-baik.

- d. Apa harapan anda dari penyelenggaraan pendidikan bagi anak yang berkebutuhan khusus?

Jawaban :

Semoga pendidikan inklusif ini bisa terus dijalankan, biar anak-anak seperti Umam juga bisa merasakan bersekolah dan menjadi anak pintar.

Saran, masukan dan informasi tambahan (bersifat bebas)

Mudah-mudahan jumlah gurunya, guru GPK, di SDN 3 Karangrejo ini bisa ditambah jadi biar nggak repot ngajarin anak-anak ABK yang banyak. Kasihan kalau gak ditambah, saya melihat ibu-ibu itu repot sekali ngajarin anak-anak ABK sama yang normal barengan. Semoga mereka selalu diberi kesehatan dan kesabaran dalam mendidik anak-anak kami. Semoga beliau-beliau mendapat limpahan rezeki dan dibalas dengan kebaikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, aamiin.



Lampiran 13

TRANSKRIP WAWANCARA PENELITIAN

dengan Ketua Pokja Inklusif

1. LATAR BELAKANG INFORMAN

- a. Nama : Drs. HAMAMI, M.Si.
- b. Umur : 56 Tahun
- c. Jenis Kelamin : Laki-laki
- d. Agama : Islam
- e. Jabatan : Kabid. Pendidikan TK/SD Dispendik. Bwi. sekaligus Ketua Pokja Inklusif
- f. Lama menjabat : 4 tahun

2. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN INKLUSIF

- a. Apakah anda mengetahui tentang pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus/sekolah inklusif?

Jawaban :

Ya tahu...

- b. Sejak kapan anda mengetahui tentang pendidikan inklusif? Dan sejauh mana anda mengetahuinya?

Jawaban :

Ini ya.. ini setelah ada Permendikbud Nomor 70 tahun 2009. Tapi sebenarnya pendidikan inklusif di Indonesia ini sudah ada jauh pada waktu saya menjadi guru SMP sekitar tahun 1985 itu sudah ada pendidikan terpadu. Ini saya alami langsung. Jadi guru SMP di dalamnya itu banyak anak-anak yang tuna netra itu ya bergabung dengan anak-anak normal. Itu di SMP PGRI Kalipuro. Siswa saya yang tuna netra waktu itu ada 8 anak. Kemudian istilah sekolah terpadu itu diganti dengan pendidikan inklusif sejak adanya Permendikbud itu tadi. Itu merupakan program pusat, jadi diluar SMP Kalipuro juga sudah ada. Cuman waktu itu kebetulan saya mengajarnya disana. Langsung berhadapan dengan anak berkebutuhan khusus. Saya ngajar IPS waktu itu.

- c. Sepengetahuan saudara, sejak kapan awal pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus dilaksanakan di Kabupaten Banyuwangi? Bagaimana prosesnya?

Jawaban :

Tahun 1985 itu sudah ada, cuman gencar-gencarnya ya sejak keluarnya Peraturan Bupati Banyuwangi No 68 Tahun 2012, apalagi setelah dideklarasikannya Banyuwangi sebagai Kabupaten Inklusif pada tahun 2014, karena sejak saat itu sekolah mulai TK sampai SMA wajib menerima anak berkebutuhan khusus.

Latar belakang lahirnya pendidikan inklusif di Banyuwangi untuk mencapai angka partisipasi murni untuk anak-anak normal itu kan sekitar 90% ya, jadi masih ada anak-anak yang 10% itu tidak sekolah. Sepuluh persen itu ada anak yang mengalami disabilitas. Mereka ada yang disembunyikan... yaa ada sekitar 7% diantaranya. Sehingga untuk mencapai tingkat sampai 100% itu Angka Partisipasi Murninya belum tercapai, karena masih ada anak-anak disabilitas yang belum sekolah.

Anak-anak itu gak sekolah kendalanya mungkin karena dari orangtua malu punya anak cacat, kemudian lokasi sekolahnya jauh, sehingga melatar belakangi lahirnya sekolah inklusif. Sekolah reguler yang ada harus bisa melayani anak yang berkebutuhan khusus karena lokasinya sudah bisa didekatkan dengan mereka.

- d. Menurut anda, bagaimana kebijakan pendidikan inklusif di Kabupaten Banyuwangi?

Jawaban :

Yaa sepanjang ini sudah berjalan dengan baik.

- e. Sejak kapan kebijakan pendidikan inklusif ini dikeluarkan dan dilaksanakan di Kabupaten Banyuwangi?

Jawaban :

Sudah mulai tahun 1985 sudah ada sekolah-sekolah terpadu yang menerima anak ABK. Secara tahun 2012 sudah ada Peraturan Bupati yang mengatur. Tahun 2014 ada Deklarasi Kabupaten Banyuwangi sebagai Kabupaten Inklusif.

- f. Bagaimanakah proses sosialisasi awal pelaksanaan pendidikan inklusif di Kabupaten Banyuwangi?

Jawaban :

Sosialisasi waktu deklarasi kan kita kumpulkan di Taman Blambangan ya... tapi sebelumnya sudah kita kumpulkan semua stakeholder mulai kepala sekolah, kemudian guru-guru yang tergabung dalam KKG, kepala sekolah yang tergabung dalam MKKS atau K3S, pengawasnya, peniliknya kita adakan sosialisasi di Pendopo... dengan narasumber dari pusat dari Jakarta, Direktorat PKLK. Itu di tingkat kabupaten, terus di tingkat kecamatan ini kita sudah sosialisasi ke semua stakeholder juga sudah kita laksanakan.

- g. Bagaimana respon sekolah-sekolah tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif ini di sekolah mereka?

Jawaban :

Yaa sebagian ada yang menyambut positif, sebagian ada yang kurang respon. Alasannya ngopeni anak normal aja sulit gitu lo, kenapa harus menerima anak-anak yang berkebutuhan khusus. Tapi untuk sebagian yang menyadari memang ini pendidikan untuk semua ya paling nggak ya ini hak azasi manusia, karena program wajib belajar jadi ya tidak ada perbedaan dan diskriminasi. Kadang ada juga sekolah yang menolak karena takut citra sekolahnya akan menurun. Nanti nilainya kalau digabung dengan anak-anak yang normal nanti *grade*-nya bisa turun. Tapi sebenarnya ini tidak berpengaruh karena udah ada Undang-undangnya udah jelas bahwa anak yang di bawah standar tidak wajib untuk mengikuti ujian negara. Setelah mereka diberi wawasan seperti ini, akhirnya mereka pun bisa menerima, termasuk juga sekolah-sekolah favorit di kota Banyuwangi. Cuman biasanya si orang tua yang memiliki kebutuhan khusus ini bertanya dulu, sekolah mana yang sudah siap menerima anak berkebutuhan khusus. Akhirnya kita tunjukkan ini lo sekolah-sekolah yang sudah pilot. Berikutnya mereka justru tidak lagi memilih sekolah favorit. Namun demikian, ini kepala sekolahnya sudah *welcome* sebenarnya. Kalau yang SMP dan SMA malah sudah jalan ini. Di SMP Giri, SMP 4 Banyuwangi, SMA 1 Giri, SMA 1 Glagah, SMA Kota (SMA 1 Banyuwangi). Tiap tahun ada kuota untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Yaa sesuai dengan undang-undang, minimal 1 rombel 1 anak ABK. Kalau ada 1 sekolah yang rombelnya 12 ya berarti kuotanya harus 12 juga.

- h. Apakah kegiatan sosialisasi ini masih berlanjut hingga saat ini?

Jawaban :

Masih..masih... sosialisasi terus berlanjut. Dalam rapat-rapat terus kita sampaikan. Dalam penerimaan siswa baru PPDB juga harus diingatkan kalau ada kuota untuk siswa ABK. Dan semua sekolah-sekolah di Banyuwangi juga harus siap untuk itu.

- i. Langkah-langkah apa saja yang telah diambil untuk mengawal pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif ini?

Jawaban :

Langkah-langkahnya diawali dengan pemberdayaan pokja, kita punya sekretariat di aula atas itu ya.. kemudian kita memberdayakan guru pembimbing khusus. Kita punya SK 175 GPK yang diberi honor oleh Pemerintah Kabupaten ya.. kemudian

pemberdayaan sekolah sumber, jadi kalau sekolah reguler ini ada kesulitan bisa konsultasi ke sekolah-sekolah sumber, sekolah SLB Negeri, SDLB Negeri, SMPLB Negeri, SMALB Negeri, SDLB A Negeri Cluring, SLB Yosomulyo Gambiran, itu juga sebagai sekolah sumber dan tempat rujukan. Kemudian pelatihan-pelatihan *lifeskill*, ada juga Porseni FLS2N untuk anak-anak ABK. Tahun kemarin kita juga sempat menggelar Gebyar ABK dengan dukungan dari swasta (Rumah Sakit Yasmin), mudah-mudahan tahun ini bisa dibantu dengan APBD agar bisa menyelenggarakan Festival ABK.

Terkait anggaran, ya terima kasih ya untuk kabupaten, inklusif itu total anggarannya ya 900 juta. Udah lumayan kita dapat bantuan. Itu untuk insentif GPK, sekitar 703 juta.. kemudian untuk guru-gurunya ada peningkatan *lifeskill*, untuk dilatih keterampilan-keterampilan terkait dengan kecakapan hidup kemarin udah dapat 50 juta. Kemudian ada Porseni PLB itu nilainya juga 50 juta. Kemudian ada FLS2N, Festiva Lomba-lomba Seni Siswa tingkat Nasional itu ya.. termasuk pengiriman atlet ke tingkat nasional dan propinsi.

Kalau dari propinsi belum ada bantuan. Kalau dari nasional tahun ini kita dapat 400 juta, untuk membantu diklat-diklat, kemudian insentif untuk sekolah sumber, masing-masing mendapat 5 juta... di kali 7 sekolah, jadi 35 juta. Kemudian sekolah pilot, itu ada 9 sekolah, 5 SD, 4 SMP itu masing-masing 7,5 juta. Yang dapat ini tiap tahunnya nggak semua kabupaten, di Jawa Timur aja ada 4 kabupaten, mungkin dilihat perkembangannya. Eh ma'af dapatnya 300 juta yang tahun ini, yang 400 juta itu tahun yang lalu. Yaa yang penting masih ada atensi dari pusat. Yang dari provinsi malah yang belum ada.

Terus untuk sarana prasarana belajar anak-anak ABK diambilkan dari Dana BOS. Gimana pinter-pinternya kepala sekolah untuk ngatur. Seperti di SDN 3 Karangrejo yang punya kelas khusus sebagai ruang sumber. Memang setiap sekolah harusnya punya ruang sumber, sehingga manakala anak-anak ABK tidak berkumpul dengan anak normal mereka memiliki tempat khusus, minimal 6 jam per minggu mereka kumpul di situ untuk mendapatkan pelajaran tambahan dan pendidikan khusus, pelatihan khusus dan lain-lain oleh Guru GPK.

Tapi alhamdulillah, dari tahun ke tahun inklusif di Kabupaten Banyuwangi ini di tingkat nasional sudah cukup lumayan. Kemarin yang di KICK ANDY itu kan juga mantan anak inklusif dari MAN Banyuwangi. SMP nya dari SMPLB, kemudian MAN, dan sekarang kuliah di UNTAG Banyuwangi. Kemudian ada yang juara balap kursi roda, Coirul Anam dari SDN 3 Karangrejo, sekarang di SMPLB. Ada yang juara MTQ tingkat nasional, Wahyono. Kemarin dari Sempu, Farhan itu juara menyanyi tingkat provinsi.

- j. Bagaimana latar belakang pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Inklusif di Kabupaten Banyuwangi?

Jawaban :

Untuk mengawal pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif ini tentunya.

- k. Siapa saja yang dilibatkan dalam Pokja Inklusif ini? (Susunan Organisasi Pokja Inklusif Kabupaten Banyuwangi)

Jawaban :

Semua stakeholder kita libatkan. Nanti ada SK-nya siapa aja bisa dilihat. Kalau ketuanya saya. Kalau ketua II nya Pak Narto dari BAPPEDA. Anggotanya dari lintas Satker ada semua. Mulai dari PKK-nya, ada dari Depag, Perguruan Tinggi, semua bidang kita libatkan... di SK-nya ada.

- l. Sejauh ini, bagaimana peran Pokja Inklusif dalam menyukseskan pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif di Kabupaten Banyuwangi?

Jawaban :

Yaa mungkin harus ditingkatkan lagi ya, tapi jelas udah jalan Pokja. Tiap 3 bulan sekali ada pertemuan. Kemudian monitoring setahun 2 kali. Fokus utamanya di sekolah-sekolah piloting, tapi nanti juga ke sekolah-sekolah lain, di masing-masing kecamatan kan ada sekolah percontohnya. Ada TK, SD, SMP dan SMA-nya. Paling nggak itu yang jadi sasarannya.

- m. Ada beberapa sekolah yang ditunjuk menjadi *Pilot School* pelaksanaan pendidikan inklusif. Apa alasan penunjukan beberapa sekolah menjadi *pilot school* pelaksanaan pendidikan inklusif?

Jawaban :

Paling nggak kan harus ada contoh ya. Kalau nanti di masing-masing kecamatan tidak ada, nanti untuk contoh di kecamatan kan agak sulit. Sebagai tempat rujukan lah, baru nanti kalau rujukannya bagus ini nanti akan mengimbas. Kan kalau di kecamatan itu ada sekolah inti dan sekolah imbas. Nah di inklusif juga ada begitu.

- n. Pertimbangan apa sajakah yang digunakan untuk memilih sekolah-sekolah tersebut?

Jawaban :

Itu tempo hari diserahkan pada kecamatan masing-masing. Yang dipandang bisa dijadikan sekolah rujukan ya di tingkat kecamatan, tapi ya kita evaluasi juga di tingkat kabupaten. Kalau yang pertama usulan itu ya dari tingkat kecamatan masing-masing.

- o. Sekolah-sekolah mana sajakah yang telah ditunjuk menjadi *pilot school*?

Jawaban :

Ada di daftar mbak.

- p. Bagaimana tanggapan saudara terhadap penunjukan SDN 3 Karangrejo sebagai salah satu *pilot school* di Kabupaten Banyuwangi?

Jawaban :

Itu dari tahun ke tahun memang perkembangannya anak dengan disabilitas itu cukup tinggi, jika dibandingkan dengan sekolah-sekolah lain. Kurang tahu sejarahnya gimana kok disitu banyak anak disabilitas.

- q. Apa kelebihan SDN 3 Karangrejo dibanding *pilot school* lainnya?

Jawaban :

Kalau tingkat SD memang kita ya SDN 3 Karangrejo, kalau daerah-daerah lain seperti Wongsorejo itu enggak. Jadi ya Sumberkencono, di Kalipuro kemudian di Boyolangu, disana ABK nya tidak sebanyak di SDN 3 Karangrejo. Tapi sebetulnya 1 GPK itu sudah cukup untuk menangani anak 5. Idealnya 1 GPK meng-*handle* tidak lebih dari anak 5. Jadi di sertifikasi itu guru pendidikan khusus tidak boleh menangani lebih dari 5 anak.

- r. Bagaimana pelaksanaan pendidikan inklusif di masing-masing *pilot school* tersebut? Apakah sudah sesuai dengan harapan?

Jawaban :

Yaaaa... Insya Allah dengan Perbup itu mereka sudah siap, cuman kan nanti itu pilihan kan ada di wali murid, anaknya mau disekolahkan dimana sesuai dengan selera mereka. Kalau sekolahnya masih uji coba mungkin belum pernah menerima anak ABK tentu mereka juga masih pikir-pikir. Tapi pada prinsipnya sekolah se Banyuwangi wajib untuk menerima anak ABK. Dan nanti kita siapkan, kalau disitu memang ada anak ABK-nya, kebetulan gurunya belum didiklat, kita bisa siapkan...

Jumlah GPK yang 175 orang nanti bisa bertambah lagi. Jumlah ini berkembang, awalnya dulu pertama 90 orang, itu di tahun 2012.

- s. Ada berapa dan sekolah mana saja yang ditunjuk menjadi sekolah inklusif di Kabupaten Banyuwangi?

Jawaban :

List-nya sudah ada itu ya.

- t. Apakah ada penambahan dari tahun ke tahun jumlah sekolah inklusif di Banyuwangi?

Jawaban :

Ya jelas ada penambahan. Kalau dari Perbup-nya kan semua sekolah wajib, cuman karena gak semua sekolah ada ABK-nya ya mereka akhirnya pasif. Tapi untuk sekolah yang ditunjuk insya Allah mereka sudah siap. Dan semuanya udah jalan. Masing-masing punya ABK, karena untuk menerima insentif itu GPK harus menunjukkan data *by name by address* minimal 5. Kalau gak bisa nunjukin insentifnya digagalkan.

- u. Berapa jumlah ABK di Kabupaten Banyuwangi dari tahun ke tahun? (Data per sekolah inklusif dan data di SLB dari tahun ke tahun)

Jawaban :

Ada datanya nanti disiapkan.

- v. Berapa jumlah GPK di Kabupaten Banyuwangi dari tahun ke tahun? (Rincian per sekolah inklusif)

Jawaban :

Data terlampir.

- w. Bagaimana kompetensi mereka?

Jawaban :

Untuk para GPK sementara ini masih didiklat tingkat kabupaten. Cuma untuk menambah kewenangan kompetensi tambahan ini yang nangani di Jawa Timur itu baru Unesa sama UN Malang. Itu, harus dibantu dana APBD. Nah dana itu belum ada, padahal.. itu kan harus dilatih selama 6 bulan, kalau pemberian kewenangan tambahan itu istilahnya. Tapi sementara ini, dari semua disiplin ilmu itu bisa. Dengan banyak diberi bekal, didiklat di tingkat kabupaten. Dari 175 orang itu ada yang berlatar belakang pendidikan khusus.

- x. Bagi yang tidak memiliki latar belakang pendidikan khusus, bagaimana upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kompetensi mereka?

Jawaban :

Dengan diikutkan diklat-diklat yang relevan. Pelaksanaannya tiap tahun. Selama ini kan ada bantuan dari pusat itu kita gunakan sebagian untuk diklat. Diklatnya di Kabupaten Banyuwangi dan keluar juga. Kemarin itu kita ajak ke Yogya, ke Universitas Negeri Yogyakarta. Lalu terakhir baru-baru ini kami ke Bandung kita ajak ke P4TK SLB yang menangani TK dan SLB. Narasumbernya dari sana.

Kalau kaya di SDN 3 Karangrejo kan ada 3 GPK, itu berangkatnya kita atur gentian, tapi pas kemarin ke Bandung kita ajak 2 orang. Lihat sikonnya. Kalau sekolah bisa ngatur.

GPK nggak harus PNS. Karena sekarang guru PNS di sekolah reguler tuh habis, mungkin tinggal separo. Padahal rombelnya 6, gak ada pengangkatan. Kalau gak dibantu dari GTT, gulung tikar sudah...

- y. Kompensasi apa sajakah yang diberikan oleh Pemerintah, baik pusat, provinsi maupun Kabupaten Banyuwangi, untuk memotivasi para GPK?

Jawaban :

Mereka diikutkan diklat. Jam mengajarnya diakui 6 jam/minggu. Kemudian mereka kita beri insentif, setahun 3 juta. Tapi hanya yang punya SK dan punya ABK. Kalau tidak punya ABK ya kita kembalikan.

- z. Upaya peningkatan mutu pendidikan di sekolah inklusif perlu didukung kemampuan manajerial kepala sekolah. Selain peningkatan kompetensi bagi GPK, apakah juga ada upaya peningkatan kompetensi para kepala sekolah inklusif?

Jawaban :

Iya. Kepala Sekolah, Pengawas, ini baik dari tingkat provinsi maupun nasional itu ada pelatihan-pelatihan. Di kabupaten juga kita libatkan termasuk para Kepala UPTD-nya. Yang kaitannya dengan pendidikan inklusif juga ada. Dari provinsi ada, cuman karena jumlahnya terbatas jadi ya sekali kegiatan paling yang diberangkatkan 3 orang.

- aa. Pihak sekolah memiliki kewenangan penuh untuk merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengevaluasi komponen-komponen pendidikan inklusif yang bersangkutan. Bagaimana sekolah-sekolah inklusif di Kabupaten Banyuwangi melaksanakan kewenangan ini?

Jawaban :

Yaaa ini memang perlu untuk apa yaa.. sosialisasi yang lebih luas. Kadang-kadang untuk sekolah yang diluar sekolah pilot ini kadang masih setengah-setengah. Tapi untuk sekolah-sekolah sebagai rujukan di tingkat kecamatan sudah mengarah kesana.

- bb. Bagaimana proses *assessment* yang dilakukan? Apakah dilakukan sendiri oleh GPK atau melibatkan tenaga ahli dari luar?

Jawaban :

Rata-rata dilakukan sendiri. Seperti di SDN 3 Karangrejo dilakukan sendiri oleh GPK, tapi kadang juga dibantu oleh Psikolog, yang dibayar dengan BOS. Terus ada juga kan bantuan yang dari pusat 7,5 juta itu juga bisa digunakan.

Kita sudah akrab dengan psikolog Banyuwangi namanya bu Betty. Beliau juga ikut jadi anggota WA Pokja Inklusif sehingga kalau ada permasalahan terkait dengan GPK, ABK bisa langsung konsultasi lewat WA grup ini. Sehingga perkembangan inklusif ini bisa dimonitoring terus.

- cc. *Assessment* ada 2 jenis, yaitu *assessment* fungsional dan *assessment* klinis. Untuk sekolah-sekolah inklusif di Kabupaten Banyuwangi mereka menggunakan jenis *assessment* yang mana?

Jawaban :

Yang digunakan *assessment* fungsional. Sekolah-sekolah itu kerjasamanya sudah bagus, dengan psikolog, dengan rumah sakit Blambangan... perawat-perawat juga sering kunjungan ke sekolah-sekolah. Pada waktu kunjungan ke sekolah kan ini ada kegiatan UKS, sekolah sehat.. itu tidak lepas dari pendidikan inklusif.

Selain itu juga ada bantuan dukungan dari Dinas Sosial, berupa kaki palsu, alat dengar dan kursi roda.. bantuan ini diberikan setiap tahun dan sudah tiga tahun secara berturut-turut sejak tahun 2013. Untuk tahun 2016 ini sudah didata tapi belum direalisasikan.

Kompensasi lain yang diberikan juga ada beasiswa untuk ABK (SD, SMP, SMA) dari pemerintah pusat. Diterimaknya sekali setahun. Tidak hanya untuk yang berprestasi aja tapi untuk semua ABK, asal masuk data dapodik bisa dapat dia. Besarnya 600 ribu/anak.

- dd. Apakah di sekolah-sekolah inklusif tersebut terdapat RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran)? Kalau ada, siapa yang merancang RPP tersebut? (Guru Kelas/GPK/pihak lain)

Jawaban :

Mereka kan punya KKG (Kelompok Kerja Guru) GPK, ya mereka itu yang bikin RPP dengan dibantu pengawas sekolah. Pengawas sementara ini jadi satu dengan pengawas TK/SD. Pengawas kita ada lo yang memiliki latar belakang pendidikan khusus, diantaranya adalah pak Mukhyar. Harusnya ke depan, pengawas khusus ini ya harus ada. Kita ini sementara ini dirangkap dengan korwil se Besuki, cuman ini kan gak efektif. Sekarang kewenangan pendidikan khusus kan ada di provinsi.

- ee. Apakah sekolah-sekolah inklusif di Kabupaten Banyuwangi mempunyai perencanaan program pendidikan inklusif secara tertulis dalam bentuk program jangka panjang, jangka menengah atau jangka pendek?

Jawaban :

Ada acuan dari pusat. Kita punya Renstra. Kita malah ngundang pak Parno dosen pendidikan khusus dari UNY (Universitas Negeri Yogyakarta) untuk membuat Renstra.

- ff. Bagaimanakah perencanaan pendidikan yang dilakukan bagi anak berkebutuhan khusus di sekolah-sekolah inklusif di Kabupaten Banyuwangi?

Jawaban :

Berdasarkan renstra tadi. Perencanaan ini melibatkan semua stakeholder, guru-guru SLB sebagai rujukan, guru BK di SMP, guru mata pelajaran terkait dengan RPP-nya. Ada modifikasi kurikulum. Mungkin untuk anak normal begini untuk ABK menyesuaikan. Dokter, psikolog juga sering kita libatkan.

- gg. Apakah perencanaan tersebut melibatkan orang tua maupun tenaga ahli lain (seperti Guru SLB, Guru BK, Guru Mata Pelajaran, dokter dan lain-lain)?

Jawaban :

Sekolah harus aktif melibatkan semua stakeholder. Psikolog yang kita libatkan Bu Betty itu juga selalu proaktif.

- hh. Bagaimanakah dengan pengelolaan kegiatan pembelajaran di sekolah-sekolah inklusif tersebut (seperti perumusan tujuan pembelajaran, metode mengajar)?

Jawaban :

Ini fungsinya GPK pertemuan rutin ya untuk membahas RPP. Program jangka panjang, pendek dan sebagainya juga.

- ii. Kurikulum yang digunakan bagi anak berkebutuhan khusus ada 3 jenis, yaitu kurikulum umum (reguler), kurikulum modifikasi dan kurikulum yang diindividualisasi. Jenis kurikulum manakah yang digunakan di sekolah-sekolah inklusif yang ada di Kabupaten Banyuwangi?

Jawaban :

Kurikulum modifikasi. Kita tidak bisa memaksakan kemampuan anak. Kalau kemampuannya 6 ya sudah tidak bisa dipaksakan.

- jj. Bagaimana upaya sekolah-sekolah inklusif tersebut dalam mengembangkan kurikulum sesuai dengan tingkat, perkembangan dan karakteristik peserta didik agar lulusan memiliki kompetensi untuk bekal hidup (*life skill*)?

Jawaban :

Untuk membekali anak-anak, kita punya program *lifeskill*, diawali dengan gurunya kita latih, contohnya membuat sirup buah naga, keripik buah naga, kerupuk bonggol pisang, sama sirup dari bengkoang. Tahun kemarin juga diajarkan keterampilan bubut dan perbengkelan. Terus itu harusnya diajarkan ke anak-anak biar jadi tambahan kemampuan dan bekal hidup mereka.

- kk. Apakah di sekolah-sekolah inklusif tersebut ada Program Pengajaran Individual (PPI)? Siapa yang merancang PPI tersebut? (Guru Kelas/GPK/pihak lain)

Jawaban :

Ya ada. Yang merancang ya GPK. 6 jam itu digunakan di ruang sumber, jam lain-lainnya ya dengan anak-anak normal.

- ll. Program layanan pendidikan yang diberikan apakah bersifat layanan penuh/layanan pendidikan yang dimodifikasi/layanan pendidikan individualisasi?

Jawaban :

Ya gabungan. Tergantung kondisi ABK-nya.

- mm. Untuk memperlancar pelaksanaan program layanan tersebut perlu didukung oleh unit khusus yang berfungsi sebagai *supporting program* dalam bentuk layanan remedial, layanan bimbingan, layanan latihan dan pengembangan, layanan assessment dan layanan observasi. Apakah layanan-layanan tersebut juga dimiliki oleh sekolah-sekolah inklusif di Kabupaten Banyuwangi?

Jawaban :

Untuk sekolah pilot insya Allah sudah... mereka wajib punya kelas atau ruang sumber.

- nn. Dalam setiap program atau kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan, bagaimana tentang proses penilaiannya? Sistem penilaian apa yang digunakan di sekolah-sekolah inklusif di Kabupaten Banyuwangi?

Jawaban :

Ini problem karena penilaian dikaitkan dengan ujian. Anak-anak ini mau diikuti ujian standar nasional atau dibawah standar. Tapi biasanya orang tua itu malu. Sebenarnya ikut ujian sekolah aja gak papa. Tidak usah ikut ujian nasional. Tapi mereka maunya ikut ujian nasional tapi ya sambil didiktekan, dibantu. Dari pemerintah sebenarnya tidak memberatkan. Raportnya anak-anak ABK dengan normal sama, tapi nanti ada keterangannya, nilai 7 di anak normal beda dengan ABK.

- oo. Bagaimana Sistem Kenaikan Kelas yang digunakan di sekolah-sekolah inklusif di Kabupaten Banyuwangi?

Jawaban :

Untuk kenaikan kelas disamakan cuman ada keterangan yang membedakannya. Untuk ijazah kelulusan dibedakan tapi yang mengeluarkan sama-sama dari pusat. Ujian sekolah juga dari pusat. Bagi mereka yang tidak punya hambatan ya mereka ikutnya ujian standar sekolah. Ujian sekolah ikut standar provinsi. Kalau ujian negara ikut standar nasional.

- pp. Bagaimana sistem Laporan Hasil Belajar para ABK di sekolah-sekolah inklusif di Kabupaten Banyuwangi?

Jawaban :

Ya dibuatkan sama seperti siswa reguler lain namun ada catatan khususnya untuk anak ABK.

- qq. Apakah GPK di sekolah-sekolah inklusif di Kabupaten Banyuwangi juga melakukan kegiatan bimbingan dan konseling bagi para ABK?

Jawaban :

Kalau di SD dirangkap guru kelas sekaligus jadi GPK. Kalau di SMP baru ada guru BK.

- rr. Ujian Akhir Sekolah (UAS) para ABK apakah mengikuti standart SDLB atau SD? (Jika mengikuti standart SDLB secara administratif di bawah naungan Dispendik Provinsi, sedangkan jika mengikuti standart SD berarti secara administratif di bawah naungan Dispendik Kabupaten/Kota)

Jawaban :

Ujian Akhir Sekolah ikutnya standar SD. Anak-anak menyesuaikan dengan kemampuan.

- ss. Menurut anda, apakah terjadi peningkatan potensi yang dialami anak berkebutuhan khusus setelah mendapatkan pendidikan di sekolah inklusif?

Jawaban :

Iya jelas sekali, kalau mereka sekolah di sekolah khusus mereka hanya bergaul dengan anak-anak berkebutuhan khusus, sementara kalau di sekolah inklusif mereka akan belajar untuk bersosialisasi dengan orang normal. Kemampuan sosial mereka

lebih bagus. Untuk anak-anak normal juga bisa melatih empati mereka agar turut membantu temannya yang difabel agar bisa bersekolah dengan baik.

- tt. Sejauh ini bagaimana peningkatan potensi-potensi yang dialami anak berkebutuhan khusus di Kabupaten Banyuwangi?

Jawaban :

Luar biasa sekali banyak prestasi yang diraih anak-anak sampai tingkat nasional.

- uu. Prestasi apa saja yang pernah diraih oleh ABK di Kabupaten Banyuwangi?

Jawaban :

Ada daftarnya nanti mbak, terlampir ya.

- vv. Menurut anda, manfaat apa saja yang dapat diperoleh dan dilihat dari pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus yang dilakukan di sekolah-sekolah inklusif di Kabupaten Banyuwangi?

Jawaban :

Anak-anak menjadi lebih memiliki kemampuan dan kemandirian hidup.

- ww. Kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan untuk membangun sinergitas seluruh elemen pendukung implementasi pendidikan inklusif di Kabupaten Banyuwangi?

Jawaban :

Saya kira lewat pokja, pameran pendidikan inklusif, Gebyar ABK.... Alhamdulillah teman-teman kompak.

- xx. Sejauh ini bagaimana pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif di Kabupaten Banyuwangi?

Jawaban :

Dalam PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) ada kuota khusus untuk anak ABK. Ini semua sekolah harus konsekuen. Kemarin itu ada yang menolak langsung saya panggil itu... alhamdulillah sekarang sudah masuk. Sekolah sebenarnya tidak ada masalah tapi kadang panitia penerimaannya yang agak bermasalah. Sepertinya sosialisasinya memang kurang, mereka belum paham ada kuota khusus untuk ABK, tapi setelah dijelaskan ya akhirnya semua paham kok.

- yy. Secara lebih detail, bagaimana pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolah-sekolah lain yang telah ditunjuk menjadi sekolah inklusif?

Jawaban :

Sejauh ini semuanya sudah berjalan dengan cukup baik.

- zz. Bagaimana peran Sekolah Luar Biasa sebagai Pusat Sumber di Kabupaten Banyuwangi?

Jawaban :

SLB sebagai pusat sumber juga telah melaksanakan perannya dengan baik. Koordinasi dan komunikasi sudah terjalin seandainya ada hal-hal atau masalah yang terjadi kaitannya dengan para ABK beserta GPK-nya.

- aaa. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun kegagalan implementasi suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Menurut bapak bagaimana keempat faktor tersebut mempengaruhi implementasi pendidikan inklusif di Kabupaten Banyuwangi?

Jawaban :

Semuanya berperan dan mendukung pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif ini.

- bbb. Apakah ada juklak (petunjuk pelaksanaan) dan juknis (petunjuk teknis) terkait implementasi pendidikan inklusif di Kabupaten Banyuwangi?

Jawaban :

Ada dong.

- ccc. Dalam hal komunikasi, ada 3 hal yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu : Transmisi (sebuah kebijakan yang akan diimplementasikan harus disalurkan para pejabat yang

akan melaksanakannya), Kejelasan (*Clarity*) tujuan dan cara yang akan digunakan dalam sebuah kebijakan, serta Konsistensi (komunikasi yang jelas dan konsisten). Bagaimana kaitannya saat komunikasi berperan dalam implementasi kebijakan pendidikan inklusif di Kabupaten Banyuwangi?

Jawaban :

Selama ini komunikasi bagus. Kalau pertemuan-pertemuan 90% hadir. Kegiatan-kegiatan juga aktif. Kami juga punya WA Group Pokja Inklusif Banyuwangi. Ada WA Group Pokja Inklusif Nasional juga.

ddd. Apakah ada media komunikasi khusus yang dimiliki oleh pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi pendidikan inklusif di Kabupaten Banyuwangi?

Jawaban :

Selain WA Group kita juga sering pertemuan bareng. Komunikasi kami cukup intens untuk membahas semuanya kaitannya dengan pendidikan inklusif.

eee. Apakah antar pihak tersebut juga selalu intens melakukan komunikasi terkait beragam masalah dan upaya pemecahan bersama?

Jawaban :

Iya. Kalau kami mau ada kunjungan ke luar kota ya tinggal lewat media ini aja. Kemarin itu ada dari Probolinggo, lalu Trenggalek.... Datang dari DPR dan Dinas Pendidikan Trenggalek. Kita sering jadi jujugan. Untuk Jawa Timur, baru Banyuwangi, Batu dan Sidoarjo yang sudah mengawali pendidikan inklusif.

fff. Disposisi adalah sikap dan komitmen dari pelaksana terhadap kebijakan atau program yang harus mereka laksanakan agar mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Sejauh ini bagaimana peran Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi dalam implementasi kebijakan pendidikan inklusif ini?

Jawaban :

Banyuwangi cukup diacungi jempol oleh kabupaten-kabupaten lain karena untuk pendidikan inklusif kita sudah dibantu APBD Kabupaten sebesar 900 juta. Sementara di kabupaten-kabupaten lain tidak sebesar itu bahkan ada yang tidak ada. Jadi mereka kaget. Makanya, dari pusat pun akhirnya juga mengucurkan bantuan dengan melihat kepedulian dan komitmen dari pemerintah daerah setempat. Harapan saya tuh ada festival ABK, sebagai media ekspresi anak-anak ABK.

ggg. Bagaimana wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terhadap pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif ini? (bisa dari sisi prioritas anggaran, beasiswa ABK, pemenuhan sarana prasarana atau wujud komitmen lainnya)

Jawaban ;

Kami bersyukur Pemda sudah memberikan anggaran 900 juta untuk kami, walaupun mungkin sebagian besar habis untuk insentif GPK. Beasiswa ABK sayangnya belum ada. Yang ada baru yang berprestasi aja, itu lewat Dispora. Untuk sarana prasarana harusnya juga dibantu untuk mencukupi. Kita harus peduli pada sarana prasarana yang ramah bagi difabel. Utamanya untuk sekolah-sekolah.

hhh. Tiga unsur utama yang mempengaruhi kemampuan dan kemauan aparat pelaksana untuk melaksanakan kebijakan yaitu Kognisi (seberapa jauh pemahaman pelaksana terhadap kebijakan), arahan dan tanggapan pelaksana (bagaimana penerimaan, ketidakberpihakan maupun penolakan pelaksana) serta intensitas respon atau tanggapan pelaksana. Menurut saudara, bagaimana pemenuhan 3 unsur tersebut oleh para pelaksana kebijakan, mulai dari pelaksana level akar rumput (sekolah-sekolah inklusif) hingga pemerintah pusat?

Jawaban :

Untuk sekolah-sekolah pilot dan rujukan saya kira sudah bagus, tapi untuk sekolah-sekolah lain masih perlu ada peningkatan. Kadang masih ada yang beropini anak-anak

ABK itu mbok ya disekolahkan di SLB aja, lha wong ngurusin anak-anak normal aja ruwet kok ditambahin mereka.

- iii. Sejauh ini bagaimana dukungan dari pemerintah, mulai dari pemerintah pusat hingga kabupaten terkait anggaran dan kecukupan sarana prasarana? (data numerik dari tahun ke tahun)

Jawaban :

Untuk Banyuwangi sudah lumayan dibandingkan dengan kabupaten lain itu tadi ya.. ada insentif untuk ABK, ada untuk sekolah-sekolah piloting, lalu untuk pemberdayaan kita juga.

- jjj. Selain dana, bantuan apa lagi yang pernah diberikan oleh pemerintah?

Jawaban :

Dari Dinas Sosial ada, dari swasta... contohnya Rumah Sakit Yasmin yang kemarin membantu menyelenggarakan Gebyar ABK. Ada juga bantuan buku-buku dari USAID. Dari Pusat, dari Direktorat PKLK, juga ada bantuan buku-buku pembelajaran itu sudah kita salurkan semua khusus untuk ABK.

- kkk. Apakah ada mekanisme pelaporan secara periodik perihal implementasi kebijakan pendidikan inklusif ini kepada Bupati/Gubernur/Menteri Pendidikan?

Jawaban :

Kalau laporan bantuan mesti kita laporkan, tapi kalau laporan perkembangan ini biasanya ya setahun sekali lah, tapi kayaknya sifatnya sunnah gitu lo, tapi ya tetap kita kirimkan perkembangan pendidikan inklusif. Barangkali ada bantuan atau apa gitu, kita laporan lewat kepala Dinas kepada Bupati. Laporan ke Gubernur dan Menteri Pendidikan belum ada.

- lll. Adakah evaluasi secara periodik dari pemerintah pusat/provinsi/kabupaten terkait dengan implementasi kebijakan pendidikan inklusif ini?

Jawaban :

Ini rencananya tanggal 21 Oktober ini ada evaluasi tentang keberadaan GPK, nanti ada uji kompetensi GPK, ini langsung dari pusat. Di tingkat kabupaten sendiri, ini rencananya ada monev turun ke sekolah-sekolah. Ini periodik kita laksanakan rutin setiap tahunnya.

- mmm. Adakah apresiasi dari pemerintah pusat/provinsi/kabupaten terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pendidikan inklusif ini? (mulai dari para GPK, sekolah-sekolah inklusif, para kepala sekolah inklusif, Pokja Inklusif)

Jawaban :

Sudah ada bantuan yang kita dapatkan dari pusat, padahal tidak semua kabupaten bisa dapat lo. Dari 8 kabupaten percontohan hanya 3 kabupaten yang dapat bantuan, diantaranya Banyuwangi. Terus ada juga pemilihan guru inklusif itu ada pak Cahyo yang terpilih dikirim ke Australia. Itu atas nama inklusif langsung. Beliau Guru GPK di SMAN 1 Glagah, sekaligus berperan sebagai pengurus Pokja Inklusif Jawa Timur. Dari Provinsi Jawa Timur juga mengadakan diklat-diklat untuk meningkatkan kompetensi para GPK.

- nnn. Tujuan utama dari sistem kegiatan pendidikan yang berlangsung di institusi persekolahan adalah mengembangkan dan membentuk potensi intelektual untuk menjadi cerdas secara terprogram dan koordinatif dengan materi pendidikan yang dipersiapkan untuk dilaksanakan secara metodis, sistematis, intensif, efektif dan efisien menurut ruang dan waktu yang telah ditentukan. Menurut anda, sejauh ini apa yang telah dilakukan oleh SDN 3 Karangrejo sudah sesuai dengan tujuan utama tersebut?

Jawaban :

Komitmen mereka sudah bagus, kerjasama dengan guru-gurunya, komitennya sudah bagus semua. Setiap kami membahas pendidikan inklusif mereka langsung *ampere* (nyambung), pikirannya sudah sejalan dengan kami. Tiap kali ada tawaran diklat mereka juga sangat aktif untuk ikut.

- ooo. Apakah ada konsep pengembangan atau penyempurnaan kebijakan pendidikan inklusif ke depan agar implementasinya semakin tepat sasaran dan bisa menyentuh semakin banyak anak berkebutuhan khusus?

Jawaban :

Iya lewat renstra itu. Ya lewat kepedulian pemda. Kami berharap insentif para GPK akan bisa terus diberikan, sehingga para GPK tetap semangat bekerjanya. Lagipula para GPK itu kebanyakan non PNS jadi insentif itu sangat bermanfaat buat mereka. Kita juga sering mengadakan diklat-diklat internal yang diselenggarakan di beberapa destinasi wisata di Banyuwangi, biar sekalian refreshing dan membangun kebersamaan. Solidaritas para GPK ini paling kompak lo, hebat mereka.

3. KENDALA-KENDALA YANG DIHADAPI

- a. Menurut anda, kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh sekolah-sekolah inklusif di Kabupaten Banyuwangi dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif?

Jawaban :

Kendalanya 1. Guru GPK merangkap; 2. Dana terbatas; terus 3. Kompetensi GPK masih perlu ditingkatkan karena latar belakangnya banyak yang bukan dari pendidikan khusus; 4. Perlunya sosialisasi yang terus menerus agar mereka itu betul-betul paham tentang inklusif; 5. Sarana prasarana, yaa biasalah.... 6. Perlu dukungan dari Pemda dan stakeholders; 7. Dukungan CSR dari perusahaan-perusahaan itu tentunya sangat diharapkan. 8. Perlu adanya ruang khusus, selama ini kebanyakan sekolah hanya memberikan sekat untuk difungsikan sebagai ruang khusus. 9. Kami juga perlu sarana ketemu, minim setahun sekali, lewat even Gebyar ABK yang mempertemukan semua ABK dan GPK beserta seluruh stakeholder yang terkait di Kabupaten Banyuwangi. 10. Perlu juga adanya apresiasi dan penghargaan kepada guru berprestasi biar tambah semangat. Juga penghargaan untuk sekolah penyelenggara inklusif terbaik. Ini akan membuat mereka semua menjadi termotivasi untuk bisa memberikan yang terbaik guna menyukseskan kebijakan ini. Kalau di tingkat provinsi dan nasional, biasanya anak-anak yang berprestasi selalu diundang dalam acara kenegaraan, seperti Resepsi Peringatan HUT RI di Pendopo. Anak-anak ABK yang berprestasi itu juga pengen bisa terlibat dan hadir di sana.

- b. Menurut anda, kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh SDN 3 Karangrejo sebagai salah satu *pilot school* dalam pelaksanaan pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus?

Jawaban :

Kurang lebihnya juga sama. Dengan insentif tersebut para GPK sudah mau menerima, daripada enggak ada. Apalagi untuk para GTT yang menjadi GPK, mereka juga sangat minim gajinya, sehingga dengan adanya tambahan insentif tersebut mereka sudah sangat bersyukur. Selanjutnya masih perlu adanya sosialisasi lebih lanjut. Beasiswa bagi ABK juga harus terus diupayakan agar mereka bisa belajar dengan lebih baik dan fasilitas yang lebih nyaman tentunya.

- c. Menurut anda, kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh guru-guru pengajar yang mengajar pada kelas yang terdapat anak berkebutuhan khusus?

Jawaban :

Sarana prasarana dan alat bantu belajar yang seadanya, latar belakang pendidikan para GPK yang bukan pendidikan khusus membuat mereka kadang menemui kesulitan saat

menangani anak didiknya yang berkebutuhan khusus. Kadang masih ada ketidakpedulian dari guru yang bukan GPK. Karena merasa bahwa GPK sudah dapat insentif jadi ya sudah, ABK itu ya tanggung jawab GPK.

- d. Menurut anda, kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh anak berkebutuhan khusus dalam mengikuti kegiatan pembelajaran?

Jawaban :

Kendalanya kebanyakan bersifat personal karena terkait dengan keterbatasan yang mereka miliki saat mengikuti proses pembelajaran.

4. UPAYA MENGATASI KENDALA

- a. Upaya apa saja yang telah, sedang dan akan dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi oleh sekolah-sekolah inklusif di Kabupaten Banyuwangi khususnya di SDN 3 Karangrejo terkait pelaksanaan pendidikan inklusif?

Jawaban :

Kita punya diklat untuk menambah kompetensi para guru GPK, menyediakan buku-buku pembelajaran, RPP dan jurnal yang belum sempurna nanti harus kita seragamkan lagi. Macam ketunaan itu kan banyak, jadi itu nanti memang menimbulkan masalah yang kompleks. Sosialisasi lebih lanjut harus terus dilakukan untuk menggugah kepedulian dari semua pihak untuk turut peduli pada para ABK.

- b. Apakah ada pihak lain yang membantu dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi tersebut?

Jawaban ;

Alhamdulillah ada. Biasanya mereka membantu secara periodik / tahunan.

- c. Pihak-pihak mana saja yang membantu dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi tersebut?

Jawaban :

Segenap stakeholder sangat mendukung. Selain itu ada juga dukungan dari Dinas Sosial dan juga pihak swasta. Ada juga tenaga ahli, psikiater yang kita libatkan, namanya Bu Betty. Beliau sangat membantu memberi masukan saat ada yang menemui kesulitan terkait penanganan anak yang berkebutuhan khusus.

- d. Sejauh mana pihak-pihak tersebut membantu implementasi kebijakan pendidikan inklusif?

Jawaban :

Mereka sudah cukup membantu, dan kami sangat mensyukurinya.

Saran, masukan dan informasi tambahan (bersifat bebas)

Syukur alhamdulillah pendidikan inklusif di Kabupaten Banyuwangi sudah berjalan dengan baik, bahkan ada beberapa kawan luar daerah yang menimba pengalaman dari kita di Banyuwangi. Yaa walaupun masih ada kekurangan di sana sini tapi kami akan terus berbenah, membangun kebersamaan dengan segenap stakeholder yang terkait sehingga ke depan semuanya akan berjalan lebih baik. Kami selalu menekankan kepada kawan-kawan agar melaksanakan tugas ini dengan segenap hati, penuh ketulusan dan keikhlasan. Semoga ini menjadi bagian dari amal ibadah kami semua, amin.

Lampiran 14

TRANSKRIP WAWANCARA PENELITIAN
dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi

1. LATAR BELAKANG INFORMAN

- g. Nama : Drs. SULIHTIYONO, MM., MPd.
- h. Umur : 56 Tahun
- i. Jenis Kelamin : Laki-laki
- j. Agama : Islam
- k. Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi
- l. Lama menjabat : 11 tahun

2. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN INKLUSIF

- a. Apakah anda mengetahui tentang pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus/sekolah inklusif?

Jawaban :

Iya iya gimana....

- b. Sejak kapan anda mengetahui tentang pendidikan inklusif? Dan sejauh mana anda mengetahuinya?

Jawaban :

Pendidikan inklusif itu guna memberikan hak bagi ABK supaya bisa bersekolah di sekolah regular jika domisili mereka jauh dari SLB sebagai pusat sumber.

- c. Sepengetahuan saudara, sejak kapan awal pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus dilaksanakan di Kabupaten Banyuwangi? Bagaimana prosesnya?

Jawaban :

Saya tahu sejak tahun 2012, apalagi setelah dideklarasikannya Banyuwangi sebagai Kabupaten Inklusif pada tahun 2014, karena sejak saat itu semua sekolah regular mulai TK sampai SMA wajib menerima anak berkebutuhan khusus.

- d. Menurut anda, bagaimana kebijakan pendidikan inklusif di Kabupaten Banyuwangi?

Jawaban :

Yaa alhamdulillah sepanjang ini sudah berjalan dengan baik.

- e. Sejak kapan kebijakan pendidikan inklusif ini dikeluarkan dan dilaksanakan di Kabupaten Banyuwangi?

Jawaban :

Sudah mulai tahun 1985 sudah ada sekolah-sekolah terpadu yang menerima anak ABK. Secara tahun 2012 sudah ada Peraturan Bupati yang mengatur. Tahun 2014 ada Deklarasi Kabupaten Banyuwangi sebagai Kabupaten Inklusif.

- f. Bagaimanakah proses sosialisasi awal pelaksanaan pendidikan inklusif di Kabupaten Banyuwangi?

Jawaban :

Sosialisasi waktu deklarasi kan kita kumpulkan di Taman Blambangan ya... tapi sebelumnya sudah kita kumpulkan semua stakeholder mulai kepala sekolah, kemudian guru-guru yang tergabung dalam KKG, kepala sekolah yang tergabung dalam MKKS atau K3S, pengawasnya, peniliknya kita adakan sosialisasi di Pendopo... dengan narasumber dari pusat dari Jakarta, Direktorat PKLK. Itu di tingkat kabupaten, terus di tingkat kecamatan ini kita sudah sosialisasi ke semua stakeholder juga sudah kita laksanakan.

- g. Bagaimana respon sekolah-sekolah tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif ini di sekolah mereka?

Jawaban :

Yaa sebagian ada yang menyambut positif, sebagian ada yang kurang respon. Di SMP Giri, SMP 4 Banyuwangi, SMA 1 Giri, SMA 1 Glagah, SMA Kota (SMA 1 Banyuwangi). Tiap tahun ada kuota untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Yaa sesuai dengan undang-undang, minimal 1 rombel 1 anak ABK. Kalau ada 1 sekolah yang rombелnya 12 ya berarti kuotanya harus 12 juga.

- h. Apakah kegiatan sosialisasi ini masih berlanjut hingga saat ini?

Jawaban :

Iya .masih... sosialisasi terus berlanjut. Dalam rapat-rapat terus kita sampaikan. Dalam penerimaan siswa baru PPDB juga harus diingatkan kalau ada kuota untuk siswa ABK. Dan semua sekolah-sekolah di Banyuwangi juga harus siap untuk itu.

- i. Langkah-langkah apa saja yang telah diambil untuk mengawal pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif ini?

Jawaban :

Kami melakukan pemberdayaan pokja, kita punya sekretariat, kemudian kita memberdayakan guru pembimbing khusus. Kita punya SK 175 GPK yang diberi honor oleh Pemerintah Kabupaten. kemudian pemberdayaan sekolah sumber, jadi kalau sekolah reguler ini ada kesulitan bisa konsultasi ke sekolah-sekolah sumber, sekolah SLB Negeri, SDLB Negeri, SMPLB Negeri, SMALB Negeri, SDLB A Negeri Cluring, SLB Yosomulyo Gambiran, itu juga sebagai sekolah sumber dan tempat rujukan. Kemudian pelatihan-pelatihan *lifeskill*, ada juga Porseni FLS2N untuk anak-anak ABK. Tahun kemarin kita juga sempat menggelar Gebyar ABK dengan dukungan dari swasta (Rumah Sakit Yasmin), mudah-mudahan tahun ini bisa dibantu dengan APBD agar bisa menyelenggarakan Festival ABK.

- j. Bagaimana latar belakang pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Inklusif di Kabupaten Banyuwangi?

Jawaban :

Yaa untuk mengawal pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif ini tentunya.

- k. Siapa saja yang dilibatkan dalam Pokja Inklusif ini? (Susunan Organisasi Pokja Inklusif Kabupaten Banyuwangi)

Jawaban :

Semua stakeholder dilibatkan, di SK-nya ada.

- l. Sejauh ini, bagaimana peran Pokja Inklusif dalam menyukseskan pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif di Kabupaten Banyuwangi?

Jawaban :

Alhamdulillah.... Sudah cukup efektif

- m. Ada beberapa sekolah yang ditunjuk menjadi *Pilot School* pelaksanaan pendidikan inklusif. Apa alasan penunjukan beberapa sekolah menjadi *pilot school* pelaksanaan pendidikan inklusif?

Jawaban :

Yaa karena mereka memiliki komitmen yang sama, dan siap untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif.

- n. Pertimbangan apa sajakah yang digunakan untuk memilih sekolah-sekolah tersebut?

Jawaban :

Kapan hari itu diserahkan pada kecamatan masing-masing. Yang dipandang bisa dijadikan sekolah rujukan ya di tingkat kecamatan, tapi ya kita evaluasi juga di tingkat kabupaten. Kalau yang pertama usulan itu ya dari tingkat kecamatan masing-masing.

- o. Sekolah-sekolah mana sajakah yang telah ditunjuk menjadi *pilot school*?

Jawaban :

Ada lengkap di Pak Hamami mbak....

- p. Bagaimana tanggapan saudara terhadap penunjukan SDN 3 Karangrejo sebagai salah satu *pilot school* di Kabupaten Banyuwangi?

Jawaban :

Bagus.. disana bagus, ABKnya banyak.... Guru dan Kepala Sekolahnya sabar-sabar.

- q. Apa kelebihan SDN 3 Karangrejo dibanding *pilot school* lainnya?

Jawaban :

Untuk tingkat SD memang kita ya SDN 3 Karangrejo yang bagus. Meskipun banyak yang perlu kita benahi tapi komitmen pengajar disana hebat.

- r. Bagaimana pelaksanaan pendidikan inklusif di masing-masing *pilot school* tersebut? Apakah sudah sesuai dengan harapan?

Jawaban :

Insya Allah dengan Perbup itu mereka sudah siap. Tapi pada prinsipnya sekolah se Banyuwangi wajib untuk menerima anak ABK. Dan nanti kita siapkan, kalau disitu memang ada anak ABK-nya, kebetulan gurunya belum didiklat, kita bisa siapkan.

- s. Ada berapa dan sekolah mana saja yang ditunjuk menjadi sekolah inklusif di Kabupaten Banyuwangi?

Jawaban :

Datanya ada kan yaa... di Pak Hamami itu...

- t. Apakah ada penambahan dari tahun ke tahun jumlah sekolah inklusif di Banyuwangi?

Jawaban :

Pastinya ada penambahan. Kalau dari Perbup-nya kan semua sekolah wajib, cuman karena gak semua sekolah ada ABK-nya ya mereka akhirnya pasif. Tapi untuk sekolah yang ditunjuk insya Allah mereka sudah siap. Dan semuanya udah jalan. Masing-masing punya ABK, karena untuk menerima insentif itu GPK harus menunjukkan data *by name by address* minimal 5. Kalau gak bisa nunjukkan insentifnya digagalkan.

- u. Berapa jumlah ABK di Kabupaten Banyuwangi dari tahun ke tahun? (Data per sekolah inklusif dan data di SLB dari tahun ke tahun)

Jawaban :

Datanya ada

- v. Berapa jumlah GPK di Kabupaten Banyuwangi dari tahun ke tahun? (Rincian per sekolah inklusif)

Jawaban :

Data terlampir.

- w. Bagaimana kompetensi mereka?

Jawaban :

GPK kita rata-rata baru didiklat tingkat kabupaten. Dengan banyak diberi bekal, didiklat di tingkat kabupaten. Dari 175 orang itu ada yang berlatar belakang pendidikan khusus.

- x. Bagi yang tidak memiliki latar belakang pendidikan khusus, bagaimana upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kompetensi mereka?

Jawaban :

Dengan mengikuti diklat-diklat yang relevan

- y. Kompensasi apa sajakah yang diberikan oleh Pemerintah, baik pusat, provinsi maupun Kabupaten Banyuwangi, untuk memotivasi para GPK?

Jawaban :

Mereka diikutkan diklat. Jam mengajarnya diakui 6 jam/minggu. Kemudian mereka kita beri insentif, setahun 3 juta.

- z. Upaya peningkatan mutu pendidikan di sekolah inklusif perlu didukung kemampuan manajerial kepala sekolah. Selain peningkatan kompetensi bagi GPK, apakah juga ada upaya peningkatan kompetensi para kepala sekolah inklusif?

Jawaban :

Iya. Kepala Sekolah, Pengawas, ini baik dari tingkat provinsi maupun nasional itu ada pelatihan-pelatihan. Di kabupaten juga kita libatkan termasuk para Kepala UPTD-nya. Yang kaitannya dengan pendidikan inklusif juga ada. Dari provinsi ada, cuman karena jumlahnya terbatas jadi ya sekali kegiatan paling yang diberangkatkan 3 orang.

- aa. Pihak sekolah memiliki kewenangan penuh untuk merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengevaluasi komponen-komponen pendidikan inklusif yang bersangkutan. Bagaimana sekolah-sekolah inklusif di Kabupaten Banyuwangi melaksanakan kewenangan ini?

Jawaban :

Sepertinya perlu sosialisasi yang lebih luas. Kadang-kadang untuk sekolah yang diluar sekolah pilot ini kadang masih setengah-setengah. Tapi untuk sekolah-sekolah sebagai rujukan di tingkat kecamatan sudah bagus.

- bb. Bagaimana proses *assessment* yang dilakukan? Apakah dilakukan sendiri oleh GPK atau melibatkan tenaga ahli dari luar?

Jawaban :

Rata-rata dilakukan sendiri. Tapi kadang juga dibantu oleh Psikolog, yang dibayar dengan BOS. Terus ada juga kan bantuan yang dari pusat 7,5 juta itu juga bisa digunakan.

- cc. *Assessment* ada 2 jenis, yaitu *assessment* fungsional dan *assessment* klinis. Untuk sekolah-sekolah inklusif di Kabupaten Banyuwangi mereka menggunakan jenis *assessment* yang mana?

Jawaban :

Yang digunakan *assessment* fungsional.

- dd. Apakah di sekolah-sekolah inklusif tersebut terdapat RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran)? Kalau ada, siapa yang merancang RPP tersebut? (Guru Kelas/GPK/pihak lain)

Jawaban :

KKG (Kelompok Kerja Guru) GPK, ya mereka itu yang bikin RPP dengan dibantu pengawas sekolah.

- ee. Apakah sekolah-sekolah inklusif di Kabupaten Banyuwangi mempunyai perencanaan program pendidikan inklusif secara tertulis dalam bentuk program jangka panjang, jangka menengah atau jangka pendek?

Jawaban :

Ada kok acuan dari pusat. Kita juga punya Renstra.

- ff. Bagaimanakah perencanaan pendidikan yang dilakukan bagi anak berkebutuhan khusus di sekolah-sekolah inklusif di Kabupaten Banyuwangi?

Jawaban :

Berdasarkan renstra tadi. Perencanaan ini melibatkan semua stakeholder, guru-guru SLB sebagai rujukan, guru BK di SMP, guru mata pelajaran terkait dengan RPP-nya. Ada modifikasi kurikulum. Mungkin untuk anak normal begini untuk ABK menyesuaikan. Dokter, psikolog juga sering kita libatkan.

- gg. Apakah perencanaan tersebut melibatkan orang tua maupun tenaga ahli lain (seperti Guru SLB, Guru BK, Guru Mata Pelajaran, dokter dan lain-lain)?

Jawaban :

Sekolah harus aktif melibatkan semua stakeholder. Psikolog yang kita libatkan ada namanya Bu Betty itu selalu proaktif.

- hh. Bagaimanakah dengan pengelolaan kegiatan pembelajaran di sekolah-sekolah inklusif tersebut (seperti perumusan tujuan pembelajaran, metode mengajar)?

Jawaban :

GPK pertemuan rutin untuk membahas RPP, sebagai program jangka panjang, pendek dan sebagainya juga.

- ii. Kurikulum yang digunakan bagi anak berkebutuhan khusus ada 3 jenis, yaitu kurikulum umum (reguler), kurikulum modifikasi dan kurikulum yang diindividualisasi. Jenis kurikulum manakah yang digunakan di sekolah-sekolah inklusif yang ada di Kabupaten Banyuwangi?

Jawaban :

Kurikulum modifikasi. Kita tidak bisa memaksakan kemampuan anak. Kalau kemampuannya 6 ya sudah tidak bisa dipaksakan.

- jj. Bagaimana upaya sekolah-sekolah inklusif tersebut dalam mengembangkan kurikulum sesuai dengan tingkat, perkembangan dan karakteristik peserta didik agar lulusan memiliki kompetensi untuk bekal hidup (*life skill*)?

Jawaban :

Untuk membekali anak-anak, kita punya program *lifeskill* , diawali dengan gurunya kita latih, contohnya membuat sirup buah naga, keripik buah naga, kerupuk bonggol pisang, sama sirup dari bengkoang. Tahun kemarin juga diajarkan keterampilan bubut dan perbengkelan. Terus itu harusnya diajarkan ke anak-anak biar jadi tambahan kemampuan dan bekal hidup mereka.

- kk. Apakah di sekolah-sekolah inklusif tersebut ada Program Pengajaran Individual (PPI)? Siapa yang merancang PPI tersebut? (Guru Kelas/GPK/pihak lain)

Jawaban :

Ya ada. Yang merancang ya GPK. 6 jam itu digunakan di ruang sumber, jam lain-lainnya ya dengan anak-anak normal.

- ll. Program layanan pendidikan yang diberikan apakah bersifat layanan penuh/layanan pendidikan yang dimodifikasi/layanan pendidikan individualisasi?

Jawaban :

Ya gabungan. Tergantung kondisi ABK-nya.

- mm. Untuk memperlancar pelaksanaan program layanan tersebut perlu didukung oleh unit khusus yang berfungsi sebagai *supporting program* dalam bentuk layanan remedial, layanan bimbingan, layanan latihan dan pengembangan, layanan assessment dan layanan observasi. Apakah layanan-layanan tersebut juga dimiliki oleh sekolah-sekolah inklusif di Kabupaten Banyuwangi?

Jawaban :

Untuk sekolah pilot insya Allah sudah... mereka wajib punya kelas atau ruang sumber.

- nn. Dalam setiap program atau kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan, bagaimana tentang proses penilaiannya? Sistem penilaian apa yang digunakan di sekolah-sekolah inklusif di Kabupaten Banyuwangi?

Jawaban :

Ini problem karena penilaian dikaitkan dengan ujian. Anak-anak ini mau diikutkan ujian standar nasional atau dibawah standar. Tapi biasanya orang tua itu malu. Sebenarnya ikut ujian sekolah aja gak papa. Tidak usah ikut ujian nasional. Tapi mereka maunya ikut ujian nasional tapi ya sambil didiktekan, dibantu. Dari pemerintah sebenarnya tidak memberatkan. Raportnya anak-anak ABK dengan normal sama, tapi nanti ada keterangannya, nilai 7 di anak normal beda dengan ABK.

oo. Bagaimana Sistem Kenaikan Kelas yang digunakan di sekolah-sekolah inklusif di Kabupaten Banyuwangi?

Jawaban :

Untuk kenaikan kelas disamakan cuman ada keterangan yang membedakannya. Untuk ijazah kelulusan dibedakan tapi yang mengeluarkan sama-sama dari pusat. Ujian sekolah juga dari pusat. Bagi mereka yang tidak punya hambatan ya mereka ikutnya ujian standar sekolah. Ujian sekolah ikut standar provinsi. Kalau ujian negara ikut standar nasional.

pp. Bagaimana sistem Laporan Hasil Belajar para ABK di sekolah-sekolah inklusif di Kabupaten Banyuwangi?

Jawaban :

LHB anak-anak ABK dibuatkan sama seperti siswa reguler lain namun ada catatan khususnya untuk anak ABK.

qq. Apakah GPK di sekolah-sekolah inklusif di Kabupaten Banyuwangi juga melakukan kegiatan bimbingan dan konseling bagi para ABK?

Jawaban :

Kalau di SD dirangkap guru kelas sekaligus jadi GPK. Kalau di SMP dan SMA/SMK baru ada guru BK.

rr. Ujian Akhir Sekolah (UAS) para ABK apakah mengikuti standart SDLB atau SD? (Jika mengikuti standart SDLB secara administratif di bawah naungan Dispendik Provinsi, sedangkan jika mengikuti standart SD berarti secara administratif di bawah naungan Dispendik Kabupaten/Kota)

Jawaban :

Ujian Akhir Sekolah ikutnya standar SD. Anak-anak menyesuaikan dengan kemampuan.

ss. Menurut anda, apakah terjadi peningkatan potensi yang dialami anak berkebutuhan khusus setelah mendapatkan pendidikan di sekolah inklusif?

Jawaban :

Iya pasti, kalau mereka sekolah di sekolah khusus mereka hanya bergaul dengan anak-anak berkebutuhan khusus, sementara kalau di sekolah inklusif mereka akan belajar untuk bersosialisasi dengan orang normal. Kemampuan sosial mereka lebih bagus. Untuk anak-anak normal juga bisa melatih empati mereka agar turut membantu temannya yang difabel agar bisa bersekolah dengan baik.

tt. Sejauh ini bagaimana peningkatan potensi-potensi yang dialami anak berkebutuhan khusus di Kabupaten Banyuwangi?

Jawaban :

Luar biasa sekali banyak prestasi yang diraih anak-anak sampai tingkat nasional.

uu. Prestasi apa saja yang pernah diraih oleh ABK di Kabupaten Banyuwangi?

Jawaban :

Ada daftarnya nanti mbak, terlampir ya.

vv. Menurut anda, manfaat apa saja yang dapat diperoleh dan dilihat dari pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus yang dilakukan di sekolah-sekolah inklusif di Kabupaten Banyuwangi?

Jawaban :

Anak-anak menjadi lebih mandiri dan percaya diri dengan prestasi yang berhasil diraihinya.

ww. Kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan untuk membangun sinergitas seluruh elemen pendukung implementasi pendidikan inklusif di Kabupaten Banyuwangi?

Jawaban :

Biar kompak kami memanfaatkan keberadaan pokja, pameran pendidikan inklusif, dan juga Gebyar ABK.... Alhamdulillah semuanya kompak.

xx. Sejauh ini bagaimana pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif di Kabupaten Banyuwangi?

Jawaban :

Dalam PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) ada kuota khusus untuk anak ABK. Ini semua sekolah harus konsekuen. Kemarin itu ada yang menolak langsung saya panggil itu... alhamdulillah sekarang sudah masuk. Sekolah sebenarnya tidak ada masalah tapi kadang panitia penerimaannya yang agak bermasalah. Sepertinya sosialisasinya memang kurang, mereka belum paham ada kuota khusus untuk ABK, tapi setelah dijelaskan ya akhirnya semua paham kok.

yy. Secara lebih detail, bagaimana pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolah-sekolah lain yang telah ditunjuk menjadi sekolah inklusif?

Jawaban :

Sejauh ini semuanya sudah berjalan dengan cukup baik.

zz. Bagaimana peran Sekolah Luar Biasa sebagai Pusat Sumber di Kabupaten Banyuwangi?

Jawaban :

SLB sebagai pusat sumber juga telah melaksanakan perannya dengan baik. Koordinasi dan komunikasi sudah terjalin seandainya ada hal-hal atau masalah yang terjadi kaitannya dengan para ABK beserta GPK-nya.

aaa. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun kegagalan implementasi suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Menurut bapak bagaimana keempat faktor tersebut mempengaruhi implementasi pendidikan inklusif di Kabupaten Banyuwangi?

Jawaban :

Semuanya berperan dan mendukung pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif ini.

bbb. Apakah ada juklak (petunjuk pelaksanaan) dan juknis (petunjuk teknis) terkait implementasi pendidikan inklusif di Kabupaten Banyuwangi?

Jawaban :

Iya ada itu mbak....

ccc. Dalam hal komunikasi, ada 3 hal yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu : Transmisi (sebuah kebijakan yang akan diimplementasikan harus disalurkan para pejabat yang akan melaksanakannya), Kejelasan (*Clarity*) tujuan dan cara yang akan digunakan dalam sebuah kebijakan, serta Konsistensi (komunikasi yang jelas dan konsisten). Bagaimana kaitannya saat komunikasi berperan dalam implementasi kebijakan pendidikan inklusif di Kabupaten Banyuwangi?

Jawaban :

Selama ini komunikasi bagus. Kalau pertemuan-pertemuan 90% hadir. Kegiatan-kegiatan juga aktif. Kami juga punya WA Group Pokja Inklusif Banyuwangi. Ada WA Group Pokja Inklusif Nasional juga.

ddd. Apakah ada media komunikasi khusus yang dimiliki oleh pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi pendidikan inklusif di Kabupaten Banyuwangi?

Jawaban :

Selain WA Group kita juga sering pertemuan bareng. Komunikasi kami cukup intens untuk membahas semuanya kaitannya dengan pendidikan inklusif.

eee. Apakah antar pihak tersebut juga selalu intens melakukan komunikasi terkait beragam masalah dan upaya pemecahan bersama?

Jawaban :

Iya. Kalau kami mau ada kunjungan ke luar kota ya tinggal lewat media ini aja. Kemarin itu ada dari Probolinggo, lalu Trenggalek.... Datang dari DPR dan Dinas Pendidikan Trenggalek. Kita sering jadi jujugan. Untuk Jawa Timur, baru Banyuwangi, Batu dan Sidoarjo yang sudah mengawali pendidikan inklusif.

- fff. Disposisi adalah sikap dan komitmen dari pelaksana terhadap kebijakan atau program yang harus mereka laksanakan agar mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Sejauh ini bagaimana peran Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi dalam implementasi kebijakan pendidikan inklusif ini?

Jawaban :

Banyuwangi cukup diacungi jempol oleh kabupaten-kabupaten lain karena untuk pendidikan inklusif kita sudah dibantu APBD Kabupaten sebesar 900 juta. Sementara di kabupaten-kabupaten lain tidak sebesar itu bahkan ada yang tidak ada. Jadi mereka kaget. Makanya, dari pusat pun akhirnya juga mengucurkan bantuan dengan melihat kepedulian dan komitmen dari pemerintah daerah setempat. Harapan saya tuh ada festival ABK, sebagai media ekspresi anak-anak ABK.

- ggg. Bagaimana wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terhadap pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif ini? (bisa dari sisi prioritas anggaran, beasiswa ABK, pemenuhan sarana prasarana atau wujud komitmen lainnya)

Jawaban ;

Kami sudah mengalokasikan 900 juta untuk pendidikan khusus ini, tapi sebagian besar habis untuk insentif GPK. Beasiswa ABK sayangnya belum ada. Yang ada baru yang berprestasi aja, itu lewat Dispora. Untuk sarana prasarana harusnya juga dibantu untuk mencukupi. Kita harus peduli pada sarana prasarana yang ramah bagi difabel. Utamanya untuk sekolah-sekolah yang memiliki komitmen tinggi terhadap pendidikan inklusif.

- hhh. Tiga unsur utama yang mempengaruhi kemampuan dan kemauan aparat pelaksana untuk melaksanakan kebijakan yaitu Kognisi (seberapa jauh pemahaman pelaksana terhadap kebijakan), arahan dan tanggapan pelaksana (bagaimana penerimaan, ketidakberpahaman maupun penolakan pelaksana) serta intensitas respon atau tanggapan pelaksana. Menurut saudara, bagaimana pemenuhan 3 unsur tersebut oleh para pelaksana kebijakan, mulai dari pelaksana level akar rumput (sekolah-sekolah inklusif) hingga pemerintah pusat?

Jawaban :

Untuk sekolah-sekolah pilot dan rujukan saya kira sudah bagus, tapi untuk sekolah-sekolah lain masih perlu ada peningkatan.

- iii. Sejauh ini bagaimana dukungan dari pemerintah, mulai dari pemerintah pusat hingga kabupaten terkait anggaran dan kecukupan sarana prasarana? (data numerik dari tahun ke tahun)

Jawaban :

Untuk Banyuwangi sudah lumayan dibandingkan dengan kabupaten lain itu tadi ya.. ada insentif untuk ABK, ada untuk sekolah-sekolah piloting, lalu untuk pemberdayaan kita juga.

- jjj. Selain dana, bantuan apa lagi yang pernah diberikan oleh pemerintah?

Jawaban :

Ada dari Dinas Sosial, dari swasta juga ada Rumah Sakit Yasmin yang membantu Gebyar ABK. Ada juga bantuan buku-buku dari USAID. Dari Pusat, dari Direktorat PKLK, juga ada bantuan buku-buku pembelajaran itu sudah kita salurkan semua khusus untuk ABK.

- kkk. Apakah ada mekanisme pelaporan secara periodik perihal implementasi kebijakan pendidikan inklusif ini kepada Bupati/Gubernur/Menteri Pendidikan?

Jawaban :

Kalau laporan bantuan mesti kita laporkan, tapi kalau laporan perkembangan ini biasanya ya setahun sekali.

- III. Adakah evaluasi secara periodik dari pemerintah pusat/provinsi/kabupaten terkait dengan implementasi kebijakan pendidikan inklusif ini?

Jawaban :

Ini rencananya tanggal 21 Oktober ini ada evaluasi tentang keberadaan GPK, nanti ada uji kompetensi GPK, ini langsung dari pusat. Di tingkat kabupaten sendiri, ini rencananya ada monev turun ke sekolah-sekolah. Ini periodik kita laksanakan rutin setiap tahunnya.

- mmm. Adakah apresiasi dari pemerintah pusat/provinsi/kabupaten terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pendidikan inklusif ini? (mulai dari para GPK, sekolah-sekolah inklusif, para kepala sekolah inklusif, Pokja Inklusif)

Jawaban :

Sudah ada bantuan yang kita dapatkan dari pusat, padahal tidak semua kabupaten bisa dapat lo. Dari 8 kabupaten percontohan hanya 3 kabupaten yang dapat bantuan, diantaranya Banyuwangi. Terus ada juga pemilihan guru inklusif itu ada pak Cahyo yang terpilih dikirim ke Australia. Itu atas nama inklusif langsung. Beliau Guru GPK di SMAN 1 Glagah, sekaligus berperan sebagai pengurus Pokja Inklusif Jawa Timur. Dari Provinsi Jawa Timur juga mengadakan diklat-diklat untuk meningkatkan kompetensi para GPK.

- nnn. Tujuan utama dari sistem kegiatan pendidikan yang berlangsung di institusi persekolahan adalah mengembangkan dan membentuk potensi intelektual untuk menjadi cerdas secara terprogram dan koordinatif dengan materi pendidikan yang dipersiapkan untuk dilaksanakan secara metodis, sistematis, intensif, efektif dan efisien menurut ruang dan waktu yang telah ditentukan. Menurut anda, sejauh ini apa yang telah dilakukan oleh SDN 3 Karangrejo sudah sesuai dengan tujuan utama tersebut?

Jawaban :

Komitmen mereka sudah bagus, kerjasama dengan guru-gurunya, komitenya sudah bagus semua.

- ooo. Apakah ada konsep pengembangan atau penyempurnaan kebijakan pendidikan inklusif ke depan agar implementasinya semakin tepat sasaran dan bisa menyentuh semakin banyak anak berkebutuhan khusus?

Jawaban :

Semoga insentif para GPK akan bisa terus diberikan, sehingga para GPK tetap semangat bekerjanya. Lagipula para GPK itu kebanyakan non PNS jadi insentif itu akan sangat bermanfaat buat mereka.

3. KENDALA-KENDALA YANG DIHADAPI

- a. Menurut anda, kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh sekolah-sekolah inklusif di Kabupaten Banyuwangi dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif?

Jawaban :

Kendalanya 1. Guru GPK masih terbatas jumlahnya; 2. Dana juga terbatas; lalu 3. Kompetensi GPK juga masih harus terus ditingkatkan karena latar belakangnya banyak yang bukan dari pendidikan khusus; 4. Perlu sosialisasi yang terus menerus agar mereka paham tentang inklusif; 5. Sarana prasarana, 6. Perlu juga dukungan dari Pemda dan stakeholders; 7. Dukungan CSR dari perusahaan-perusahaan juga sangat diharapkan. 8. Perlu adanya ruang khusus, selama ini kebanyakan sekolah hanya memberikan sekat untuk difungsikan sebagai ruang khusus. 9. Kami juga perlu

sarana ketemu, minim setahun sekali, lewat even Gebyar ABK yang mempertemukan semua ABK dan GPK beserta seluruh stakeholder yang terkait di Kabupaten Banyuwangi. 10. Perlu juga adanya apresiasi dan penghargaan kepada guru berprestasi biar tambah semangat. Juga penghargaan untuk sekolah penyelenggara inklusif terbaik.

- b. Menurut anda, kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh SDN 3 Karangrejo sebagai salah satu *pilot school* dalam pelaksanaan pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus?

Jawaban :

Kurang lebihnya juga sama. Dengan insentif tersebut para GPK sudah mau menerima, daripada enggak ada. Apalagi untuk para GTT yang menjadi GPK, mereka juga sangat minim gajinya, sehingga dengan adanya tambahan insentif tersebut mereka sudah sangat bersyukur. Selanjutnya masih perlu adanya sosialisasi lebih lanjut. Beasiswa bagi ABK juga harus terus diupayakan agar mereka bisa belajar dengan lebih baik dan fasilitas yang lebih nyaman tentunya.

- c. Menurut anda, kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh guru-guru pengajar yang mengajar pada kelas yang terdapat anak berkebutuhan khusus?

Jawaban :

Sarana prasarana dan alat bantu belajar yang seadanya, latar belakang pendidikan para GPK yang bukan pendidikan khusus membuat mereka kadang menemui kesulitan saat menangani anak didiknya yang berkebutuhan khusus. Kadang masih ada ketidakpedulian dari guru yang bukan GPK. Karena merasa bahwa GPK sudah dapat insentif jadi ya sudah, ABK itu ya tanggung jawab GPK.

- d. Menurut anda, kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh anak berkebutuhan khusus dalam mengikuti kegiatan pembelajaran?

Jawaban :

Kendalanya sepertinya hanya bersifat personal mbak karena terkait dengan keterbatasan yang mereka miliki saat mengikuti proses pembelajaran.

4. UPAYA MENGATASI KENDALA

- a. Upaya apa saja yang telah, sedang dan akan dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi oleh sekolah-sekolah inklusif di Kabupaten Banyuwangi khususnya di SDN 3 Karangrejo terkait pelaksanaan pendidikan inklusif?

Jawaban :

Kita punya diklat untuk menambah kompetensi para guru GPK, menyediakan buku-buku pembelajaran, RPP dan jurnal yang belum sempurna nanti harus kita seragamkan lagi. Macam ketunaan itu kan banyak, jadi itu nanti memang menimbulkan masalah yang kompleks. Sosialisasi lebih lanjut harus terus dilakukan untuk menggugah kepedulian dari semua pihak untuk turut peduli pada para ABK.

- b. Apakah ada pihak lain yang membantu dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi tersebut?

Jawaban ;

Alhamdulillah ada. Biasanya mereka membantu secara periodik / tahunan.

- c. Pihak-pihak mana saja yang membantu dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi tersebut?

Jawaban :

Segenap stakeholder sangat mendukung. Selain itu ada juga dukungan dari Dinas Sosial dan juga pihak swasta. Ada juga tenaga ahli, psikiater yang kita libatkan, namanya Bu Betty. Beliau sangat membantu memberi masukan saat ada yang menemui kesulitan terkait penanganan anak yang berkebutuhan khusus.

- d. Sejauh mana pihak-pihak tersebut membantu implementasi kebijakan pendidikan inklusif?

Jawaban :

Syukur alhamdulillah mereka sudah cukup membantu.

Saran, masukan dan informasi tambahan (bersifat bebas)

Saya sangat bersyukur pendidikan inklusif di Kabupaten Banyuwangi sudah berjalan dengan baik meskipun masih banyak yang harus kami benahi. Walaupun gini... tapi ada juga lo yang studi tiru ke kami... tapi kami apa adanya... setiap masukan akan menjadi koreksi bagi kami semua untuk memperbaiki diri.

